Buku Seri Riset Etnografi Kesehatan 2016

Bugis Tukak

Relokasi dari Kekumuhan

Agung Dwi Laksono
Roland Alberto Nggeolima
Mellyza Margareth

BUGIS TUKAK
RELOKASI SANITASI

Agung Dwi Laksono
Roland Alberto Nggeolima
Mellyza Margareth

Editor:
Prof. Lestari Handayani

PENERBIT PT KANISIUS

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kami haturkan sebesar-besarnya kepada Kepala Badan Litbangkes Kementerian Kesehatan RI yang telah membiayai penelitian hingga penulisan buku hasil Riset Etnografi Kesehatan ini melalui Puslitbang Humaniora dan Manajemen Kesehatan. Tak lupa kami juga menghaturkan ribuan terima kasih kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten setempat yang telah memfasilitasi proses pengumpulan data di lapangan.

Salam terima kasih terhangat pada teman-teman lapangan yang telah berkenan menjadi informan. Kepala Puskesmas, kepala desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, ibu-ibu kader, dan kepada siapapun yang telah berkenan memberi pelajaran tentang kehidupan pada kami, salam takzim.

KATA PENGANTAR

Penyelesaian masalah dan situasi status kesehatan masyarakat di Indonesia saat ini masih dilandasi dengan pendekatan logika dan rasional sehingga masalah kesehatan menjadi semakin kompleks. Di saat pendekatan rasional belum dapat menyelesaikan masalah-masalah kesehatan secara tuntas, dirasa perlu dan penting untuk mengangkat kearifan lokal menjadi salah satu cara menyelesaikan masalah kesehatan masyarakat. Untuk itulah, dilakukan Riset Etnografi Kesehatan sebagai salah satu alternatif mengungkap berbagai fakta kehidupan sosial masyarakat terkait kesehatan.

Dengen mempertemukan pandangan rasional dan *indigenous knowledge* (kaum humanis) diharapkan akan menumbuhkan kreativitas dan inovasi untuk mengembangkan cara-cara pemecahan masalah kesehatan masyarakat. Simbiose ini juga dapat menimbulkan rasa memiliki (*sense of belonging*) dan rasa kebersamaan (*sense of togetherness*) dalam menyelesaikan masalah untuk meningkatkan status kesehatan di Indonesia.

Tulisan dalam buku seri ini merupakan bagian dari 20 seri buku Riset Etnografi Kesehatan yang dihasilkan dari riset di berbagai daerah di Indonesia tahun 2016. Buku seri ini berisi informasi etnografi kesehatan dari berbagai suku/budaya yang mengungkap dan menggali nilai-nilai yang berkembang di masyarakat agar dapat diuji dan dimanfaatkan untuk riset pengembangan intervensi kesehatan berbasis budaya serta bagi peningkatan upaya kesehatan dengan memperhatikan kearifan lokal.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh informan, partisipan, dan penulis yang sudah berkontribusi dalam penyelesaian buku seri ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementrian Kesehatan RI yang telah memberikan kesempatan pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Humaniora dan Manajemen Kesehatan untuk melaksanakan Riset Etnografi Kesehatan 2016 sehingga dapat tersusun beberapa buku seri dari hasil riset ini.

Jakarta, Oktober 2016
Kepala Puslitbang Humaniora
Dan Manajemen Kesehatan
Badan Litbang Kesehatan

Dr. Dede Anwar Musadad, S.K.M., M.Kes.

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kabupaten Bangka Selatan merupakan wilayah dengan status kesehatan yang masih rendah. Hal ini dapat kita simpulkan apabila kita membandingkan status kesehatan Kabupaten Bangka Selatan dengan wilayah lain dalam satu kawasan. Kabupaten Bangka Selatan menempati urutan ke-tujuh dari tujuh kabupaten/kota di Provinsi Bangka Belitung. Sementara pada level nasional Kabupaten Bangka Belitung menempati urutan 376 dari 497 kabupaten/kota yang ada pada tahun 2013, pada saat survei dilakukan. Perangkingan ini dilakukan berdasarkan Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) yang dirilis oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kesehatan RI berdasarkan data survei Riskesdas Tahun 2013[1].

Salah satu sub indeks yang menunjukkan kinerja kurang memuaskan adalah sub indeks kesehatan lingkungan. Sub indeks ini meliputi dua indikator, yaitu akses sanitasi, dengan cakupan 64,92%, dan akses air bersih dengan cakupan 9,38%[2]. Definisi operasional "akses sanitasi", menurut Riskesdas adalah rumah tangga yang menggunakan fasilitas buang air besar milik sendiri, jenis tempat buang air besar jenis leher angsa atau plengsengan, dan tempat pembuangan akhir tinja jenis tangki septik[3].

1 Lihat Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI. (2014). *Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat*. Badan Litbangkes, Jakarta. Halaman 17.

2 *Ibid.*

3 Lihat Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI. (2013). *Laporan Nasional Riset Kesehatan Dasar*. Balitbangkes, Jakarta. Halaman 88.

Berdasarkan informasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Selatan, pada saat penelitian akan dilakukan (bulan Mei 2016), bahwa Kabupaten Bangka Selatan telah banyak maju bergerak untuk melakukan perbaikan di bidang kesehatan. Realitas hasil survei Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas[4]) memang menunjukkan telah terjadi peningkatan yang cukup tajam pada indikator akses sanitasi, hampir mencapai dua puluh persen selisih peningkatannya.
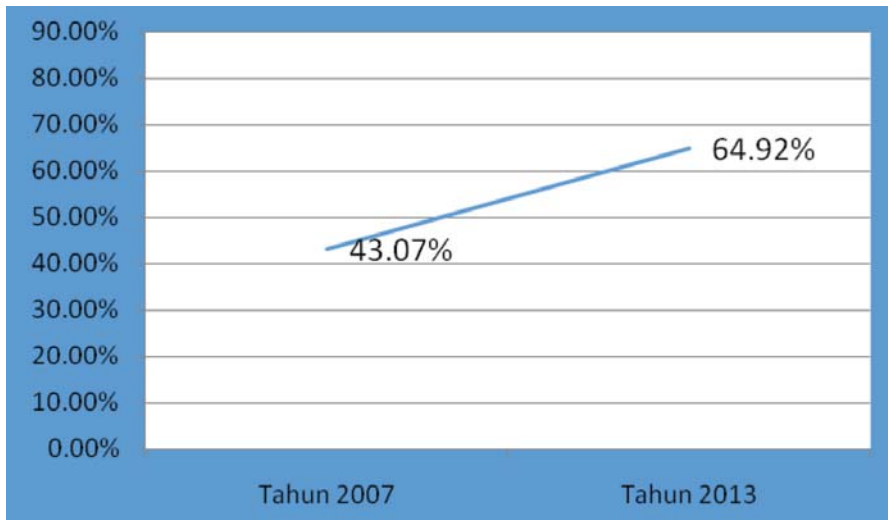
Sumber: Riset Kesehatan Dasar Tahun 2007 dan 2013

Gambar 1.1. Trend Cakupan Akses Sanitasi Kabupaten Bangka Selatan

Menurut konsep yang ditawarkan oleh Hendrik Blum (1974) seperti dikutip oleh Reinke (1988), status kesehatan dipengaruhi oleh empat faktor, yaitu perilaku kesehatan, kesehatan lingkungan, pelayanan kesehatan dan faktor keturunan atau herediter. Konsep Hendrik Blum ini terfokus pada status kesehatan masyarakat yang tidak hanya dipengaruhi oleh empat faktor tersebut, tetapi juga saling mempengaruhi secara simultan, saling berinteraksi, satu sama lain. Dalam konsep yang ditawarkan tersebut Blum berpendapat faktor paling besar yang berpengaruh adalah faktor perilaku, kemudian

4 Riskesdas adalah sebuah survei yang diinisiasi oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI. Sampai dengan saat ini Riskesdas telah dijalankan selama tiga kali (2007, 2010, dan 2013). Selanjutnya Riskesdas direncanakan akan dijalankan setiap lima tahun sekali.

disusul faktor kesehatan lingkungan. Di sisi lain, faktor lingkungan seringkali berkaitan erat dengan faktor perilaku kesehatan[5].

Perkembangan terbaru adalah tawaran konsep '*social determinan of health'* yang mulai banyak menjadi perhatian dalam dunia kesehatan masyarakat. Disinyalir ada beberapa faktor di luar bidang kesehatan (faktor sosial) yang turut andil berpengaruh terhadap status kesehatan seseorang, baik sebagai individu maupun sebagai anggota suatu komunitas atau masyarakat.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mendefinisikan pengertian Determinan Sosial Kesehatan sebagai berikut[6]:

> *"The social determinants of health are the conditions in which people are born, grow, live, work, and age, including the health system. These circumstances are shaped by the distribution of money, power, and resources at global, national and local levels. The social determinants of health are mostly responsible for health inequities - the unfair and avoidable differences in health status seen within and between countries."*

Lebih lanjut, Dahlgren dan Whitehead (1991) dalam Laksono dan Rachmawati (2013), mengemukakan sebuah "Model Pelangi Determinan Sosial Kesehatan", yang berbicara tentang beberapa lapisan pengaruh pada kesehatan. Dahlgren dan Whitehead menggambarkan teori ekologi sosial untuk kesehatan. Mereka berusaha untuk memetakan hubungan antara individu, lingkungan, dan penyakit[7].

Individu berada di pusat dengan satu set gen tetap. Sementara, di sekitar individu adalah faktor yang dapat berpengaruh terhadap kesehatan yang dapat dimodifikasi. Lapisan pertama adalah perilaku

---

5 Pelajari Reinke, W.A., editor, (1988). *Health Planning for Effective Management*. Oxford University Press, New York. Halaman 79.

6 WHO mulai mengembangkan kajian *Social Determinant of Health* (Determinan Sosial Kesehatan), karena disinyalir faktor tersebut berpengaruh kuat terhadap kinerja sistem pelayanan kesehatan. Terakhir, pada tanggal 19-21 Oktober 2011, WHO menyelenggarakan *World Conference on Social Determinants of Health* di Rio de Janeiro, Brazil. Baca World Health Organization, 2011. World Conference on Social Determinants of Health. *Meeting Report.* Rio de Janeiro. 19-21 Oktober 2011

7 Pelajari Laksono dan Rachmawati (2013). *Determinant Sosial Kesehatan Ibu dan Anak.* Penerbit Kanisius, Yogyakarta. Halaman 6-7.

pribadi dan cara hidup yang dapat meningkatkan atau merusak kesehatan, misalnya pilihan untuk merokok atau tidak. Individu dipengaruhi oleh pola persahabatan dan norma-norma masyarakat mereka. Lapisan berikutnya adalah pengaruh sosial dan masyarakat, yang memberikan dukungan timbal balik bagi anggota masyarakat dalam kondisi yang tidak menguntungkan. Namun, mereka juga dapat memberikan dukungan atau tidak memiliki efek negatif. Lapisan ketiga meliputi faktor struktural: perumahan, kondisi kerja, akses ke fasilitas pelayanan, dan penyediaan fasilitas penting. Secara umum, model yang dikemukakan Dahlgren dan Whitehead (1991) ini paling banyak diacu oleh para pemerhati determinan sosial kesehatan[8].

Secara umum apa yang ditawarkan dalam konsep '*social determinant of health'* adalah menjadikan lebih rinci apa yang telah ditawarkan oleh Hendrik Blum jauh-jauh hari sebelumnya. Pada intinya status kesehatan justru dipengaruhi secara dominan oleh banyak faktor di luar bidang kesehatan. Faktor perilaku kesehatan dan lingkungan yang menjadi faktor dominan dalam konsep Hendrik Blum, diperinci menjadi banyak faktor yang turut andil membentuk kedua faktor tersebut. Sebut saja misalnya faktor sosial, ekonomi, budaya, geografis, lingkungan, dan juga keterbukaan informasi[9]. Kesemua faktor tersebut turut berperan dalam proses internalisasi sebuah perilaku kesehatan yang dinampakkan seseorang.

Tidak berhenti hanya pada dua konsep, para antropologi juga menawarkan konsep antropologi kesehatan, dan fakta secara empiris memang menunjukkan bahwa kesehatan sangat dipengaruhi oleh faktor budaya setempat. Foster dan Anderson (1985) menyatakan bahwa antropologi kesehatan adalah disiplin ilmu yang memberi perhatian pada aspek-aspek biologis dan sosio-budaya dari tingkah laku manusia terutama tentang cara-cara interaksi antara keduanya

---

8 *Ibid.*

9 Lihat Marmot dan Wilkinson, editor (2005). *Social Determinant of Health. Second Edition.* Oxford University Press, London; bandingkan dengan Dahlgren dan Whitehead (1991). *Policies and Strategies to Promote Social Equity in Health*. Institute for Futures Studies, Stockholm; bandingkan juga dengan Ingleby, D. (2012). Ethnicity, Migration and the 'Social Determinants of Health' Agenda. *Psychosocial Intervention*, Vol. 21, No. 3, 2012. Halaman 331-341.

di sepanjang sejarah kehidupan manusia, yang mempengaruhi kesehatan dan penyakit pada manusia[10].

Jauh sebelumnya, Fabrega (1972) sudah menawarkan definisi antropologi kesehatan sebagai sebuah studi yang menjelaskan tentang berbagai faktor, mekanisme dan proses yang memainkan peranan di dalam atau mempengaruhi cara-cara dimana individu-individu dan kelompok-kelompok terkena oleh atau bagaimana merespon terhadap sakit dan penyakit. Antropologi kesehatan mempelajari masalah-masalah sakit dan penyakit dengan penekanan atau berkaitan terhadap pola-pola tingkah laku[11].

Berdasarkan konsep-konsep yang ditawarkan oleh Hendrik Blum (1974) dengan empat faktornya, Dahlgren dan Whitehead (1991) dengan 'Model Pelangi Determinan Sosial Kesehatan'nya, serta tawaran para antropolog kesehatan, maka dapat disimpulkan bahwa untuk memahami faktor kesehatan tidak hanya dengan kacamata kesehatan saja. Masih banyak faktor-faktor lain yang berkaitan dan dapat berpengaruh pada bidang kesehatan.

Kembali menilik pada kasus Kabupaten Bangka Selatan, apabila benar apa yang dinyatakan oleh Kepala Dinas Kesehatan, bahwa

Berdasar uraian permasalahan, maka yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini adalah benarkah permasalahan tentang akses sanitasi telah berhasil diatasi di wilayah penelitian? Bila benar, bagaimana masyarakat bisa bangkit dari kondisi sebelumnya? Bagaimana petugas dan masyarakat memanfaatkan potensi lokalnya untuk sebaik-baik perubahan yang bisa dilakukan?

Secara umum tujuan dari penulisan buku riset etnografi kesehatan di Kabupaten Bangka Selatan adalah untuk menggambarkan akses sanitasi masyarakat etnik Bugis di Desa Tukak, Kecamatan Tukak Sadai, Kabupaten Bangka Selatan. Sedang secara khusus,

---

10 Pelajari Foster dan Anderson (1986). *Antropologi Kesehatan*, Grafiti, Jakarta. Halaman 1-3

11 Baca Fabrega, Horacio, Jr. (1970). Medical Anthropology. Dalam *Bienial Review of Anthropology* B.H. Siegel, editor. Stanford University Press, Stanford, California. Halaman 30-68. Bandingkan dengan beberapa definisi lain dalam Djekky R. Djoht (2002). Penerapan Ilmu Anthropologi Kesehatan dalam Pembangunan Kesehatan Masyarakat Papua. *Jurnal Antropologi Papua.* Volume 1, Nomor 1, Agustus 2002. Halaman 20-38.

Kabupaten Bangka Selatan telah menggeliat dan banyak berbuat untuk bangkit dalam indikator kesehatan lingkungan, khususnya pada indikator akses sanitasi, maka upaya pendeskripsian dengan baik proses tersebut menjadi penting. Gambaran kondisi masyarakat dan faktor-faktor yang dinilai berpengaruh bisa menjadi sebuah referensi pembelajaran bagi wilayah-wilayah lain di sekitarnya yang memiliki karakteristik serupa.

Penelitian ini merupakan penelitian etnografi yang mempelajari secara mendalam dan holistik tentang kesehatan lingkungan, terutama akses sanitasi, yang berlaku pada etnik Bugis di Desa Tukak, Kecamatan Tukak Sadai, Kabupaten Bangka Selatan. Esensi dari penelitian ini adalah memahami secara mendalam arti atau makna kondisi tersebut dalam suatu lingkungan budaya[12]. Sedang tujuan dari penelitian etnografi menurut Malinoswki, seperti dikutip oleh James P. Spradley (1997), adalah untuk memahami sudut pandang penduduk asli, hubungannya dengan kehidupan, untuk mendapatkan pandangannya mengenai dunianya[13].

Lebih lanjut Spradley (1997) menyatakan bahwa penelitian etnografi melibatkan aktivitas belajar mengenai dunia orang yang telah belajar melihat, mendengar, berbicara, berpikir, dan bertindak dengan cara-cara yang berbeda. Tidak hanya mempelajari masyarakat, lebih dari itu, etnografi berarti belajar dari masyarakat[14]. Untuk maksud tersebut, peneliti yang terdiri dari tiga orang yang merupakan kombinasi antara satu peneliti sosial (antropolog) dan dua peneliti kesehatan (sarjana kesehatan masyarakat), berada di lapangan, *live in*, berbaur dengan masyarakat setempat kurang lebih selama dua bulan selama periode Juni-Juli 2016.

Selama dua bulan di lapangan peneliti mengumpulkan data dengan metode observasi partisipatif. Selain itu peneliti juga aktif melakukan wawancara mendalam terhadap informan-informan

---

12 Baca Wiyata, A. L. (2002). *Carok, Konflik Kekerasan dan Harga Diri Orang Madura*. LKiS, Yogyakarta. Halaman 22.

13 Pelajari Spradley, J.P. 1997. *Metode Etnografi.* Yogyakarta; PT. Tiara Wacana. Halaman 3.

14 *Ibid.*

kunci yang paham dan mengerti tentang etnik Bugis di Desa Tukak. Selanjutnya informan didapatkan secara *snowball* berdasarkan hasil wawancara dengan informan kunci.

Pada penelitian ini peneliti memfokuskan pada tema tentang kesehatan lingkungan, terutama akses sanitasi. Gambaran awal yang dicari adalah tentang konteks budaya dan konteks kesehatan yang berhubungan dengan tema utama. Hingga akhirnya kedua konteks lokal tersebut akan dijadikan sebagai dasar pemilihan rekomendasi kebijakan upaya perbaikan akses sanitasi masyarakat etnik Bugis pada khususnya, dan masyarakat Desa Tukak pada umumnya.

Pada tahap awal peneliti akan mengumpulkan data dan berdiskusi dengan pihak Puskesmas Tiram untuk mengetahui gambaran akses sanitasi di Desa Tukak. Selanjutnya berdasarkan data tersebut peneliti akan melihat realitas di lapangan. Peneliti melakukan observasi partisipatif secara langsung di wilayah pemukiman etnik Bugis.

Wawancara mendalam dilakukan untuk melakukan konfirmasi terhadap hasil observasi. Wawancara mendalam juga dilakukan untuk tujuan mengetahui gambaran konsep-konsep masyarakat etnik Bugis terhadap konsep-konsep yang berkenaan dengan sehat-sakit, bersih-kotor, nilai air dan konsep-konsep lain yang berkaitan dengan tema sentral tentang akses sanitasi pemakaian jamban sehat.

Pengamatan dan juga wawancara mendalam yang dilakukan oleh peneliti dibantu dengan teknologi terbaru. Pengamatan akan dibantu dengan peralatan perekam gambar dan juga perekam video, sementara untuk wawancara mendalam peneliti akan dibantu dengan alat perekam audio atau suara.

Dapat dipahami bahwa telah banyak peneliti sosial yang melakukan kajian tentang etnik Bugis, untuk itu konsep-konsep yang berlaku pada etnik Bugis telah banyak dikemukakan. Meski demikian, peneliti tidak akan secara langsung begitu saja mengambil konsep-konsep tersebut, tetapi akan melakukan *cross check* dengan realitas keseharian yang didapatkan dari hasil observasi, yang ada dan berlaku di lapangan. Mencari faktor kebaruan, atau bahkan yang sudah tidak lagi berlaku pada kondisi di lapangan saat ini.

Agar dapat terhindar dari bias etnosentris dan dapat melukiskan suatu kebudayaan dalam bentuk *thick description* maka perlu memperhatikan perspektif emik dan etik. Perspektif emik adalah adalah deskripsi kebudayaan dari sudut pandang orang yang diteliti, sedang perspektif etik adalah mendeskripsikan kebudayaan berdasarkan konsep-konsep antropologi[15]. Konsep-konsep yang dipergunakan sebagai perspektif etik tidak hanya yang berlaku dalam ilmu antropologi, tetapi juga konsep-konsep yang berlaku di bidang kesehatan sebagai arus utama penelitian ini.

1.2. Keterbatasan

Sebagai sebuah studi, penelitian yang sedang dilakukan ini tentu saja tidak terlepas dari keterbatasan atau kelemahan. Kelemahan-kelemahan tersebut lebih merupakan sebuah konsekuensi dari metode penelitian yang telah dipilih oleh peneliti.

Pemilihan etnik Bugis misalnya, hasil penelitian ini tidak dapat dilakukan generalisasi terhadap masyarakat etnik Bugis secara keseluruhan. Hal ini dikarenakan menyangkut masalah geografis dan lingkungan yang berbeda dengan keberadaan masyarakat etnik Bugis di tempat lainnya. Di masing-masing tempat yang berbeda, masyarakat etnik Bugis telah mengalami interaksi dengan beragam masyarakat etnik lain yang berbeda-beda. Sementara modernisasi juga menjadi salah faktor penentu dalam perkembangan budaya dengan penerimaan yang berbeda-beda di setiap wilayah. Meski juga tidak menutup kemungkinan adanya persamaan pemaknaan konsep-konsep karena berangkat dari akar budaya masyarakat etnik Bugis yang sama.

Demikian halnya apabila kita melihat dalam perspektif wilayah. Penelitian ini hanya dilakukan dan berlaku di wilayah penelitian, wilayah administratif Desa Tukak, menjadi sulit atau tidak ada

15 Lihat Wiyata, A. L., (2002). *Carok, Konflik Kekerasan dan Harga Diri Orang Madura*. LKiS, Yogyakarta. Halaman 22-23.

dasarnya untuk dapat menyimpulkan secara lebih luas secara wilayah administratif.

Penelitian ini juga memandang etnik Bugis yang menetap di wilayah administratif Desa Tukak sebagai satu kelompok saja, etnik Bugis Tukak. Peneliti tidak lagi melihat darimana orang per orang etnik Bugis itu berasal, tetapi hanya memandangnya sebagai satu koloni Bugis di luar wilayah aslinya di daratan Pulau Sulawesi.

1.3. Studi-studi terdahulu tentang Etnik Bugis

Studi dan kajian yang dilakukan dengan mengambil etnik Bugis sebagai subyek telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Beragam tema juga telah ditawarkan, diantaranya adalah sebagai berikut;

Hamzah, dkk (2007) meneliti tentang perilaku menyusui bayi pada etnik Bugis di Pekkae, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru dengan menggunakan metode kualitatif dengan paradigma etnometodologi dan interaksi simbolik. Pada penelitian yang dimuat dalam Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional ini mendapati bahwa perilaku menyusui orang Bugis tidak terlepas dari *Siri'*, dari sudut pandang antropologi politik orang Bugis dimasa lalu. *Siri'* tidak lain dari inti kebudayaan Bugis yang mendominasi serta menjadi kekuatan pendorong terhadap *Pangngadereng* selaku wujud totalitas kebudayaan Bugis. Perilaku perempuan Bugis mulai dari hamil sampai melahirkan serta menyusui berdasarkan *Significant Others* dan *Generalized Others*. Perilaku tersebut tidak terlepas dari *ininnawa madeceng* (harapan yang baik) kepada anak yang terkait nilai normatif masyarakat Bugis[16].

Mengambil tema yang sama, tentang status gizi pada balita, Huslan, dkk (2011) melakukan penelitian dengan subyek etnik Bugis Manuba. Penelitian yang mengambil judul “Pola Asuhan Gizi Pemberian ASI dan MP-ASI Anak Baduta Keluarga Etnik Bugis Manuba” ini mendapatkan hasil bahwa tidak ada pola pasti atau

---

16 Hamzah, A., Sukri, Jompa, H., (2007). Perilaku Menyusui Bayi pada etnik Bugis di Pekkae. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional,* Volume 1, Nomor 5, April 2007. Halaman 195-201.

penjadwalan yang tetap pemberian ASI oleh etnik Bugis Manuba. Bayi diberi ASI setiap saat apabila sudah menangis. Sementara makanan pelengkap sebagai pendamping ASI adalah bubur[17].

Panggalo (2013) menyoroti perilaku komunikasi antar budaya antara etnik Bugis dan etnik Toraja di Kota Makkasar. Penelitian ini menyimpulkan bahwa para pendatang dari Toraja yang tinggal di Kota Makassar menggunakan bahasa Toraja sebagai bahasa kesehariannya. Meski begitu, para pendatang etnik Toraja dapat menyesuaikan dengan bahasa yang digunakannya ketika berada ditengah-tengah masyarakat Kota Makassar. Mereka sudah bisa memahami bahasa dan logat yang digunakan oleh masyarakat Makassar. Intensitas pertemuan keduanya dibeberapa tempat umum maupun tempat kerja, membuat keduanya dapat mengerti dan paham bahasa masing-masing[18].

Rasyid (2014), meneliti tentang pola interaksi sosial antara etnik Bugis dalam hal kerukunan beragama dengan etnik lain, baik yang seagama maupun tidak. Penelitian yang mengambil tempat di wilayah Kota Sorong ini mendapati hasil bahwa pola interaksi sosial etnis Bugis dengan *the others* yang seagama dapat dilihat; Pertama pada aktivitas ritual keagamaan, interaksi sosial terjadi pada kegiatan buka puasa bersama, shalat tarwih, pemberian zakat fitrah, hari lebaran, dan pelaksanaan ibadah qurban. Kedua, pada dimensi sosial, adanya ikatan pernikahan antar etnis yang seagama. Ketiga, pada aktor personal yang dapat dilihat pada hubungan kekeluargaan, keramahan, saling membantu dan saling menghormati. Pola interaksi sosial etnis Bugis dengan *the others* yang tidak seagama dapat dilihat; Pertama, pada jalinan kerja sama lintas umat melalui aktivitas keagamaan pada hari raya, dalam bentuk silaturrahim dengan melakukan kunjungan. Kedua, mengonstruksi

---

17 Lihat Huslan, Bahar, B., Syam, A., Zakaria (2011). Pola Asuhan Gizi Pemberian ASI dan MP-ASI Anak Baduta Keluarga Etnik Bugis Manuba. Media Gizi Pangan, Vol. XI, Edisi 1, Januari – Juni 2011. Halaman 46-53.

18 Lihat Panggalo, F., (2013). Perilaku Komunikasi Antarbudaya Etnik Toraja dan Etnik Bugis Makassar di Kota Makassar. *Skripsi*. Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, Makassar.

kohesi sosial. Etnis Bugis dapat membangun sebuah hubungan dalam kehidupan masyarakat pada aspek sosial, ekonomi dan budaya. Dan Ketiga, menciptakan lingkungan kondusif dengan menguatkan ikatan emosional kekeluargaan, mengedepankan sikap moralitas dan berinteraksi dengan pola keterbukaan[19].

Penelitian yang dilakukan oleh Ismail (2012) pada etnik Bugis di Johor, Malaysia, menemukan bahwa meskipun rumah dibangun jauh dari tanah air mereka di Sulawesi, Indonesia, budaya keturunan etnik Bugis tetap utuh. Hal itu terungkap dalam perilaku mereka dan bentuk-bentuk rencana dan ketinggian rumah tradisional mereka. Hasil penelitian ini dipublikasi pada tahun 2012 di Jurnal Procedia-Social and Behavioral Sciences[20].

Ardhani (2015) melakukan penelitian tentang perbandingan kepuasan terhadap perkawinan antara etnik Bugis, Jawa dan Banjar. Penelitian yang mengambil wilayah di Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan ini mendapat kesimpulan bahwa secara umum tidak terdapat perbedaan kepuasan perkawinan pada wanita etnik Bugis, Jawa, dan Banjar di Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan. Tetapi pada aspek kesamaan peran menunjukkan bahwa terdapat perbedaan kepuasan perkawinan pada wanita etnik Bugis, Jawa, dan Banjar[21].

Bahfiarti (2011) dalam penelitiannya tentang komunikasi, mendapati hasil penelitian yang menyatakan bahwa ada upaya mistifikasi oleh *bissu* (pendeta agama Bugis kuno) terhadap audiens atau masyarakat sasarannya. Penelitian yang mengambil subyek etnik Bugis di wilayah Makassar ini dimuat dalam Jurnal Ilmu Komunikasi[22].

---

19 Periksa Rasyid, M.R., (2014). Pola Interaksi Sosial Etnis Bugis Makassar: Dinamika Kerukunan Hidup Umat Beragama di Kota Sorong. *Jurnal "Al-Qalam"*, Volume 20 Nomor 1 Juni 2014. Halaman 75-88.

20 Periksa Ismail, W. H. W. (2012). Cultural Determinants in the Design of Bugis Houses. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, *50*. Halaman 771–780.

21 Periksa Ardhani, F (2015). Perbedaan Kepuasan Perkawinan pada Wanita Etnik Bugis, Jawa, dan Banjar di Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan. *eJournal Psikologi*, Volume 3, Nomor 1, 2015. Halaman 358-368

22 Lihat Bahfiarti, T. (2011). Mistifikasi 'Bissu' Dalam Upacara Ritual Adat Etnik Bugis Makassar (Kajian Studi Dramaturgi). *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 1, No.2, Oktober 2011. Halaman 159-170.

Berdasarkan beberapa hasil penelitian yang telah dipublikasikan tersebut dapat dilihat bahwa tema kesehatan dalam kaitannya dengan etnik Bugis sangat jarang dilakukan, terutama apabila berkaitan dengan tema kesehatan lingkungan, terutama tentang akses sanitasi. Sementara penelitian yang mengambil subyek etnik Bugis juga jarang dilakukan oleh para peneliti di luar wilayah aslinya di daratan Sulawesi. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian dengan tema akses sanitasi pada etnik Bugis yang berada di wilayah lain di luar wilayah aslinya masih cukup layak untuk dilaksanakan.

1.4. Sistematika Buku

Pada sub bab ini akan disajikan struktur urutan bagian atau bab-bab dalam buku. Buku ini disusun menjadi terdiri atas lima bab yang berbeda, yang disajikan secara berurutan. Masing-masing bab masih terkait dengan isu utama, yaitu tentang gambaran sanitasi pada etnik Bugis di Desa Tukak. Secara deskriptif masing-masing bab dapat kami gambarkan sebagai berikut:

Bab I menjelaskan secara umum gambaran tentang studi ini. Gambaran umum tersebut terdiri atas latar belakang, tujuan penelitian, dan metode penelitian. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan tentang studi-studi terdahulu tentang etnik Bugis, serta terakhir tentang sistematika buku yang mencoba memberi gambaran pada pembaca secara deskriptif tentang struktur dalam buku ini.

Bab II menjelaskan tentang konteks budaya yang ada dan berlaku di wilayah penelitian. Konteks budaya hanya dipilih berdasarkan unsur-unsur budaya yang berkaitan dengan tema utama, yaitu tentang akses sanitasi lingkungan yang baik. Selain itu juga disajikan tentang perspektif masyarakat yang tinggal di daratan terhadap masyarakat etnik Bugis yang tinggal di pemukiman pinggir pantai. Konteks budaya etnik Bugis di Desa Tukak ini akan disajikan dengan menggunakan pendekatan etnografi.

Bab III menjelaskan tentang konteks kesehatan yang ada dan berlaku di wilayah Desa Tukak, Kecamatan Tukak Sadai, Kabupaten Bangka Selatan. Senada dengan konteks budaya pada bab sebelumnya, konteks kesehatan juga dipilih hanya yang berkaitan dengan tema utama, yaitu tentang akses sanitasi lingkungan yang baik.

Bab IV menjelaskan tentang permasalahan inti yang menjadi pembahasan utama dari buku ini, yaitu tentang sanitasi lingkungan, khususnya pada kepemilikan dan perilaku pemakaian jamban sehat. Bab ini berisi tentang konsep bersih-kotor yang berlaku pada etnik Bugis di Desa Tukak, serta upaya relokasi sebagai sebuah peluang.

Bab V lebih merupakan catatan peneliti atas apa yang terjadi di lokasi penelitian. Pada bab ini peneliti mencoba membuat beberapa kesimpulan tentang apa yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya. Selanjutnya berdasarkan hasil kesimpulan tersebut peneliti mengajukan rekomendasi tentang apa yang bisa dilakukan untuk menyikapi permasalahan yang terjadi, dengan memanfaatkan momen yang tengah berlangsung di wilayah penelitian. Sangat diharapkan rekomendasi yang disampaikan adalah sesuatu yang dapat dengan mudah diimplementasikan (*applicable*).

BAB II

ETNIK BUGIS DI DESA TUKAK

Bab II ini membahas secara detail tentang keberadaan etnik Bugis di Desa Tukak, Kecamatan Tukak Sadai, Kabupaten Bangka Selatan. Pembahasan secara deskriptif dengan pendekatan etnografi dilakukan dalam beberapa bagian, dimulai dari sejarah kedatangan sampai dengan soal transportasi dan aksesibilitas masyarakat.

2.1. Sejarah Kedatangan

Etnik Bugis mulai memasuki wilayah perairan Tukak pada tahun 1976. Saat itu, ada tiga orang Bugis yang datang dengan menggunakan kapal dan meminta izin ke etnik Melayu untuk menetap di Tukak. Mereka pun memilih untuk tinggal di pesisir pantai yang masih dikelilingi hutan belantara.

> "Dulu desa ini masih hutan. Saya masih kecil, tinggal di pinggir laut pakai rumah panggung. Tahun 1987, pindah ke darat trus rumahnya dipanggul. Inilah dulu tempat rumah kami itu. Tapi rumahnya sudah dirombak. Sekarang udah pakai tembok." (Baharudin, 40 tahun, Kaur Pembangunan Desa Tukak)

Satu dari antara ketiga etnik Bugis yang pertama kali datang ke Tukak adalah Pawi (67 tahun). Beliau masih dalam keadaan sehat dan masih bisa pergi ke kebun untuk merawat sawitnya. Sampai dengan saat ini Pawi masih aktif melaut, meski tidak lagi melaut sendiri, selalu bersama dengan menantunya.

> "Orang Bugis yang pertama tinggal di daerah ini gak sampe 10 orang. Aku dulu datang ke sini semuanya masih hutan. Itu

rumah aku yang dulu (menyebut lahan kosong yang berada di samping kiri rumahnya). Ini masih ada sisa batang kayunya. Waktu pindah aku langsung di pinggir laut. Langsung kerja bawa jaring ke laut sama buat kebun di hutan. Itulah aku pergi ke sini karena ada kakek aku di sini. Aku pindah dari Jambi, Sumatera." (Pawi, 67 tahun)

Pada tahun 1987, etnik Bugis yang berasal dari Bone dan Wajo, yang mengaku anak keturunan Arung Palakka, mulai memadati Desa Tukak, bersamaan dengan itu kondisi desa pun berubah. Etnik Bugis terus berdatangan dan wilayah pesisir semakin padat dan sudah tidak bisa ditempati. Akhirnya sebagian etnik Bugis pun mulai memasuki daratan dan hidup bersandingan dengan etnik Melayu.

Pada awalnya, wilayah Tukak bukanlah area pemukiman melainkan lahan kosong yang dipenuhi hutan. Memang etnik yang pertama kali tinggal di Tukak adalah etnik Melayu, tetapi hanya ada beberapa rumah tangga saja. Mereka seharusnya yang disebut sebagai warga asli sedangkan yang lain adalah warga pendatang.

2.2. Bugis di Bangka Selatan *vs* Bugis di Sulawesi Selatan

Awalnya etnik Bugis bermukim di Sulawesi Selatan, namun dalam perkembangannya etnik Bugis telah menyebar ke seluruh penjuru Nusantara salah satunya di Bangka Selatan. Setelah tinggal lama di perantauan, Bugis yang berada di Bangka Selatan sudah banyak meninggalkan budaya asalnya. Saat ini mereka telah berbaur dengan masyarakat setempat, baik dalam segi bahasa, mata pencaharian maupun adat istiadat, seperti pada etnik Bugis yang berada di Desa Tukak, Bangka Selatan. Mereka masih menggunakan bahasa Bugis sebagai bahasa sehari-hari, namun mereka sudah banyak meninggalkan dan melupakan adat istiadat yang ada di kota asalnya.

"Bahasa masih sama lah kek di sana tapi udah banyak campur sama bahasa daerah sini. Jadi kadang beda logatnya karena ikut lingkungan kan. Kayak aku ini logatnya udah ikut logat Melayu karena lahir dan besar di sini. Nah kalau adat udah banyak beda." (Nur Asiah, 28 tahun)

Etnik Bugis yang ada di Bone pada umumnya tidak bekerja sebagai nelayan, karena secara geografis wilayahnya tidak ada laut, melainkan pegunungan. Namun etnik Bugis yang ada di Tukak tidak hanya bekerja sebagai nelayan, tetapi juga bekerja sebagai petani *sahang*, karet maupun kelapa sawit.

Etnik Bugis yang ada di Bone masih memegang teguh tradisi perkawinan antar kerabat. Hal ini dilakukan untuk menjaga kemurnian darah, penguasaan harta benda dan pengakraban kekeluargaan. Pola tersebut saat ini sudah jarang ditemukan pada etnik Bugis yang tinggal di perantauan seperti di Desa Tukak. Menjadi hal biasa jika seseorang menikah dengan orang yang tidak termasuk kerabat bahkan menikah dengan etnik lain seperti Melayu. “Kalau di sini sih udah ga gitu, nikah sama orang lain juga bisa. Sama orang Melayu juga ndak apa kok,” ujar Ani (29 tahun).

Etnik Bugis yang ada di Bone yang masih kental dengan stratifikasi sosial, berbeda dengan mereka yang ada di Tukak yang sudah tidak menggunakannya. Mereka tidak menggunakan gelar apapun ketika ada di desa, namun jika pulang ke Bone barulah mereka menggunakan gelar kebangsawanan seperti *andi* dan *daeng*.

2.3. Lingkungan dan Geografis

Desa Tukak adalah salah satu desa yang ada di Kecamatan Tukak Sadai. Desa yang menurut keterangan sesepuh desa telah berdiri mulai tahun 1908 ini merupakan desa pesisir yang mempunyai luas wilayah ± 2000 Ha (15,87 % dari 12.600 Ha luas Kecamatan Tukak sadai). Tanah terebut ditempati bangunan termasuk pekarangan rumah dengan luas mencapai 73,9 Ha, sedangkan untuk luas lahan kering mencapai 1543,5 Ha. Panjang garis pantai Desa Tukak adalah 9,2 Ha dengan bentuk topografi datar, dan ketinggian daerah pemukiman laut mencapai ≤ 5 dpl[23].

---

23 Data berdasarkan data monografi Desa Tukak Tahun 2015.
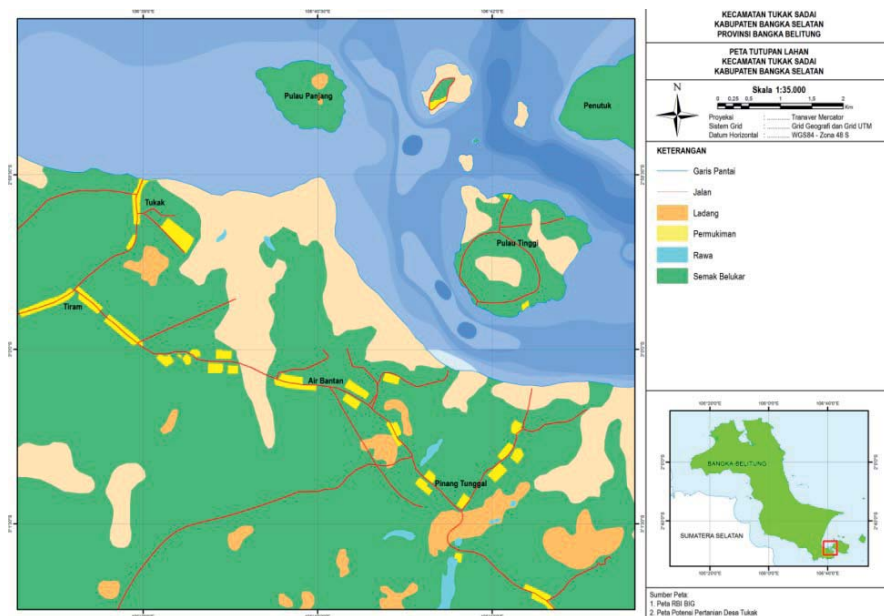
Sumber: Pemerintah Desa Tukak

Gambar 2.1. Peta Desa Tukak

Secara geografis, wilayah Tukak memiliki batas wilayah sebagai berikut:

1) Sebelah Barat berbatasan dengan wilayah Desa Kepoh
2) Sebelah Timur berbatasan dengan wilayah Desa Pasir Putih
3) Sebelah Selatan berbatasan dengan wilayah dengan Desa Tiram
4) Sebelah Utara berbatasan denga wilayah Laut Lepar.

Jarak desa ke ibukota kecamatan adalah dua kilometer. Sedang jarak desa ke Ibukota kabupaten sejauh 23 km. Iklim secara umum di Kecamatan Tukak Sadai berdasarkan data Stasiun Meteorologi Iklim Kecamatan Tukak Sadai dapat dilihat pada **Tabel 2.1**.

Tabel 2.1. Data Meteorologi Iklim Kecamatan Tukak Sadai Tahun 2015

No	Parameter Kedalaman Iklim	Nilai Kisaran (Rata-Rata)
1	Curah hujan	155,4 MM
2	Jumlah hari hujan	17 hari
3	Kecepatan angin	3,5
4	Temperatur udara	27,35°C
5	Tekanan udara	1009,6 Mb
6	Kelembaban udara	77,10%
7	Penyinaran matahari	56%

Sumber: Data Monografi Desa Tukak Kecamatan Sadai 2015

Menurut penuturan Syamsudin (45 tahun), yang saat ini menjabat sebagai Kepala Desa Tukak, nama desa diambil dari nama pohon Tukak yang dahulu tumbuh berjajar rapi. Pohon Tukak sudah jarang dijumpai. Upaya pelestarian untuk mengingatkan kepada anak cucu bahwa sejarah nama desa diambil dari nama pohon maka pemerintah desa sedang berupaya untuk menanam pohon Tukak di pinggir rumah warga.

> "Di daerah kita itu, setiap batang pohon kayu selalu ada namanya. Ada juga namanya kayu Tukak makanya desa ini diberi nama Tukak karena tumbuh di desa ini. Kayu Tukak ini tidak begitu kuat sehingga tidak cocok digunakan sebagai *junjung bedaru* (tiang) untuk penanaman *sahang*." (Iswandi, 39 tahun)

Tukak adalah desa yang paling tua. Dahulu di sini hanya ada satu desa yang bernama Tukak Sadai dan memiliki satu kepala kampung (sebelum berganti menjadi kepala desa). Tukak Sadai dipecah menjadi dua desa pada tahun 1997 yaitu Desa Tukak dan desa Sadai. Awalnya Bukit Terep dan Tiram masuk ke wilayah Desa Tukak, sedangkan pasir putih masuk ke wilayah Sadai. Pada tahun 2000-2003 dilakukanlah persiapan pemekaran karena desa akan dijadikan kecamatan. Syarat untuk mengubah desa menjadi kecamatan yaitu dalam satu kecamatan harus terdiri dari lima desa.

Desa Tukak mengalami pemekaran menjadi tiga desa yaitu Desa Tukak, Desa Bukit Terep dan Desa Tiram pada tahun 2007,

sedangkan Desa Sadai mekar menjadi dua desa, yaitu Desa Sadai dan Desa Pasir Putih. Nama kecamatan ditetapkan sesuai kesepakatan bersama antar warga. Mereka sepakat mengambil nama Tukak Sadai karena awal desa ini adalah Tukak Sadai.

> "Awalnya desa ini cuma satu, namanya Tukak Sadai. Tapi karena desa mau berubah jadi kecamatan jadi dilakukan pemekaran. Syarat desa menjadi kecamatan itu minimal harus ada lima desa. Jadi sekarang desa dibuat jadi lima. Nah jaman dulu itu dilakukan musyawarah untuk menentukan nama kecamatan. Diambil lah nama Tukak Sadai karena desa berawal dari Tukak Sadai." (Sumarjo, 47 tahun)

Sedikit berbeda dengan cerita Sumarjo, seorang tokoh masyarakat lain, Rustam (41 tahun), mengatakan,

> "...saat musyawarah dalam menetapkan nama kecamatan, masyarakat yang hadir paling banyak berasal dari Desa Tukak dan Sadai, sehingga saat *voting* ditetapkan nama kecamatannya Tukak Sadai..."

2.4. Penduduk dan Mata Pencaharian

Data terbaru menurut Pemerintah Desa Tukak, jumlah penduduk mencapai angka 1.029 jiwa pada tahun 2016. Penduduk didominasi oleh warga etnik Bugis. Sebanyak hampir 60 adalah etnis Bugis selebihnya Melayu dan Jawa.

Tabel 2.2. Distribusi Jumlah Penduduk di Desa Tukak Berdasarkan Lokasi dan RT Tahun 2016

No	Lokasi	RT	Jumlah			
			KK	Laki-laki	Perempuan	Jiwa
1	Dusun Air Rambut	RT 001	68	121	114	235
		RT 002	56	107	87	194
		RT 003	45	66	83	149
2	Dusun Air Rumbia	RT 004	62	102	105	207
		RT 005	69	121	123	244
	Jumlah		300	517	512	1029

Sumber: Pemerintah Desa Tukak

Proyek pertanian *sahang* digalakkan oleh pemerintah sejak tahun 80-an. Etnik Jawa mulai memasuki desa, namun sampai saat ini kehadiran Etnik Jawa ke Tukak masih sangat sedikit bahkan masih bisa dihitung dengan jari tangan.

Masyarakat Desa Tukak memiliki sifat yang ramah dan mudah berbaur. Mereka menyambut baik para tamu dan pendatang yang masuk ke desa. Hal ini juga disampaikan oleh Bupati Bangka Selatan yang telah berkunjung ke desa Tukak. Menurut Baharudin (40 tahun), orang Tukak dinilai ramah dan mudah diajak kerjasama sehingga banyak orang yang senang datang ke desa.

> "Bupati kan bilang orang Tukak ini ramah-ramah. Jadi banyak orang yang datang ke desa. Kan dulu Bupati keliling kampung, dia liat bentuk pagar semua sama. Kata Pak Bupati kami ini gampang diajak kerja sama. Kami ini kompak hehehe…" (Baharudin, 40 tahun, perangkat desa)

Peneliti merasakan hal yang sama. Awal kedatangan kami ke Desa Tukak disambut sangat baik oleh aparat beserta warga desa. Mereka menunjukkan keramahan, kelembutan dan kesopanan sehingga tamu seperti kami merasa betah untuk tinggal di Tukak.

Pernyataan Baharudin tersebut juga di-*amin*-i oleh beberapa informan lain yang kami temui. "Pendatang di sini diterima dengan baik oleh masyarakat lokal. Macem kalian ini, senang mereka ada yang baru. Apalagi kalau diajak ngobrol…," kata Iswandi (39 tahun). Sementara dokter Rudi (35 tahun), Kepala Puskesmas Tiram, yang mengampu wilayah Desa Tukak mengatakan, "Masyarakat di sini sangat ramah dan terbuka. Nada bicaranya terdengar keras tetapi orangnya baik-baik." Hal ini kembali ditegaskan oleh Jaya (35 tahun), Kepala Dusun Air Rumbia, "Orang sini baik-baik, ramah-ramah, senyum terus. Mudah berbaur kami ini. Jadi ndak usah takut. Kayak kalian ini gak usah susah kenalan sama kami…".

Masyarakat Tukak memiliki prinsip bahwa tamu harus dihargai dan disambut dengan ramah. Keterbukaan dan keharmonisan inilah yang membuat warga desa selalu hidup damai dan jauh dari pertikaian.

> “Selagi kamu mau bersahabat, mau berteman dengan kita, kita terbuka. Tetapi kalau kamu datang ke sini dengan hati yang jahat wah itu bahaya. Saya adalah orang yang paling depan untuk menyuruh orang keluar dari desa. Saya paling gak suka dengan orang yang sifatnya seperti itu karena saya merasa orang sini dan saya tidak mau dilecehkan dengan orang yang seperti itu. Ya saya orang yang paling depan.” (Iswandi, 39 tahun)

Pada umumnya, masyarakat Tukak bekerja sebagai nelayan, pedagang dan berkebun. Dahulu, zona pemukiman penduduk menjadi dasar mata pencaharian warga Tukak. Bagi sebagian besar etnik Bugis yang tinggal di pesisir pantai memilih bekerja sebagai nelayan, sedangkan etnik Bugis yang tinggal di daratan memilih bekerja di kebun. Etnik Melayu sebagian besar memilih bekerja di kebun dan etnik Jawa memilih bekerja sebagai pedagang dan berkebun.

Dalam perkembangannya, masyarakat Tukak pun mulai memiliki pekerjaan sampingan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Etnik Bugis sudah ada yang berkebun, sedangkan Melayu sudah ada yang bekerja sebagai nelayan. Awalnya masyarakat Melayu hanya bekerja di kebun namun saat melihat keberhasilan etnik Bugis, mereka mulai mencari peruntungan di laut. Sebaliknya, masyarakat Bugis mulai mencoba jenis mata pencaharian baru yaitu berkebun.

Tabel 2.3. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian di Desa Tukak, Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2015

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Petani	70 orang
2	Nelayan	370 orang
3	Pedagang	50 orang
4	PNS/TNI/Polri	19 orang
5	Buruh Harian	25 orang
6	Pengrajin	20 orang
7	Guru Swasta	4 orang
8	Bidan	3 orang
9	Dokter	Tidak ada
10	Perawat	3 orang
11	Sopir	3 orang
12	Wiraswasta	27 orang
13	Mantri	1 orang

Sumber: Pemerintah Desa Tukak

"Bugis ingin mengejar keberhasilan sementara pribumi mereka juga bisa berlomba, loh kok kenapa Bugis menanam banyak, kenapa saya tidak bisa. Nah jadi bersaing. Sekarang juga gini, Bugis banyak yang berkebun, Melayu juga ada yang melaut. Mungkin bisa bertukar pikiran." (Sandusin, 50 tahun, Sekretaris Desa)

2.4.1. Nelayan

Etnik Bugis yang ada di Tukak sebagian besar bekerja sebagai nelayan. Kebanyakan dari mereka tinggal di pesisir pantai tetapi ada juga beberapa orang yang tinggal di daratan. Jam beroperasi nelayan berbeda-beda, tergantung pada kondisi pasang-surut air laut.

"Ga lihat panduan arah mata angin. Terserah nelayan saja mau pergi jam berapa, bebas. Ke laut ga mesti, semaunya aja. Mau puasa atau engga', mau hujan atau engga' tetap berangkat. Cuma jadwalnya ganti-ganti tergantung mau perginya kapan." (Asse, 30 tahun)

Meski jam operasional bebas, namun nelayan Desa Tukak tidak ada yang melaut pada pagi dan siang hari, karena umpan *bubu* seringkali dimakan predator. Beberapa nelayan pergi ke laut ketika hari masih subuh sekitar pukul 04.00 dan kembali ke rumah pada pukul 11.00 siang. Tetapi ada juga yang pergi pada sore hari sekitar pukul 17.00 dan kembali ke daratan pagi hari sekitar pukul 09.00 WIB. "Gak ada aturan nelayan itu. Makanya nelayan susah gemuk hahaha (Asse, 30 tahun)."

Saat ini nelayan yang pergi ke laut seringkali adalah nelayan ganda, mencari ikan dan juga mengambil kepiting (*ketam*). Ketam menjadi favorit karena harga per kilonya yang lebih mahal. Berbeda dengan ketam yang selalu ada setiap saat, ikan ada musimnya, sehingga pasokannya terbatas.

"Kalau *ketam* gak ada musimnya, setiap hari ada. Tapi kalau ikan ada musimnya. Bulan 5 sampai bulan 9 itu musim ikan. Ikannya macem-macem. Sekarang udah ada yang turun tapi belum terlalu banyak." (Emma, 27 tahun)

Semua nelayan memiliki teknik berbeda dalam menjaring ikan dan kepiting (*ketam*). Ada yang pergi ke laut hanya untuk memasang *bubu* dan kembali keesokan harinya untuk mengangkut hasil. Tetapi ada juga yang menebar dan kemudian menginap. Seperti yang dilakukan oleh suami ibu Hasnah (42 tahun) yang bernama Pawe (56 tahun). Ia pergi berlayar pada sore hari. Ia langsung menebar 300 *bubu* (keranjang penangkap ketam) yang sudah berisi umpan ikan kepetek di tengah laut. Pawe tetap tinggal di kapal dan bermalam di sana. Subuh sekitar pukul 05.00 WIB, *bubu* yang ditebar pun mulai dinaikkan ke kapal dan ketam dipisahkan dari *bubu*. "Bubu kebanyakan yang kosong, kalau berisi semua gak perlu panjang-panjang. Kadang narik satu berisi tapi lima engga'...," jelas Asse (30 tahun). Kegiatan itu seringkali dilakukan oleh nelayan seorang diri, tidak ada yang membantu, karena nelayan Tukak bekerja secara individu tidak berkelompok.

> "Ya suami nginap di laut. Sore turun ke laut, subuh baru angkat *bubu*. Paginya pulang. Kerjanya sendirian, gak ada teman hehe.. Ada 300 *bubu* yang ditebar. Soalnya kapalnya kecil, kalau kapalnya besar bisa nebar 500 *bubu*. Tergantung kapalnya juga." (Hasnah, 42 tahun)
>
> "Dulu, kalau ada air di motor (perahu) itu aku tidur saja tidak pandang hujan. Pokoknya tidur aja. Kalau hujan biarlah basah-basah badan ku. Kalau narik jaring biarlah basah kalau hujan." (Pawi, 67 tahun)
>
> "Biasanya taro perangkap ketam itu 300 biji dibentangkan di tali panjang. Antar satu perangkap tujuh meter. Nebar sendiri, tarik sendiri, kendalikan kapal sendiri. Tanam sendiri, ngangkat sendiri. Lihat ini kuku hitam-hitam. Tangan juga keras gara-gara tali. Coba lihat tangan orang-orang yang main *bubu* kasar semua bayangkan lah jarak satu *bubu* itu tujuh meter. Kalau 300 *bubu* bayangkan berapa meter itu. Tarik lah itu sampai selesai, sendiri!" (Asse, 30 tahun)

Sumber: Dokumentasi Peneliti

Gambar 2.2. Bubu (Perangkap) Ketam/Kepiting (kiri); dan Jaring (kanan)

Teknik menangkap ketam tidak hanya menggunakan *bubu* saja tetapi juga dapat ditangkap dengan menggunakan jaring. Seperti yang dilakukan oleh suami Emma yang bernama Muhammad Yusuf (36 tahun), beliau tidak pernah menangkap ketam dengan menggunakan *bubu*. Ia lebih menyukai menangkap ketam dengan menggunakan jaring sekaligus menjaring ikan. "Tuh yang dimasak itu ikan hiu. Tau ikan hiu? Ada ikan hiu di sini. Ikan hius sering kena jaring. Enak pakai jaring tuh bisa dapat ikan juga tapi ya sedikit, lumayan lah..," kata Yusuf Muhammad (36 tahun).

> "Suami saya gak pake *bubu*, dia lebih suka pake jaring. Kan kalau jaring bisa dapat ikan. Nah kayak gini, dapat ikan kecil, dapat ikan pari. Trus tadi juga dapat hiu kecil. Itu di kompor lagi di masak." (Emma, 27 tahun)

Pada awal tahun hingga pertengahan tahun, hampir tidak ada nelayan yang pergi ke laut untuk mengambil ikan. Nelayan berbondong-bondong pergi melaut untuk mencari ketam karena ketam selalu ada sepanjang tahun.

Semua nelayan ikan beralih profesi menjadi nelayan ketam karena harga ikan dibawah biaya operasional. Meskipun Bulan Juni sudah memasuki musim ikan selangat, masih jarang ditemukan nelayan yang turun mencari ikan. Hal ini karena nelayan masih belum

menemukan waktu yang tepat untuk mendapatkan hasil ikan yang banyak.

> "Sekarang nelayan ikan kurang. Ikan ga ada harganya. Ikan selangat cuma Rp. 10.000,-/kg. Itulah sekarang jarang yang naik bawa ikan pulang. Bulan ini, ikan selangat udah musim tapi belum banyak yang turun. Masih dapat dikit lah..." (Hasnah, 42 tahun)

Ketika ikan selangat sudah banyak, di samping mengambil ketam, nelayan turun untuk mencari ikan selangat. Nelayan tetap akan mencari ikan meskipun harga ikan murah. Kegiatan ini dilakukan agar nelayan dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari. "Sehari dua kali pergi ke laut. Itulah pekerjaan nelayan pas lagi musim ikan, pada ambil ikan selangat. Jadinya harga juga turun, bisa Rp. 5.000,-/kg…," tukas Hasnah (42 tahun).

Memasuki bulan gelap, kakap pun banyak muncul ke permukaan, namun hanya nelayan tertentu saja yang melaut untuk mencarinya. Jaring yang dipakai untuk menangkap ikan kakap adalah jaring yang besar dan harus diangkut oleh kapal yang besar pula.

> "Kakap munculnya musim gelap. Kalau terang bulan gak turun. Gak sembarang lah ambil kakap. Orang tertentu aja itu. Jaringnya harus besar, kapalnya juga besar. Kapal kami kan kecil-kecil lah…" (Hasnah, 42 tahun)
>
> "Orang di sini ga ada yang tangkap ikan kakap. Orang-orang di sana itu, kalau di sini tangkap ikan selangat itu yang kecil-kecil yang banyak duri. Kalau belana dapat itu dipinggir-pinggir belakang rumah juga banyak." (Emma, 27 tahun)

Nelayan tidak kesulitan mencari lauk. Mereka memasang jaring dan *bubu* di belakang rumah dan ditunggu beberapa saat sudah diperoleh hasil. Biasanya mereka bisa mendapat ikan duri besar dan ketam jenis *keremango* (kepiting bakau). Jenis ikan dan kepiting ini tidak bisa dijumpai di tengah laut, dan hanya bisa didapat di perairan yang dangkal.

> "Coba kalau laut lagi pasang, di bawah-bawah itu dapat ikan duri yang besar-besar itu. Kalau malam-malam mancing di belakang, dapat. Iya di sini, kalau kita rajin mancing gak susah beli

ikan. Di belakang rumah bisa dapat ikan besar. Dani ama temen-temennya sering mancing di belakang pakai pancing…" (Emma, 27 Tahun)

"Kalau ikan besar tinggal pasang umpan aja di belakang rumah dapat kayak kemarin yang duri-duri. Kalau di laut engga, paling dapatnya yang kecil-kecil padahal udah jauh kan di tengah. Kalau pasang jaring di sini enak dapat ikan besar-besar tapi kepitingnya kurang, besar-besar emang. Maunya punya jaring banyak biar bisa pasang di sana sama di sini." (Yusuf Muhammad, 36 tahun)

"Di bawah-bawah rumah ini kalau ada lobang-lobang sering dapat ketam yang keremango itu, ketam yang besar-besar itu kalau di bawah rumah. Orang masang *bubu* dibelakang rumah aja dapat ketamnya tapi yang kecil-kecil…" (Ani, 29 tahun)

Sesaat sebelum melaut, nelayan menaruh telur ayam kampung di pinggir laut. Telur ayam kampung merupakan bentuk sesajen yang diberikan nelayan kepada buaya yang dipercaya menjadi kembaran manusia. Nelayan berharap diberi kelancaran dan tidak diganggu ketika sedang bekerja. Mereka percaya setelah menaruh telur ayam kampung di laut maka mereka tidak akan diganggu dan akan pulang dengan keadaan selamat.

"Ya kalau mau pergi taro telur ayam kampung. Telur biasa gak boleh (Suti, 49 tahun). Buang telur mentah ke laut, dibuang pelan-pelan pas mau keluar. Ditaruhnya didekat rumah. Ya biar penunggu-penunggu laut gak ngapa-ngapain kita…". (Hasnah, 42 tahun)

Orang Bugis percaya bahwa jaman dahulu banyak ibu yang melahirkan anak kembar yaitu manusia dan buaya. Binatang tersebut sangat disegani oleh etnik Bugis hingga saat ini. "Memang kalau di Sulawesi itu ada tempatnya. Nanti buayanya ada ditaro di tempatnya karena banyak yang melahirkan kayak gitu tapi dulu-dulu, sekarang udah gak lagi (Suti, 49 tahun)."

"Kalau kita kan orang Bugis ada kembar sama keturunan buaya. Kadang-kadang orang sering melahirkan kembar anaknya

> sama buaya. Satu manusia satunya lagi buaya. Dulu-dulu tapi itu. Kalau kita mau ke laut harus kita kasih dulu itu telur ya untuk buaya itu…" (Ani, 29 tahun)

Mereka percaya bahwa buaya tersebut akan berbuat hal yang buruk jika tidak diberi sesajen dan sebaliknya buaya akan menolong nelayan ketika sedang kesusahan. "Ya biar gak ganggu, kalau ada apa-apa ya ditolong gitu," kilah Suti (49 tahun).

Pemberian sesajen tidak dilakukan setiap hari melainkan diberikan sewaktu-waktu. Bisa sebulan sekali bahkan setahun sekali. Hal yang terpenting adalah nelayan tidak boleh lupa memberikan sesajen. Jika nelayan terbiasa memberikan telur setahun sekali maka ia harus tetap memberikannya. Jika nelayan tidak memberikan di tahun berikutnya maka nelayan akan memperoleh malapetaka dan akan didatangi melalui mimpi.

> "Itu gak setiap hari dikasih, kalau macam itu waduh mati kita beli telur ayam kampung itu, susah lagi dicari. Itu pas lagi ada aja, tergantung dari niat kita kan misalnya kan satu tahun, dua tahun boleh tergantung dari kita lah yang penting jangan lupa lah. Kalau kebiasaan dikasih trus ndak diingat lagi jadi sering juga kena sial. Sering juga kalau ndak ada dilihat dari mimpi itu pasti ada bayanganlah, bayangan peringatannya…" (Suti, 49 tahun)

Ada sedikit perbedaan bentuk perahu nelayan milik etnik Bugis dan Melayu. Secara kasat mata memang serupa tetapi bila dilihat lebih teliti maka terlihat perbedaannya. Kayu pada bagian dasar perahu milik etnik Bugis tidak utuh melainkan disambung, sedang perahu milik etnik Melayu tanpa sambungan.

Untuk pembuatan perahu baru, membutuhkan biaya sebesar 50 juta. Pengeluaran tersebut belum termasuk mesin. Harga satu perahu utuh dengan mesin dihargai sebesar 80-90 juta. Nelayan yang tidak memiliki dana besar, mereka hanya bisa membeli perahu bekas seharga 20 juta. "Ini kalau ada yang mau beli punya ku dikasih lah 20 juta…," ujar Santi (28 tahun). Sementara Asse (30 tahun) memperoleh perahu dengan harga yang jauh lebih murah, namun dengan kondisi

yang mengenaskan. “Dulu waktu saya beli perahu ini harganya tiga juta. Tapi harus banyak yang ditambal. Gak kuat kalau beli baru mahal banget…”.

Biaya operasional nelayan memang tinggi, sekali melaut, mereka harus menyisihkan uang sebesar Rp. 100.000,- untuk membeli bahan bakar. Jika ada bagian perahu yang harus diganti maka dana yang dikeluarkan besar. Seperti yang dialami oleh Santi, 28 tahun. Suaminya merupakan nelayan ketam dan tiga hari tidak berlayar karena dasar perahu yang dimiliki harus diperbaiki. Mereka harus membeli empat kayu besar agar dasar perahu tidak lagi dimasuki air. Untuk empat kayu besar, mereka harus mengeluarkan uang sebesar lima juta. Ditambah biaya untuk membeli cat dan membayar tukang. “Perbaiki perahu itu mahal. Gak dapat satu juta. Ini aja cuma beli empat papan habis lima juta belum lagi beli cat sama bayar upah tukang. Suami udah gak turun tiga hari perbaiki ini…,” ujar Santi (28 tahun).

Meski seringkali nelayan Desa Tukak memperbaiki perahunya sendiri saat rusak, tetapi ada dua orang nelayan yang juga ahli pembuat perahu yang sering dimintai tolong, yaitu Sunarto (34 tahun) dan Muhammad Yusuf (36 tahun). Harga untuk pembuatan satu perahu baru rata-rata mereka menarik biaya sekitar 90 juta. Sedang untuk renovasi perahu, tarif pengerjan yang berlaku adalah Rp. 350.000,- per satu papan. Tarif ini di luar bahan baku, yang menjadi tanggungan pemilik perahu.

Jika sedang musim ketam dan ikan, mereka bisa menutupi biaya operasional. Namun ketika sedang tidak musim ketam dan ikan, maka mereka sulit untuk menutupi biaya operasional yang tinggi. Apalagi sebagian besar nelayan tidak memiliki pekerjaan sampingan. Setelah pulang dari laut, nelayan hanya diam di rumah untuk beristirahat. “Pulang dari laut ya tidur yang ada kebun ya berkebun. Tapi rata-rata gak punya kebun. Saya juga gak punya, cuma ini aja…,” kilah Hasnah (42 tahun).

Namun jika sudah memasuki musim ikan maka nelayan pun sibuk. Mereka bisa pergi melaut sebanyak dua kali sehari. Untung

yang didapat pun bisa besar. Jika mereka menebar di titik tempat banyak ikan berkumpul (*boso* dalam istilah lokal) maka jaring bisa penuh. Dalam sekali tarikan bisa mencapai 10 kwintal bahkan pernah ada nelayan yang mendapat ikan sebanyak satu ton.

> "Kalau lagi musimnya trus dapat sekumpulan ikan ya enak. Jaring penuh semua. Jaring-jaring kelihatannya sirip ikan semua. Nih Bapak ku pernah dapat satu ton, hampir tenggelam perahunya karna keberatan. Berapa kali balikan itu, ada tujuh kali. Di belakang rumah ini dibuka jaringnya..." (Ardi, 15 tahun)

Kesenangan ini tidak terjadi setiap hari, ada masanya mereka merasakan keberuntungan dan memiliki banyak uang. Tetapi ada juga masa paceklik dan tidak memiliki uang sama sekali. Sebagian besar nelayan tidak melaut pada saat penyelenggaraan acara di desa. Mereka memilih untuk berdiam di rumah dengan resiko tidak memiliki uang. Hal tersebut merupakan tradisi bagi masyarakat pesisir pantai. Mereka tetap memilih untuk tidak pergi berlayar meskipun acara tersebut bukanlah acara yang mereka buat. "Di sini ya begini tradisinya. Kalau ada acara ya gak melaut...," kata Emma (27 tahun).

> "Ini ndak melaut. Kami gak turun, kan lagi ada acara. Kalau lagi ada acara ya gini, libur. Ini kan acara desa, acara keluarga kami juga. Ya kalau lagi gak melaut kaya gini ya makannya pakai telur aja hahaha... mana ada uang!" (Asse, 30 tahun)

2.4.2. Perempuan Pengupas Ketam

Semua ibu yang tinggal di pesisir pantai bekerja sebagai pengupas kulit ketam. Mereka memilih bekerja sebagai pengupas ketam karena tidak ada pekerjaan lain yang bisa mereka lakukan. "Gak ada gawe lain, suami juga rata-rata pelaut," kata Bunga (43 tahun). Senada dengan Bunga, Hasnah (42 tahun) menyatakan, "Gak tau *ngape*-lah. Gak ada kerjaan lain..."

Sumber: Dokumentasi Peneliti

Gambar 2.3. Perempuan Pengupas Ketam

Kelincahan para ibu baru terlihat ketika para suami berhasil membawa pulang ketam ke rumah. Mereka dengan gesit langsung menyiapkan dandang untuk merebus ketam hingga masak. Ketam disusun tengkurap dalam dandang yang besar agar ketam cepat masak. "Kalau direbus, ketam harus dibalik biar cepat masak, kan atasnya yang keras. Apinya kan dari bawah...," jelas Emma (27 tahun).

Perebusan ketam dilakukan selama 30 menit. Jika ketam tidak matang sempurna maka daging yang dikupas akan hancur. Proses ini harus segera dilakukan agar ketam tidak sempat busuk dan dapat diproses. Ketam matang, tidak langsung dikuliti namun dibiarkan dingin terlebih dahulu. Setelah 30 menit, ketam sudah bisa diproses. Pertama, cangkang atas dilepas dan dikeluaran semua isi kotorannya termasuk telur. Setelah itu capit depan dilepaskan. Setelah semua selesai, ketam dicuci kembali untuk membersihkan kotoran yang masih menempel.

> "Pertamanya harus dibersihin dulu kotorannya biar gampang ambil daging. Ya kalau saya dibuang telurnya. Sebetulnya ini yang enak tapi malas pisahin. Orang-orang sih ada yang dipisahin, laku juga sih..." (Emma, 27 tahun)

Selanjutnya seluruh bagian ketam dikuliti dan tidak boleh ada yang tersisa karena harga jual tergantung dengan berat daging yang sudah dikupas. Harga ketam kupas mencapai Rp. 200.000,-/kg, tetapi turun drastis menjadi Rp. 80.000,- karena maraknya pencarian ketam yang dilakukan oleh nelayan.

> "Indonesia itu gini, nelayannya dikasih murah, waktu dijual ke luar negeri harganya mahal. Nanti yang kepiting dibuka cangkangnya, dibuat kare kepiting tuh. Harganya jadi mahal, sekaleng ratusan. Kita aja ndak pernah makan…". (Pawi, 67 tahun)

Dalam sehari, para ibu bisa menghasilkan daging ketam tanpa kulit sebanyak sembilan ons sampai dengan lima kilogram, tergantung hasil tangkapan sang suami. Daging ketam tersebut dimasukan ke kulkas sambil menunggu pengepul mengambil dan menukarnya dengan uang. Bagi yang tidak memiliki kulkas, tersedia fiber berisi es batu yang disediakan jurangan. "Selesai kupas ya langsung ditaro di kulkas atau di boks isi es, namanya fiber. Nanti sore bos datang buat ambil. Dia ambil trus dijual ke Pangkal Pinang. Ada orang yang jemputnya, " jelas Hasnah (42 tahun).

Sumber: Dokumentasi Peneliti

Gambar 2.4. Proses Pengemasan Ketam (kiri); Mobil Pengepul Ketam (kanan)

Sore hari, pengepul datang untuk mengambil ketam dan memberikan label pada ketam yang sudah dibungkus. Ada banyak pengepul (bos) yang ada di desa yaitu Mustang (Ketua RT 05),

Herman (Ketua BPD), Sukri, Aco dan Fitrah (Anak Pak Kades). Sistem pembayaran tergantung kesepakatan dengan para ibu. Ada yang langsung ditimbang dan diberikan uang. Ada pula ibu yang minta dibayar setelah uangnya terkumpul cukup banyak. Sehingga ibu hanya menerima nota sebagai pertanda dia sudah mengupas ketam.

Para ibu yang tidak mau berlama-lama menunggu pengepul datang, bisa langsung pergi ke rumah pengepul untuk mengantar daging kepiting hasil kupasannya. Tidak perlu menunggu sampai sore hari mereka bisa langsung mendapat uang begitu kepiting yang sudah dikemas tersebut diserahkan.

> "Kalau udah beres ya langsung aja diantar ke rumah bos. Kan dekat daripada disimpan di fiber. Itu loh Sukri bosnya. Rumahnya di samping Pak Mustang, Ketua RT 05. Bisa langsung dapat uang, gak perlu tunggu sampe sore...". (Emma, 27 tahun)

Pengepul mengemas ketam yang sudah disetor oleh para ibu ke dalam fiber yang sudah dipenuhi es. Pada malam hari biasanya pukul 19.00 WIB pengepul dari Pangkal Pinang rutin datang menjemput dan mengantar ketam. Bos besar ketam Pangkal Pinang bernama Rahman. Ia bertugas untuk memasukan ketam tanpa kulit ke Pabrik Philips, selanjutnya ketam kupas akan dikirim ke Pulau Jawa dan ke luar negeri.

Ketam yang masih lengkap dengan cangkang dijual ke perusahaan lokal. Sedangkan ketam yang sudah dikuliti diolah kembali menjadi kari ketam siap makan dalam kemasan kaleng. Biasanya produk tersebut dijual ke luar negeri seperti Eropa. "...yang ini dijual ke Jawa, yang ini dijual lokal saja. Nanti diolah dijadikan kari ketam. Harganya langsung mahal bisa ratusan ribu per kaleng...," kata Welly (32 tahun).

Tempat pengupasan ketam sudah disediakan oleh bos (pengepul) agar ibu-ibu mempunyai tempat saat bekerja. Tempat tersebut jarang digunakan para ibu ketika bos sedang tidak memberikan order. Mereka lebih suka mengupas ketam hasil tangkapan suami di depan rumah. Cangkangnya langsung mereka buang ke laut agar cepat dan mudah.

Menurut pengakuan informan yang bernama Emma, 27 tahun, kegiatan ini sudah berlangsung sejak lama. Emma mengikuti pekerjaan ibunya mengupas cangkang ketam agar memiliki uang untuk memberikan jajan kepada sang anak.

Pengupasan cangkang ketam dilakukan agar mereka mendapatkan penghasilan yang lebih besar. Jika kulit ketam tidak dikupas maka mereka hanya mendapatkan penghasilan sebesar Rp. 20.000/kg. Harga tersebut baru naik, dari semula Rp. 13.000,-/kg harga ketam lengkap dengan cangkang.

Sumber: Dokumentasi Peneliti

Gambar 2.5. Tempat Khusus untuk Mengupas Ketam (kiri); Mengupas Ketam di Depan Pintu Rumah (kanan)

Selain mengupas ketam miliknya sendiri, mereka juga mengupas ketam yang ditangkap oleh pengepul (istilah mereka bekerja di PT). Dalam sehari, mereka mendapat upah sebesar Rp 15.000,-/kg. Biasanya mereka bekerja secara berkelompok yang terdiri dari 7-10 orang. Dalam sehari, mereka bisa menghasilkan daging ketam sebanyak 200kg. Sehingga uang yang didapat pun mencapai Rp. 300.000,- sampai Rp. 428.000,-/orang. "Jadi kerjanya barengan, siapa aja boleh ikut. Itu kan banyak jadi kerjanya bareng. Nah hasilnya nanti dibagi rata sesuai sama timbangan, gitu...," jelas Emma (27 tahun).

Pekerjaan mengupas ketam tidak selalu rutin dilakukan setiap hari. Kadang dalam satu bulan tidak ada pasokan ketam yang

dihasilkan oleh pengepul sehingga mereka tidak bisa bekerja di PT. Pada kondisi seperti ini, ibu hanya menggantungkan hidup pada hasil penjualan ketam yang ditangkap oleh suami.

> "Udah satu bulan ga kerja di PT, ga ada ketam. Biasanya kerjanya di sana sama-sama yang lain. Sekarang nunggu hasil suami. Kalau kayak hari ini suami gak turun kan baru buat pondasi rumah ya jadi gak ada duit hahaha. Ga ada ketam ya ga kerja sama sekali…". (Emma, 27 tahun)

Banyak pengepul yang memproduksi daging ketam tanpa cangkang, namun Emma dan kelompoknya tetap tidak mau bekerja di sana. Mereka memilih menunggu kiriman ketam dari sang juragan.

> "Ya diam aja di rumah. Kalau bos datang baru kerja. Gak kerja di tempat lain. Itu kan tempat orang lain. Kalau kita nanti dapat THR kan lain-lain. Masa kerja di tempat lain. Kaya nelayan ketam, jaring ikan dapat semua. Karyawan juga dapat. Tapi kan bukan duit kayak minuman, kue. Kalau ketam dari pak Sukri, kalau PT dari pak Herman. Berarti dapat semua…". (Emma, 27 tahun)

Sejajaran dengan rumah informan (Emma) terdapat tempat pengumpulan ketam milik Pak Aco. Tempat tersebut sering disebut PT oleh warga sekitar. Tidak hanya wanita, laki-laki pun turut bekerja di sana.

Tugas laki-laki adalah memasukan ketam yang sudah diikat ke dalam drum lalu diangkat ke mobil. Sedangkan tugas wanita adalah mengikat ketam dengan menggunakan karet. Ketam yang berukuran kecil hanya diberi satu karet sedangkan ketam yang berukuran besar diberi dua karet.

Sebagian ketam tidak dapat diikat kakinya karena putus atau rusak, maka ketam langsung dimasukan ke dalam dandang besar untuk direbus. Setelah itu, ketam siap dipisahkan dari cangkangnya.

> "Kalau yang ngikat ketam itu siapa aja bisa. Tapi kalau orang ngupas ya tertentu karena banyak orang yang gak tahu. Ketam yang gak bisa diikat baru direbus trus dikupas. Kalau bisa diikat berarti di jual ke Pangkal. Itu mahal barangnya soalnya dikirim ke

kota. Dari bos bayar ke nelayan ya murah cuma 25.000/kg. Tapi gak tau tuh bosnya jual berapa ke kota…". (Emma, 27 tahun)

Sumber: Dokumentasi Peneliti

Gambar 2.6. 'PT' Penampung Ketam

Selain mengupas ketam milik bos, para ibu terbiasa untuk membantu mengupas ketam milik sesamanya. Tidak seperti bekerja di PT yang mendapat bayaran sebesar Rp. 15.000/kg, penghasilan membantu sesama lebih kecil dibanding bekerja di PT. Satu kilogram daging ketam yang dihasilkan, ibu mendapat uang sebesar Rp. 13.000,-. "Ndak sama, ini lebih kecil. Kalau PT kan Rp. 15.000,- kalau ini ya Rp. 13.000,-. Lumayan lah untuk jajan anak," kilah Bunga (43 tahun).

Saat musim paceklik seperti saat ini banyak ibu yang pinjam uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mereka memilih untuk meminjam uang kepada bos (pengepul) dan kepada rentenir ber-kedok Koperasi yang berasal dari Toboali.

Seperti kasus yang baru saja ditemui di lapangan, tetangga Emma yang bernama Ani, 28 tahun meminta tolong kepada Emma untuk memintakan pinjaman uang kepada rentenir. Ia terlihat sangat malu untuk meminta langsung sehingga ia pun hanya bersembunyi di rumah. Ia malu terlihat tetangga dan saudara ketika sedang

meminjam uang. Akhirnya rentenir memberikan uang dengan syarat ibu tersebut tidak boleh lagi meminjam uang ke rentenir lainnya.

Sumber: Dokumentasi Peneliti

Gambar 2.7. Abang 'Koperasi' menagih Cicilan

Pinjaman Ani sebesar Rp. 300.000,-, hanya diterimakan sebesar Rp. 270.000,-. Selisih Rp. 30.000,- digunakan sebagai biaya administrasi. Ani wajib menyerahkan uang cicilan setiap hari sebesar Rp. 15.000,- selama 30 hari.

Jika dihitung-hitung, Ani harus membayar 180.000 lebih banyak dari pinjaman awal. Ia mengetahui jelas tetapi tidak mempunyai banyak pilihan selain meminjam uang agar bisa memberikan uang jajan kepada anak dan dapur terus berasap. "Ya pinjam pas suami gak hasil kayak gini. Banyak juga ayu-ayu (panggilan untuk perempuan dalam bahasa Melayu) yang pinjam uang dan titip ke saya karena saya tinggal di rumah terus," kata Emma (27 tahun).

Berbeda dengan Hasnah (42 tahun), ia menghindari rentenir dan memilih untuk meminjam kepada pengepul. Anak buah yang pinjam ke pengepul tidak diharuskan membayar bunga pinjaman. Mereka boleh meminjam berapa saja nominalnya dan boleh mencicil dengan menggunakan ketam yang sudah dikupas. "Boleh pinjam

uang, kalau belum dapat gajian boleh kasbon dulu, bayarnya pakai duit gaji. Kalau bayar pakai ketam juga boleh," jelas Emma (27 tahun).

Selain meminjam ke rentenir dan pengepul, banyak ibu-ibu yang mengambil kredit baju orang dewasa dan baju anak. Harga baju berkisar Rp. 70.000,- hingga Rp. 250.000,-. Sistem pembayarannya dilakukan seminggu sekali. Dalam sekali pembayaran, mereka wajib membayar sebesar Rp. 20.000,-.

> "Aku pinjam uang ke Pak Herman pas gak ada uang. Sering gitu misal perlu *bubu* gak ada duit ya minta sama Pak Herman. Pernah ambil sampai 11 juta untuk beli motor ya dikasih. Bayar cicil pakai ketam. Udah dua tahun belum lunas. Ya namanya bos bantu anak buah." (Hasna, 42 tahun)

Bukan hanya baju, ibu-ibu juga sering mengambil perabotan rumah seperti gelas dan piring secara kredit. Menurut pengakuan Emma (27 tahun), banyak ibu yang mengambil kredit karena sistem pembayarannya mudah dan dapat dicicil.

> "Di sini enak gak susah-susah punya barang. Ga usah bayar *cash*, kredit pun bisa. Di sini gelas plastik lusinan juga bisa di kredit. Paling harganya Rp. 35.000,- trus bisa dicicil sampai lunas...". (Emma, 27 tahun)

Sebagai strategi bertahan hidup, sebagian kecil ibu mempunyai cara lain untuk mendapatkan uang yaitu dengan mengikuti arisan. Seperti yang dilakukan oleh kelompok ibu yang bekerja di PT Pak Herman, mereka adalah Dahlia, Bunga, Hasnah dan Emma, mereka mengikuti arisan yang beranggotakan 11 orang. Mereka harus membayar Rp. 50.000,- hingga Rp. 100.000,- setiap minggu kepada orang yang mendapat giliran menarik arisan. Tidak ada sistem ketua, orang yang menariklah yang bertugas untuk menagih uang.

> "Kadang kan kita penghasilannya banyak dari PT ya ikut arisan aja. Lumayan uangnya untuk jajan anak. Nah kalau lagi kayak sekarang ga ada arisan kan PT lagi gak buka. Mana ada uangnya sekarang...". (Emma, 27 tahun)

2.4.3. Bertani dan Berkebun

Petani jagung masih jarang ditemukan di desa Tukak. Hanya orang dari Jawa saja yang mau menanam jagung. Kebanyakan masyarakat menganggap jagung bukanlah tumbuhan. Mereka menanam karet, sawit dan *sahang* (lada atau merica) karena dapat dijual dengan nilai yang tinggi.

Hanya orang tertentu saja yang menanam karet dan sawit sebab dibutuhkan lahan yang luas dan modal yang cukup besar. Kalangan menengah ke atas lebih memilih menanam karet dan sawit meski tergolong mahal,, karena mudah dirawat (hanya diberi pupuk), dan dapat digunakan sebagai investasi jangka panjang. Pohon kelapa sawit baru berbuah dan dapat dipanen setelah berumur empat tahun. Setelah itu, sawit dapat dipanen dua minggu sekali sedangkan karet dipanen setiap hari.

2.4.3.1. Sawit

Pohon sawit baru bisa menghasilkan buah pada tahun keempat. Itupun buah pertama yang dihasilkan masih kecil. Warga sini menyebutnya dengan buah pasir. Harga yang ditawarkan pun masih sangat murah, dalam satu kilogram buah dihargai sebesar Rp. 1.000,-.

Harga buah pertama ini dihargai murah. Namun petani tidak memiliki pilihan lain. Jika mereka tidak menjualnya maka mereka tidak akan mendapatkan uang karena buah pertama tidak bisa dijadikan sebagai bibit mengingat kualitas buah yang rendah. “Berbuah tapi belum ada hasilnya. Buah pasir namanya itu, buah pertama ibaratnya. Kadang-kadang dijual tapi murah,” kata Pawi (67 tahun).

Jika pohon sudah bisa menghasilkan buah setelah buah pertama maka petani bisa menjualnya dengan harga Rp. 1.300,-per kilogramnya. Menurut Informan yang bernama Pawi (67 tahun), harga sawit baru mengalami kenaikan. Dari semula berkisar Rp. 1.100,- namun pernah merosot tajam diangka Rp. 700,-. Harga sawit dalam tiga bulan terakhir (bulan April sampai dengan Mei 2016) sudah berada di atas, membuat petani sawit senang karena dapat meraup untung yang besar.

Kesenangan tersebut tidak dirasakan oleh Pawi (67 tahun). Meski pohon sawit dapat dipanen sebanyak dua kali dalam sebulan, ia masih belum bisa merasakan hasil panen dengan maksimal karena buah yang dihasilkan masih kecil sehingga ia memilah dan mengambil buah yang cukup besar.

> "Sekali panen, *opa* (kakek) dapatnya sedikit. Belum semua panen dapat buah, masih kecil-kecil. Jadi separuh, dapat umpama 200 batang paling 20 batang dapat buahnya. Belum rata buahnya. Kalau semua ambil buah mungkin banyak dapat." (Pawi, 67 tahun)

Petani termasuk Pak Pawi, memiliki strategi dalam memilih buah yang akan dipetik. Ia memanen buah yang besar dan tetap membiarkan buah kecil menempel di pohon. Dengan begitu ia bisa terus memanen sawit meskipun dengan penghasilan yang pas-pasan.

> "Sawit itu enak panennya sebulan dua kali. Kalau yang kecil-kecil biar di situ ambil yang besar-besar biar tumbuh dulu. Barulah sekarang buahnya kecil-kecil. Barulah sampai begini besar-besarnya (menunjukkan mangkok seukuran buah melon) nanti besar baru diambil…". (Pawi, 67 tahun)

Saat musim kemarau, buah yang dihasilkan menurun tajam karena banyak pohon yang tidak menghasilkan buah atau hanya menghasilkan buah yang kecil saja. Luasnya lahan menjadi alasan para petani untuk tidak menyiram sawit ketika musim kemarau. Menurunnya produksi buah juga berimbas pada menurunnya pendapatan petani. Hal ini memang sudah dimaklumi karena tidak ada yang bisa dilakukan untuk mencegah kejadian tersebut. "Mana bisa disiram hahaha… itu kan luas," kilah Pawi (67 tahun).

Petani tidak menggunakan tangan kosong ketika sedang memanen sawit. Mereka menggunakan alat khusus seperti skop untuk menusuk dan menjatuhkan buah. Hasilnya ditaruh di pinggir jalan dan diambil oleh pengepul. Rata-rata dalam sekali panen pohon sawit bisa menghasilkan tiga buah sawit (tandan dalam istilah lokal) yang beratnya bekisar 5-50kg.

> “Memang ada alatnya ini seperti pisau. Belum pernah aku megang itu. Jatuh ada alatnya itu ditancap jatuh hah kan, banyak duri. Ndak ada umpama diangkat sama tangan, ndak ada…”. (Pawi, 67 tahun)

Pengepul langsung menimbang buah sawit dan mencatat hasil timbangannya. Petani dan pengepul pulang ke rumah untuk beristirahat. Pada sore hari pengepul akan datang ke tempat kediaman petani untuk memberikan uang hasil penjualan buah sawit. Berapa pun hasil penjualan sawit, uang akan tetap diantarkan ke rumah petani.

> “Kalau panen, opa bilang ke pengepul. Kalau ada HP dibilangin, ini hari panen pergilah nanti sore, pergilah ambil. Opa bawa semuanya ke pinggir jalan, ditimbang. Uangnya diantar ke rumah…”. (Pawi, 67 tahun)

Satu hektar ladang hanya bisa ditanami 125 pohon sawit karena jarak antar pohon cukup jauh. Perawatan sawit dinilai cukup mudah. Petani hanya perlu menebas rumput yang ada di sekitar pohon dan memberikan racun agar tidak ada hama yang mengganggu.

> “Satu hektar itu cuma bisa ditanam 125 pohon. Jadi bisa dapat berapa uang itu, ya sedikit. Jaraknya itu delapan naik, sembilan muka. Harus luas jaraknya kan nanti tumbuh besar. Sawit itu mudah, tidak perlu dijaga. Pokoknya kalau sudah diambil pulanglah. Nunggu di situ ndak ada apa-apa…”. (Pawi, 67 tahun)

Rumput sebenarnya tidaklah mengganggu pohon sawit tetapi tidak enak dilihat sehingga petani sering mencabutnya. Perawatan terpenting yang harus dilakukan petani adalah rajin menyemprot sekitaran pohon dengan racun hama. “Ndak apa-apa kalau banyak semak itu yang penting disemprot. Yang penting ndak terlalu besar kayunya itu. Biarlah banyak-banyak ada kayunya itu ndak apa-apa,” jelas Pawi (67 tahun).

Setiap tiga bulan sekali, petani juga harus rutin menaburi sekitar pohon dengan pupuk MPK, urea dan poska. Takaran pupuk

pun tidak ada batasnya. Satu pohon sawit besar diberikan pupuk sebanyak satu sampai dua kilogram, tetapi untuk pohon yang masih berukuran kecil maksimal diberi pupuk sebanyak satu kilogram. Sekeliling pohon ditaburi pupuk dengan jarak satu meter dan diaduk dengan pupuk agar bercampur dan meresap ke dalam pohon.

> "Dikasih pupuk juga setiap tiga bulan sekali. Pupuknya itu ada MPK, macam-macamlah pupuknya itu ada urea, poska. Pupuknya dikelilingi. Ini pohon dikeliling pupuk trus diaduk-aduk sama tanah. Jaraknya jangan terlalu dekat, satu meter lah dari pohon. Sendiri yang kerjain ya gampang dipupuk diangkut pakai *arko* (gerobak sorong). Didorong dibawa sawit itu gak dipikul." (Pawi, 67 tahun)

Bagi petani yang ingin memperluas lahan sawit maka petani harus membeli bibitnya. Harga bibit dalam satu kotak kecil yang berjumlah 205 biji mencapai satu juta rupiah. Bibit tersebut didapat dari Malaysia dan dijual oleh penduduk sekitar. Petani memesan dan penjualnya mengantar bibit sesuai dengan pesanan.

Bibit sawit memanglah kecil, ukurannya berbentuk bulat dan sebesar ibu jari. "Hah segini cuma tunas aja. Cuma bulat sebesar jempol mungkin," kilah Emma (27 tahun). Bibit dimasukan kedalam persemaian agar terhindar dari hama seperti tikus dan babi hutan. Bibit dirawat agar tetap tumbuh dan berkualitas baik dengan cara rutin diberi pupuk dan disiram seperti yang dilakukan oleh Pawi (67 tahun). Beliau rutin memberikan pupuk dan membawa air dari rumah untuk menyirami bibit, setiap tiga hari sekali. Ia tidak ingin bibitnya mati seperti milik rekannya karena kurangnya perawatan.

Bibit berumur satu setengah tahun akan mulai bermunculan batang dan daun berduri. Bibit sudah bisa dipindahkan ke lahan atau dijual. Harga satu batang pohon dihargai sebesar Rp. 50.000,-, namun Pawi tidak ingin menjualnya. Ia ingin menanam sendiri agar ia bisa meraup untung dari pohon yang ia tanam. "Bibit sawit mahal, tapi mahal lagi *sahang* (lada) bibitnya. Bibitnya *sahang* Rp. 10.000,- se batang. Tapi rata-rata untuk tabungan mendingan tanam sawit ama karet," jelas Emma (27 tahun).

2.4.3.2. *Sahang* (Lada)

Pada umumnya, sebagian besar masyarakat memilih untuk menanam *sahang* (lada), karena *sahang* merupakan bahan makanan yang mahal yang diekspor ke Eropa dengan harga yang mahal. Menanam *sahang* itu harus lurus tidak boleh bengkok. Apabila bengkok maka pohon tidak akan menghasilkan buah.

Sumber: Dokumentasi Peneliti

Gambar 2.8. Patok *Sahang* (kiri); *Junjung Bedaru* (kanan)

Sebelum ditanam, lahan harus dibuat patok terlebih dahulu. Selanjutnya tanah diberi pupuk dan diberi benih *sahang*. Satu tangkai benih *sahang* dihargai sebesar Rp. 10.000,- per batang. Tunas tersebut harus didirikan di sebelah *junjung bedaru* (tiang penyangga) agar tumbuh ke atas. Satu batang *junjung bedaru* dihargai sebesar Rp. 10.000,- s.d Rp. 40.000,- per batang.

Jenis kayu *junjung bedaru* ada dua macam yaitu kayu *samak* dan kayu *melangir*. Jenis kayu *samak* dihargai Rp. 10.000,- per batang. Jenis kayu tersebut tidak tahan lama. Dalam kurun waktu satu tahun, batang kayu harus diganti karena sudah terbelah. Sedangkan *junjung bedaru* jenis *melangir* dihargai Rp. 40.000,- per batang. Kayu tersebut dinilai kuat dan bisa bertahan hingga 2,5 tahun. Kayu jenis ini bisa ditancapkan sebanyak empat sampai lima kali di tempat lain.

Masyarakat berlahan sempit yang hanya mampu menanam *sahang* 300 s.d 500 tunas menggunakan *junjung bedaru* jenis

pohon *samak*. Masyarakat yang menanam lebih dari 1.000 tunas menggunakan *junjung bedaru* jenis *melangir* karena tahan lama. "Di sini umumnya pakai yang Rp. 10.000,- tapi untuk masyarakat menengah ke atas kita pakai yang Rp. 40.000,- karena lama. Jadi hemat tidak perlu ganti batang lagi," jelas Sandusin (50 tahun, Sekretaris Desa).

Sumber: Dokumentasi Peneliti

Gambar 2.9. Pohon *Sahang* yang Berumur lebih dari Satu Tahun (kiri); Buah *Sahang* yang Masih Berwarna Hijau (kanan)

Pohon sahang sebaiknya disiram rutin ada musim kemarau agar menghasilkan buah yang bagus. Hal tersebut akan memancing pohon untuk menghasilkan buah yang gemuk dan banyak.

Pada tahun pertama, pohon akan menghasilkan tunas baru. Tunas itu dipotong dan dipindahkan ke lahan lainnya. Pada tahun ke dua, pohon *sahang* mulai tumbuh tinggi dan junjung *junjung bedaru* pun perlu ditinggikan. Pada tahun ketiga, buah *sahang* pun banyak bermunculan dan siap untuk dipanen.

Ketika *sahang* memasuki bulan untuk dipanen, banyak pencuri *sahang* yang berkeliaran di kebun, sehingga kebun harus terus mengawasi kebun dengan cara berkeliling terus. Seperti yang dilakukan oleh Pak Baharudin (40 tahun), pada bulan Juli 2016 ia akan memanen *sahang*nya, maka pada bulan Juni, dia sudah sering berada di kebun untuk mengawasi. Saat ini ia sudah menyewa orang

untuk mengawasi kebunnya dan menginap di kebun. Buruh pengawas *sahang* diberi upah sebesar Rp. 100.000,- per hari. Meskipun besar, tetap saja petani *sahang* selalu kesulitan dalam mencari buruh karena tidak banyak orang yang mau bekerja sebagai buruh penjaga kebun.

> "Iya menjelang panen itu ada banyak pencuri. Dari sekarang saya udah sewa orang untuk jaga kebun. Ya pada nginap di kebun, makan dan tidur di kebun, kan ada balai-balainya (Baharudin, 40 tahun). "Ini saya udah disewa pak Baha untuk jagain kebunnya. Oh musim panen banyak pencuri, kalau gak dijaga bisa ludes. Kan sayang udah tiga tahun dirawat trus dicuri." (Iswandi, 39 tahun)

Setelah panen ada proses yang harus dilakukan sebelum *sahang* diedarkan di pasaran. Semua *sahang* dimasukan kedalam karung dan ditumbuk dengan kayu agar karung padat. Setelah itu karung tersebut diletakkan di air yang mengalir untuk direndam selama 15 hari. Karung tersebut harus tetap dijaga agar tidak dicuri. Bahkan penjaga tersebut tidur di sebelah aliran air dan duduk-duduk di atas karungnya. Setelah itu *sahang* dibawa ke rumah dan siap dijemur sampai kering dan terlihat pecah-pecah *sahang* pun diayak dan sudah siap dipasarkan.

> "Bukan pas panen aja, karungan juga banyak yang diambil. Ya tidur aja di sebelahnya atau duduk-duduk di atas karung. Itu dulu ada pencuri meninggal diamuk masa karna mau nyuri karung. Itu kan depan Puskesmas dekat kalian tinggal itu ada air *tarentang*, nah di situ ada yang dipotong-potong sampe ga berupa wajahnya. Itulah...". (Iswandi, 39 tahun)

Pohon *sahang* hanya mampu bertahan selama tiga tahun saja. Setelah itu, pohon harus diganti karena tidak lagi menghasilkan buah. Tanah bekas tanam *sahang* belum bisa langsung digunakan untuk menanam *sahang*. Melainkan harus ditanami tumbuhan lain duu agar tanahnya subur kembali. Barulah setelah itu tanah siap kembali ditanami *sahang*. "Kalau udah mati tiga tahun gak bisa dipakai lagi. Harus diganti lagi, harus beli bibit lagi...," jelas Emma (27 tahun).

2.4.3.3. Karet

Petani karet sangat jarang ditemukan di desa. Di pinggir pantai, hanya ada satu orang yang menanam karet. Itupun baru memulai sejak enam tahun yang lalu. Ia mulai menanam karet karena mendapat pembagian bibit gratis dari pemerintah.

> "Jarang orang yang tanam karet di sini. Di pinggiran pantai ini cuma seorang aja yang tanam, itu pun belum hasil, masih kecil dia. Dulu kan dapat pembagian bibit karet dari pemerintah. Dikasih cuma-cuma ke rakyatnya. Kalau sawit kan gak ada soalnya mahal." (Emma, 27 tahun)

Beliau bernama Suti (49 tahun), sudah 6 tahun lamanya ia berprofesi sebagai petani karet. Disamping pekerjaannya sebagai nelayan, ia mulai belajar menanam karet. Bermula dari melihat pengalaman teman yang menanam karet. Setiap hari temannya bisa mendapatkan penghasilan dari penjualan getah karet.

Bersamaan dengan itu, pemerintah memberikan bantuan pemberian bibit karet secara percuma kepada masyarakat. Pak Suti mendapat 200 batang tunas dan ia pun mulai belajar untuk menanam dan merawat karet. Jarak antar pohon karet adalah 5 meter ke depan, 5 meter ke belakang, 5 meter ke samping kanan dan kiri. Hal ini dilakukan agar jarak antara pohon tidak terlalu dekat dan sinar matahari bisa sampai hingga batang pohon. "Biar kata orang dulu biar agak luas itu biar kena matahari biar batangnya subur dia. Ya kita nanam ini ikut-ikut orang dulu aja", ujar Suti (49 tahun).

Saat ini umur tanaman karet miliknya sudah berumur enam tahun. Pohon karet seharusnya sudah bisa disadap, namun getah yang dihasilkan masih sedikit dan berkualitas rendah. Ia pun memutuskan untuk menunda penyadapan hingga tanaman berumur tujuh tahun. "Umur tujuh tahun itu baru bisa diambil karetnya, sudah bagus dia. Sekitar enam tahun belum sempurna nian. Tapi udah ada getahnya dikit. Tapi bagusnya itu tujuh tahun...," kata Suti (49 tahun).

Hingga saat ini, Suti (49 tahun) masih belum belajar teknik penyadapan. Ia belum berani untuk belajar menyadap karena takut

pohon mati seketika. Suti akan belajar menyadap ketika pohonnya sudah siap disadap.

> "Ambil getah itu ada tekniknya, kalau orang ndak tahu bisa cepat mati dia. Dari atas itu ngirisnya, cuma entahlah aku kan belum tau. Aku baru belajar nanam tapi belum belajar nggoresnya itu. Harus belajar sama orang dulu. Kalau belum tau jangan coba-coba kata orang bisa cepat mati. Soalnya batang dalamnya itu kayunya cepat mati." (Suti, 49 tahun)

Jika karet sudah bisa disadap maka getah yang dihasilkan sudah bisa dijual. Getah harus dicampur terlebih dahulu dengan tawas agar kering dan mengeras. Setelah mengeras barulah getah bisa dijual. Harga getah karet dijual sebesar Rp. 5.000,-/kg.

Pohon karet bisa disadap setiap hari. Banyaknya getah karet yang dihasilkan tergantung dengan cuaca. Jika memasuki musim kemarau maka getah pun akan keluar sedikit saja. Namun jika memasuki bulan penghujan maka getah pun akan banyak keluar.

> "Karet itu tergantung dari cuaca, asal ndak kemarau pokoknya nda pernah orang berhenti ngaret itu. Kalau kemarau itu kurang getahnya. Pokoknya tiap hari lah ngambil. Ada teman saya rumahnya dekat mama saya kerjanya itu terus ngaret...". (Suti, 49 tahun)

Pohon karet tidak memerlukan perawatan khusus. Pohon hanya perlu diberi pupuk selama satu tahun sekali. Pupuk ditabur keliling agak jauh dari pohon yaitu sekitar satu meter. Pupuk dibiarkan saja tanpa harus diaduk dengan tanah.

> "Ga pernah disiram lah. Pupuk paling dikasih sekali setahun gak rumit nian digawe kalau karet itu. Ditabur agak jauh dari pohon sekitar satu meter lah. Kalau ada modal sih dicampur gak masalah kalau saya sih cuma urea aja. Kalau satu pohon paling setengah kilogram pupuk urea. Kalau kami ya, kalau orang lain itu kadang lebih. Kata orang kalau dikasih pupuk tambahan itu getahnya agak banyak. Yang saya belum kelihatan." (Suti, 49 tahun)

Jika petani memiliki uang berlebih maka petani membeli racun untuk meracun rumput yang tumbuh disekitar pohon. Rumput tersebut tidak mengganggu pertumbuhan karet sehingga banyak petani yang membiarkan rumput tetap tumbuh tanpa harus membersihkannya.

> "Karet itu mudah cuma dikasih pupuk sama dibersihin rumputnya. Kalau ada modal diracun sih, kalau ga ada modal ya dibiarin aja. Agak-agak semak sedikit ga masalah lah gak akan mati itu kan kayu." (Suti, 49 tahun)

2.5. Perumahan dan Pola Pemukiman di Daratan dan Pesisir

"Tukak Sadai dalam Angka tahun 2015" menyatakan bahwa jumlah bangunan untuk tempat tinggal menurut tipe dan jenis di Desa Tukak ada sejumlah 243 unit. Rinciannya adalah rumah permanen sebanyak 88 unit, tipe semi permanen berjumlah 81 unit dan rumah papan tipe panggung totalnya 73 unit.

Persebaran penduduk yang ada di desa ditata berdasarkan dusun dan rukun tetangga (RT). Persebarannya terlihat unik. Dimulai dari kawasan yang paling ujung selatan yaitu kawasan RT 01. Kawasan ini dipenuhi oleh penduduk yang berasal dari etnik Bugis, sedangkan kawasan RT 02, 03 dan 04 dipenuhi oleh penduduk yang berasal dari etnik campuran yaitu etnik Bugis, Melayu dan Jawa. Kawasan ujung utara yaitu RT 05 kembali lagi dipenuhi oleh etnik Bugis. Kawasan RT 05 merupakan kawasan pesisir pantai sehingga ditempati oleh etnik Bugis yang mayoritas bekerja sebagai nelayan. "Di kampung tengah kiri-kanan orang Melayu tapi di pantai sama di ujung sana itu Bugis semua…," jelas Dayah (74 tahun). Pernyataan ini juga diperkuat oleh informan lainnya, "di sini itu unik Mel, RT 01 sama 05 itu Bugis semua tapi RT 02, 03, 04 itu campur-campur. Entah itu kenapa, memang dari dulu sudah begitu...," ujar Nuraini (34 tahun).

Area pemerintahan seperti kantor desa dan sekolah terdapat di kawasan RT 01. Tidak hanya itu, sumber mata air yang bernama *tarentang* pun berada di kawasan tersebut. Memasuki lebih dalam,

terdapat mata air *kolong* yang terletak di kawasan RT 02. Lebih lanjut, terdapat sumber air rambut dan lapangan bola yang terletak di kawasan RT 03. Kawasan RT 04 terdapat Masjid, PLTS dan TPU. Terakhir di kawasan RT 05 terdapat sumber air rumbia dan *musholla*. Saat menelusuri jalan desa, sangat mudah menemukan kediaman para pengurus dan perwakilan desa, sebab selalu tercantum papan nama di tepi jalan utama desa.
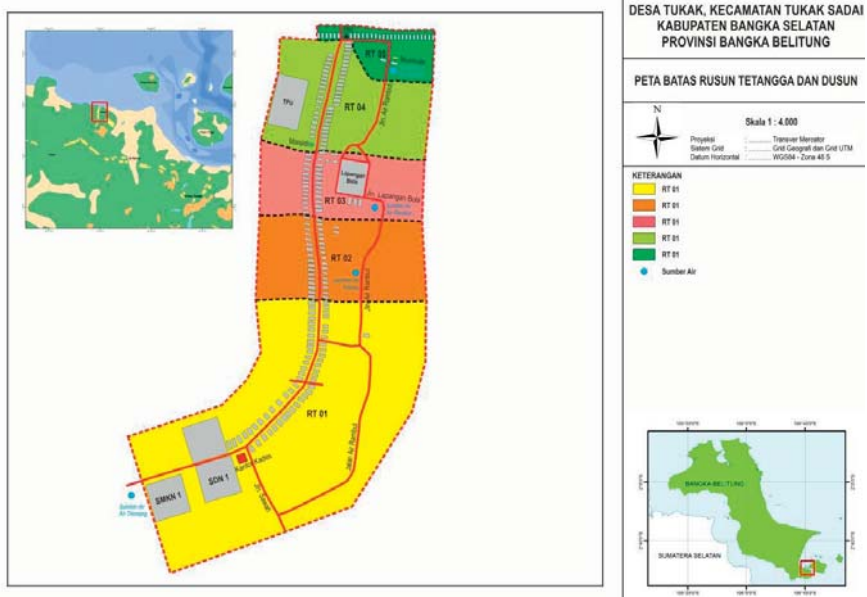
Sumber: Pemerintah Desa Tukak

Gambar 2.10. Peta Pemukiman

Model rumah yang ada di daratan hampir sama bentuknya karena orang yang bekerja sebagai tukang bangunan berasal dari orang Melayu. Model rumah berbentuk memanjang ke belakang dengan diberikan satu pintu depan dan satu hingga dua jendela. Hampir semua rumah memiliki pekarangan yang luas. Ada yang ditumbuhi pepohonan tetapi ada juga yang dibiarkan kosong.

Sumber: Dokumentasi Peneliti

Gambar 2.11. Setiap Rumah Perangkat Desa selalu Memasang Papan Nama Jabatan

Pada tahun 2013, desa mendapat bantuan dana dari PNPM[24]. Dana tersebut digunakan untuk pembentukan pagar tembok bagi semua rumah yang ada di daratan. Pagar tampak terpasang dari ujung RT 01 hingga simpang RT 05 yaitu tempat pelelangan ikan terlihat pemandangan yang rapi. Semua rumah memiliki pagar tembok yang sama dan bercat putih. Desa telah diresmikan sebagai desa wisata dan sebelumnya semua aparat desa bekerjasama untuk mencat pagar, dari yang semula berwarna putih, berubah menjadi hijau.

Meskipun sudah berpagar, banyak masyarakat yang tetap membuat pagar lagi di depan teras. Entah pagar yang terbuat dari jaring ikan ataupun pagar yang terbuat dari besi. Hal ini bertujuan untuk menghindari binatang seperti ayam masuk ke dalam rumah dan memberi rasa nyaman bagi orang yang memiliki anak kecil tak khawatir bila anaknya sedang bermain di teras.

24 PNPM adalah kepanjangan dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat yang diinisiasi oleh Kementerian Dalam Negeri. Program ini sudah berakhir pada tahun 2014.

Gambar 2.12. Model Rumah di Daratan
Sumber: Dokumentasi Peneliti

Seperti yang sudah dijelaskan di atas, model dan bahan baku semua rumah di daratan hampir serupa. Pada awalnya rumah yang berada di daratan terbuat dari kayu. Namun seiring perkembangan zaman, pada tahun 2001 sebagian besar orang sudah merenovasi rumahnya. Bagi orang yang memiliki dana, mereka merenovasi semua bagian rumahnya dengan menggunakan tembok. Tetapi bagi orang yang memiliki dana terbatas, mereka hanya merenovasi bagian depan dengan menggunakan tembok, sedangkan bagian belakangnya tetap menggunakan kayu. Menurut informan yang bernama Baharudin (40 tahun) alasan rumah setengah tembok dan setengah kayu karena rumah tersebut merupakan rumah lama dan bagian depan hanya dilapisi tembok saja tanpa mengubah bentuk asli dari rumah lama.

Masyarakat yang mempunyai dana berlebih maka mereka mempercantik rumahnya dengan memperindah muka halaman rumah yaitu menggunakan keramik dan pintunya dilapisi tralis besi bahkan diperindah dengan tiang penyangga dan pagar besi. Bagi yang memiliki kendaraan roda empat, mereka membangun garasi tepat disamping rumah. Garasi dibuat dengan sederhana, lantai hanya dilapisi semen dan tirai kayu digunakan sebagai pintu.

Pola perumahan penduduk di kawasan daratan dibangun lurus mengikuti arah jalan desa dan saling berhadapan. Tentang

hal ini Kepala Desa Tukak yang asli etnik Bugis menjelaskan konsep pemahaman etnik Bugis dalam mendirikan rumah, yaitu setiap rumah wajib sejajar berhadap-hadapan. Tidak boleh ada yang lebih menyamping dari rumah tetangga. Jika dibangun tidak mengikuti aturan maka pemilik rumah akan terkena penyakit. "Penyakitnya macam-macam bahkan pemilik rumah bisa diare bahkan meninggal, awalnya sial terus, tidak ada rejeki...," ungkap Syamsudin (45 tahun, Kepala Desa).

Semua masyarakat daratan mempercayai hal itu. Jika dilihat dengan seksama, rumah yang berhadapan akan sama persis letaknya, semuanya berhadapan sejajar. Pola ini sudah terbentuk sejak dahulu bahkan sebelum Dinas Pekerjaan Umum datang ke Tukak.

> "Lihat aja, teras rumah depan sama rumah ini sama kan lurus. Itu karna adatnya harus begitu. Semua rumah harus tengok ke jalan dan harus lurus sama depannya. Nih di sini ga ada yang gak sejajar, semua sejajar. Kalau langgar nanti dia kena penyakit, itu sakit perut. Bisa juga meninggal." (Martoni, 40 tahun)

Terdapat tong sampah berwarna biru di depan setiap rumah yang diberikan oleh pemerintah desa. Di depan setiap dua sampai tiga rumah juga terdapat pot bunga yang terbuat dari daur ulang drum yang sudah dihias dengan menggunakan cat warna warni dan bergambar.

> "Itu setiap rumah ada tong sampah kaya warna biru itu hah. Kalau di pesisir kan karena laut jadi cuma satu aja. Kalau di darat sana ya setiap rumah satu tong sampah. Ada juga pot bunga yang diletakkan di setiap tiga rumah..." (Sanatang, 40 tahun)

Di daratan hanya ada satu rumah panggung, sedangkan rumah lainnya rata dengan tanah. Hingga saat ini rumah tersebut masih berbentuk rumah panggung dan tetap dipertahankan sampai sekarang. Rumah panggung tersebut dibangun dengan menggunakan kayu *bakaul*. Sayangnya kayu ini tidak tahan lama sehingga harus diganti setiap tahun sekali. "Cuma ada satu rumah panggung di sini, itu yang di RT 01. Selainnya ya rata sama tanah. Dari dulu emang

udah gitu. Semua rumah sama kan yang bangunnya orang Melayu (Sanatang, 40 tahun).”

Pola pemukiman di daratan berbeda dengan pola pemukiman di pesisir pantai. Pada saat ini rumah orang Bugis yang menempati area di pesisir pantai berjumlah sekitar 28 unit. Rumah-rumah tersebut dihuni oleh sekitar 40 kepala keluarga. Jumlah rumah yang diisi lebih dari satu kepala keluarga sebanyak 12 unit.

Di sebelah kiri dermaga terdapat dua rumah panggung yang berdiri tegak, sedangkan di sebelah kanan terdapat 26 rumah panggung. Semua rumah tersebut terbuat dari kayu dan bagian belakang rumah langsung menyentuh air laut.

Sumber: Dokumentasi Peneliti

Gambar 2.13. Rumah Panggung di Daratan (kiri); Rumah Panggung Tampak Depan (kanan)

Bentuk rumah yang ada di pinggir pantai hampir sama semua kecuali satu rumah tingkat yang berada di sisi kanan dermaga. Rumah tersebut adalah rumah satu-satunya yang bertingkat di desa ini, namun secara keseluruhan terlihat serupa. Model atap rumah berbentuk segitiga. Di depan rumah terdapat satu pintu dan jendela. Ada rumah yang berjendela besar ada juga yang berjendela kecil.

Setiap rumah memiliki halaman yang cukup luas. Halaman dibatasi dengan pagar pendek yang terbuat dari kayu. Beberapa rumah, tepasang dari pagar jaring ikan agar terjaga dari binatang yang hendak masuk rumah. Di depan pagar terdapat parabola yang digunakan menangkap siaran televisi. Semua rumah membuat jem-

batan kayu yang bernama *jerambah,* menghubungkan halaman dengan jalan.

Bentuk rumah yang ada di pesisir pantai serupa dengan yang di daratan yaitu memanjang ke belakang. Semua rumah berbentuk tusuk sate, dari pintu depan lurus hingga pintu belakang. Ada yang terlihat jelas dari depan tetapi ada juga yang tidak tampak karena tertutup lemari/meja televisi. Adapun alasan mereka membuat rumah memanjang agar masyarakat lebih mudah dan cepat untuk keluar dari rumah.

Pemandangan belakang rumah ada yang langsung ke arah laut. Ada juga yang tidak karena ada rumah yang berlapis hingga dua rumah. Ada rumah yang mempunyai tangga untuk turun ke laut ada juga yang tidak punya tangga sehingga mereka harus loncat dari rumah ataupun lewat jalan kosong di samping rumah Bu Emma dan Pak Asse.

Di pemukiman pesisir pantai terdapat dua warung yang berada di sebelah kanan dermaga. Selain itu terdapat satu PT tempat pengerjaan ketam. Di tengah pemukiman terdapat bangunan/ gardu pos yang digunakan masyarakat sebagai tempat bersantai dan bercanda gurau. Di sebelah bangunan pos terdapat tempat pengupasan ketam (PT dalam istilah lokal) yang dibangun oleh Pak Rahman selaku bos besar pengepul ketam yang berasal dari Pangkal Pinang. Ujung pemukiman pesisir pantai terdapat jalan menuju tempat lahan bagi masyarakat yang akan di relokasi.

Denah bagian rumah pesisir pantai hampir serupa semuanya. Rumah bagian depan terdapat ruang tamu. Memasuki bagian tengah terdapat kamar tidur dan dapur. Bagian belakang adalah kamar mandi. Ada kamar mandi yang terbuka tetapi ada juga kamar mandi yang tertutup. Kamar mandi yang tertutup atapnya tidak dilengkapi dengan kelengkapan pintu sehingga ketika ada orang yang masuk kamar mandi hanya ditutupi oleh kain samping sebagai pelindungnya.

Pembangunan rumah yang berada di peisisir pantai membutuhkan biaya sebesar 10 juta hingga 30 juta tergantung dari panjangnya rumah yang akan dibuat. Tiang penyangga, tidak perlu membeli

karena mereka bisa mengambil kayu jenis *seruk* dan *gelam* di hutan dekat pemukiman tersebut.

Menurut masyarakat yang tinggal di sana, perawatan rumah kayu memang mahal karena setiap tahunnya mereka harus mengganti kayu yang sudah lapuk atau *celegong*. Hal ini memang sudah menjadi resiko bagi penghuni rumah kayu yang berada di pesisir pantai. Jika kayu tidak diganti maka rumah akan rusak dan cepat ambruk.

Sumber: Dokumentasi Peneliti

Gambar 2.14. Pemukiman di Pesisir Pantai Tambah

"Itu rumah saudara saya di depan, sudah habis 30 juta hanya pondasi saja yang jadi, banyak ongkosnya, biaya truk, beli semen lagi, kalau rumah seperti ini habis ongkos 10 juta saja bagian depan sudah jadi semua sampai belakang, besar lagi, sudah tidur enak, kami orang banyak saling bantu waktu bangun rumah ini dua tahun lalu. Kayu ambil sendiri di hutan, tidak bayar. Mau bilang apalagi kayu kalau kena air terus cepat lapuk apalagi pas acara besar, pesta, orang banyak datang, cepat turun rumahnya (pondasi rumah semakin rendah karena dasar pasir). Setiap tahun kami tambah alas kayu untuk topang dasar rumah. Kuatlah, saya sudah 6 tahun disini belum ada kejadian rumah yang roboh karena itu tadi, tambah kayu terus." (Agus, 30 tahun)

Untungnya dalam waktu dekat semua masyarakat yang tinggal di pesisir pantai akan pindah ke daratan sehingga tidak perlu lagi memikirkan pergantian kayu setiap tahunnya. Mereka tinggal menunggu uang ganti rugi dari pemerintah terkait dengan program relokasi yang sedang dijalankan oleh pemerintah setempat.

2.5.1. Tolak Bala dalam Pembangunan Rumah

Semua masyarakat Tukak yang hendak membangun rumah menaruh tolak bala di dalam pondasi. Baik masyarakat Melayu dan Bugis daratan maupun pesisir pun percaya terhadap hal tersebut. Hal ini merupakan tradisi yang sudah diturunkan oleh nenek moyang mereka, sehingga siapa yang hendak membangun rumah selalu menaruh tolak bala agar terhindar dari suatu musibah.

Tolak bala yang digunakan masyarakat Bugis dan Melayu pun berbeda. Telur angsa dipercaya dapat menangkal perbuatan jahat. Telur ini khusus digunakan oleh etnik Melayu. Berbeda hal nya dengan etnik Bugis, mereka menggunakan *cangkuling* yang terbuat dari kelapa, gula merah dan serpihan wajan sebagai penangkal hal buruk. Meskipun jenisnya berbeda namun kedua tolak bala tersebut sama-sama diletakkan di dalam bagian pondasi yang paling dalam.

Masyarakat Melayu menaruh koin atau telur angsa ke dalam pondasi rumah. Hal ini merupakan cara untuk menghindari aksi kejahatan yang dikirim oleh orang yang sirik. “Ya Melayu juga ada naro telur angsa atau koin sebelum bangun, buat tolak bala,“ jelas Jaya (35 tahun).

> “Ya ada dong, ditaro di bawah pondasi. Ya biar ga ada yang sirik sama kita waktu bangun rumah. Tapi kan itu diam-diam, jangan sampe ada orang yang tau. Itu tergantung orangnya percaya atau engga.” (Nuraini, 34 tahun)

Baik masyarakat Bugis daratan dan pesisir juga tetap menggunakan *cangkuling* (tolak bala) dalam rumahnya. Meskipun sebagian besar masyarakat tidak mengetahui fungsi dari *cangkuling*, mereka tetap memasangnya. “Kalau orang Bugis pakai semua. Sama

orangtua disuruh bikin… ya udah bikin…," kilah Bunga (43 tahun). Ketidaktahuan yang sama juga disampaikan oleh Fitri (24 tahun), "Adatnya orang Bugis lah, ga tau buat apa, emang dari sananya…".

Cangkuling diletakkan ketika pondasi rumah hampir selesai dikerjakan. Sebelumnya, *cangkuling* dimasukkan ke dalam bungkusan daun pisang. Bungkusan tersebut ditaruh dibagian tengah pondasi yang paling dalam. Semua syarat tersebut harus lengkap. Jika tidak ada salah satunya maka penangkal tersebut tidak akan berfungsi.

> "Di sini ada tolak bala kalau mau buat rumah, ada gula merah, kelapa sama pecahan kuali dimasukin ke daun pisang baru digali dulu baru ditaro didalam pondasi. Itu harus dibungkus sama daun pisang. Gak tau aku artinya cuma ngikutin aja. Taro sesuatu di pondasi itu adalah adat Bugis Bone bukan adat Melayu. Gak tau soalnya kita ngikut aja. Ikut tradisi aja…" (Emma, 27 tahun)

Semua masyarakat Bugis percaya terhadap tolak bala yang dipercaya dapat menangkal perbuatan jahat yang sirik kepada pembuat rumah. Hal itu merupakan adat istiadat yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan masyarakat Bugis khususnya yang tinggal di pesisir pantai. Adat istiadat ini masih mereka pegang teguh meskipun mereka sudah tidak tinggal di kampung halamannya yaitu Bone. "Itu tiga rumah yang di lahan baru dibuat itu semuanya pakai tolak bala di bawah pondasinya. Takarannya bebas yang penting syaratnya ada, itu kan cuma syarat aja. Bugis sini kayak gitu…," jelas Emma (27 tahun).

Setelah rumah sudah berdiri tegak dan sudah layak ditempati, maka penghuni rumah harus menggantungkan satu tandan pisang kepok dan satu biji kelapa di tengah rumah. Syarat tersebut tidak boleh dilepaskan. Keduanya harus tetap berada di atas tiang rumah sampai mengering dan jatuh sendiri. Kedua jenis buah tersebut memang boleh dimakan. Jika hendak dimakan maka yang diambil hanyalah buahnya saja sedangkan kulitnya harus tetap ada di tempat. "Kalau rumah yang baru dipindahin ada pisangnya ada kelapanya. Kalau rumah baru itu digantungin semuanya. Pisangnya harus pisang kepok, trus kelapanya kelapa bulat, " jelas Emma (27 tahun).

Jika penghuni rumah baru tidak memiliki dana maka mereka tidak harus menggelar pengajian dan mengadakan sedekah. Hal yang harus mereka lakukan adalah menggantungkan tolak bala yang bernama *sawwa dan* menebarkan air beserta garam di teras rumah. Semua rumah yang ada di pesisir pantai menggunakan *sawwa* sebagai penangkal hal buruk. "...yang penting syaratnya ada, kalau pengajian tergantung punya uang atau engga'," kilah Ani (29 tahun). Hal senada juga diungkap oleh Suti (49 tahun), "Setiap rumah yang ada di pesisir menggunakan tolak bala (*sawwa*). Buat ini misal tolak penyakit. Itu kata orang Bugis Bone. Ya kalau orang bugis ya rata-rata lah begitu..."

Sawwa harus terus digantungkan di atas pintu. *Sawwa* terbuat dari beras dan ketan. Beras dimasukan ke dalam janur yang sudah berbentuk ketupat, sedangkan ketan dimasukan ke dalam daun kelapa. Dalam satu wadah, ketan harus terdiri dari dua macam yaitu ketam putih dan ketam hitam. Setelah selesai, semuanya direbus hingga matang.

Sumber: Dokumentasi Peneliti

Gambar 2.15. *Sawwa*

Sawwa yang sudah siap pun dimasukan ke dalam nampan (kapra dalam istilah bugis) dan dibawa ke rumah Nenek Elang. Beliau merupakan satu-satunya *sandro* yang bisa mendoakan *sawwa*. Semua masyarakat pesisir datang padanya jika ingin membuat *sawwa*. Proses jampi-jampi tidak memerlukan waktu yang lama. *Sawwa* sudah bisa dibawa pulang dalam beberapa menit dan digantungkan di atas pintu.

> "Kalau kayak gini ada khusus dukunnya nenek-nenek. Pak Herman mana bisa. Dia khusus untuk anak sama kayak sedekah mau masuk puasa itu. Kalau tolak bala itu kan ada orang khususnya ga semua orang bisa. Yang di sini yang bisa cuma seorang yaitu Nenek Eyang namanya cuma seorang itu yang bisa, masih hidup tapi udah tua. Dia nenek suaminya yuk Ani…" (Emma, 27 tahun)

Semua isi yang ada di dalam *sawwa* bisa dimakan, meski seringkali sebagian besar masyarakat membiarkan isinya hingga mengeras. *Sawwa* bisa diganti sewaktu-waktu terutama ketika di desa sedang terjadi wabah penyakit. Mereka tidak ingin seisi keluarganya terkena penyakit sehingga banyak dari mereka mengganti *sawwa* lama dengan *sawwa* yang baru. Prosesnya sama dengan yang sebelumnya. *Sawwa* dibuat dari beras dan ketan yang dimasukan ke dalam janur dan bungkus kelapa. Adonan pun dimasak dan dibawa ke *sandro* untuk diberi jampi-jampi. Setelah itu *sawwa* yang lama diturunkan dan diganti dengan *sawwa* yang baru.

> "Ini kan ada waktunya kalau ada waktunya diganti ya diganti jugalah. Ya ga terus-terusan kaya gitu. Apalagi kalau di desa lagi ada banyak penyakit ya diganti *sawwa*-nya. Banyak penyakit atau ada musibah ya dibikin lagi kaya gitu, kata orang. Buatnya sendiri baru dikasih ke orang pintar. Syaratnya daun kelapa ditaro ketan, ada ketan hitam ada ketan putih didalamnya. Satu bungkus itu kan ada yang hitam separuh yang putih separuh. Itu harus ada, yang diatasnya boleh yang mana aja asal harus pas syaratnya. Yang penting ada satu ikat ini harus dua macam. Tapi harus dimasak dulu. Udah dimasak ditaro di baskom baru dibawa ke dukun namanya nek Elang. Tapi udah tua ga lancar bahasa Indonesia.

Trus dikasih udah dikasih baru ditali di atas pintu. Gak bayar lah, seiklasnya aja…" (Ani, 29 tahun)

2.6. Masyarakat Pesisir dalam Perspektif Masyarakat Daratan

Pada awalnya orang Bugis datang dan menetap di pinggiran pantai. Mereka mendirikan bangunan tidak permanen dari papan kayu. Hingga akhirnya, orang Bugis pun banyak yang menetap di daratan dan mendirikan rumah permanen. Semua rumah permanen yang ada di daratan sudah mempunyai sertifikat rumah. Berbeda hal nya dengan rumah tidak permanen yang didirikan di pinggir pantai, semua rumah tersebut tidak memiliki izin karena berada di pinggir pantai yang tak lain adalah milik pemerintah.

Ketua RT 05 hingga saat ini tidak memiliki catatan administrasi apapun tentang jumlah penduduk, jumlah rumah tinggal, maupun jumlah rumah tangga di wilayahnya. Warga yang tinggal di belakang *talud* (dam penahan ombak) tidak mempunyai sertifikat rumah, karena Pantai Tukak adalah tanah milik negara. "Disini para Ketua RT malas-malas mendata sehingga data kita banyak kosong, kalo saya turun ke lapangan hitung satu-satu dan data sendiri, urusan kantor desa siapa yang tangani," ujar Kepala Urusan Desa Tukak, Rollis (24 tahun). Hal ini pun turut dibenarkan oleh Ketua RT 05, "Jumlah rumah di pesisir itu sekitar 30 rumah, gak tau juga berapa KK (kepala keluarga), soalnya banyak, satu rumah itu bisa dua sampai tiga KK (kepala keluarga), banyak kalau jalan-jalan ke belakang, nanti lihat sendirilah kalau kesana. Iya orang Bugis semua, banyak juga yang baru datang karena dipanggil saudara kesini. Pusing saya urus, belum ada KTP (kartu tanda penduduk), kalau sertifikat rumah banyak yang belum, hanya satu saja yang ada, rumah tembok itu," tukas Mustang (28 tahun).

Masyarakat daratan memiliki pandangannya sendiri terhadap masyarakat yang ada di pesisir pantai. Mereka menilai bahwa masyarakat yang tinggal di pesisir pantai kurang peduli terhadap

lingkungan. Mereka melihat kondisi pantai terlihat kumuh karena banyaknya sampah yang berserakan di tepi pantai.

> "Kebersihannya agak kurang juga. Mereka kan buang sampahnya di atas laut. kalau sampah kan enaknya di buang ke tong atau di bakar sekalian. Tapi itu agak mendingan sih, pas udah di buat dam ga begitu nampak sampahnya. Kalau ada dam tersembunyi dia jadi fokus pandangan ga langsung ke sampah. Dulu waktu belum ada dam biasanya terlihat numpuk sampaih itu di bawah." (Nuraini, 34 tahun)

Masyarakat daratan sangat berharap bahwa warga Bugis yang tinggal dapat segera meninggalkan wilayah pantai dan menetap secara permanen di daratan, sehingga dapat meneruskan warisan kepada keturunan selanjutnya.

> "Mereka itu tidak bisa membekali kepada keturunan berikutnya. Gak punya lahan. Gak punya perumahan otomatis... misalkan turun-temurun itu kan bisa jadi hak milik. Tapi misalkan mereka punya hak milik lahan di daratan ini kan jelas mereka punya warisan ke anak. Kalo di pantai punya siapa kan gak bisa diwariskan karena punya pemerintah. Kemudian ada hubungan dengan bank atau ada keperluan jika di daratan mereka punya sertifikat tanah... nah kan ini baik. Tapi sekarang kelihatan kumuh jadi itulah harapan kami." (Sumarjo, 47 tahun)

Masyarakat yang tinggal di daratan, baik yang berasal dari etnik Bugis maupun etnik Melayu, berharap banyak untuk adanya perbaikan bagi warga yang tinggal di pesisir pantai. Harapannya agar pantai tidak lagi terlihat kumuh dan sampah yang berserakan pun semakin berkurang. Hal ini dipertegas oleh bidan yang berasal dari etnik Melayu "Bagus lah ya yang mereka mau pindah itu jadi pantai bersih kan mau dibuat pariwisata kan. Biar mereka ga buang sampah lagi ke laut," tukas Winda (26 tahun).

Selain masalah kebersihan, masyarakat daratan juga mempunyai pendapat lainnya mengenai masyarakat pinggir pantai. Menurut mereka, masyarakat pinggir pantai kurang bersosialisasi dengan masyarakat daratan. Mereka tidak pernah terlihat bergabung dalam

kegiatan apapun. “Mereka kurang bercampur sama bagian kita yang diujung. Meskipun sama-sama Bugis kan. Kalau ada kegiatan kan kek *ruwahan* gitu, ya mereka sendiri-sendiri. Mereka cuma sekedar angkat ke masjid tapi gak ikut silahturahmi ke rumah-rumah,” ujar Nuraini (34 tahun). Hal itu juga dibenarkan oleh Winda (26 tahun), “Mereka itu cuma nyatu Bugis same Bugis lah, itupun Bugis yang di pesisir. Kalau di daratan ndak juga. Apalagi baru sama orang Melayu, itu jarang.”

Begitu pun dengan masalah kesehatan anak, masyarakat pesisir dinilai abai terhadap tumbuh kembang anak. Mereka jarang membawa sang buah hati pergi ke Posyandu untuk melakukan imunisasi. Hanya ada beberapa keluarga saja yang sadar terhadap pentingnya imunisasi. Informasi ini disampaikan oleh kedua petugas Puskesmas yang tinggal di Desa Tukak. “Kebanyakan mereka kurang imunisasi. Orang ujung (pantai) itu kurang, beda sama kita yang di darat rata-rata udah pada mengerti. Susah ngajak orang sana itu kecuali kalau ada pusling barulah mereka mau,” kilah Winda (26 tahun). “Untuk kesehatan anak mereka itu kurang juga. Orang sana itu kurang untuk ke Posyandu. Orang-orang tertentu aja yang suka ikut yang lainnya masa bodo,” sambung Nuraini (34 tahun).

2.7. Akulturasi Islam Melayu dan Islam Bugis

Tidak seperti masyarakat Islam pada umumnya yang merayakan dua acara keagamaan saja, masyarakat Desa Tukak justru merayakan empat acara keagamaan besar yang tidak pernah terlewatkan. Acara tersebut yaitu *maulid* nabi, *ruwahan*, lebaran haji dan lebaran Idul Fitri. Sejak jaman dulu, acara kebesaran keagamaan *maulid* nabi sudah berlangsung. Kegiatan *maulid* nabi semula hanya dilakukan oleh orang Bugis yang ada di Tukak, namun, masyarakat Melayu kemudian turut memeriahkan tradisi ini. Semua masyarakat bersama-sama membawa satu sampai dua keranjang telur (*serujo* dalam istilah Bugis) ke mesjid. Telur tersebut sudah dihiasi dengan banyak warna.

Serujo dahulu hanya diberi warna merah saja, namun dalam perkembangannya warna *serujo* pun mulai bervariasi. Masyarakat mewarnai *serujo* sesuai dengan keinginannya. Tidak ada makna khusus dalam pemberian warna *serujo* hanya saja sejak dahulu tradisi Bugis menggunakan warna merah sebagai simbol *maulid* nabi.

> "Kalau telur itu kan putih nah direbus baru dicelup ke pewarna makanan. Ada warna merah, hijau, dll. Gak ada artinya sih. Cuma dari dulu setiap hataman itu kalau orang Bugis itu warna merah.tapi kalau sekarang ini nak banyak tradisi kan orang yang nak warna merah ya merah, orang yang nak kuning ya kuning, gitu. Ya gak ada lambang-lambangnya." (Nuraini, 34 tahun)

Selain membawa *serujo*, masyarakat juga membawa makanan. Semua makanan dan *serujo* dikumpulkan ke panitia dan masyarakat mulai membaca doa bersama. Anak-anak TPA yang sudah tamat ngaji hataman turut memeriahkan kegiatan tersebut.

> "Kalau *maulid* itu tradisinya orang Bugis. Itu kan bawa telur yang udah ditaro di ember, *serujo* kalau kata orang sini ya. Ditaruh di ember atau ditaruh di mana gitu trus dibawa ke mesjid. Satu rumah satu, malah sekalian ada hataman dari anak-anak TPA yang sudah tamat ngaji itu kalau *maulid*." (Nuraini, 34 tahun)

Dahulu kala, tradisi membawa *serujo* hanya dilakukan oleh etnik Bugis, sedangkan "hataman" dan *sepintu sedulang* merupakan tradisi yang selalu dilakukan oleh etnik Melayu. Lambat laun kedua tradisi ini berbaur, baik etnik Bugis maupun Melayu sama-sama pergi ke Masjid dengan membawa telur dan makanan yang ditaruh di dalam *dulang*.

> "Jadi *maulid* itu langsung dilengkapi dengan pengajian anak-anak. Itu tambahan dari Melayu hataman itu. *Sepintu sedulang* itu tetap memang dari adat Melayu. Dulu kan rantangan jadi sekarang ini semakin maju mereka mau *sepintu sedulang* dalam satu rumah. Jadi kan enak bukanya kan langsung, kalau pakai rantang kan cuci tangannya gak ada. Kalau *sepintu sedulang* kan ada cuci tangan, lengkaplah di situ. Jadi kayak *ruwahan* kemarin tempatnya. Jadi kan sekarang orang semakin canggih kan, orang

> banyak yang pakai prasmanan kan yang pakai melamin-melamin. Nah pakai itu sekarang jadi kan gak susah-susah lagi piring pada ilang kan." (Nuraini, 34 tahun)

Di awal acara, semua masyarakat bersama-sama berdoa dan mendengarkan pembacaan ayat Al-Qur'an yang dikumandangkan oleh anak TPA. Setelah itu mereka mendengarkan kata sambutan dari Bupati Bangka Selatan dan mendengarkan ceramah dari pendakwah. Setelah semua acara selesai, barulah mereka membagikan *serujo* yang dibawa. Biasanya *serujo* dibagikan kepada tamu undangan yang hadir ke mesjid. "Ya ibaratnya itu oleh-oleh buat orang. Kan biasanya Bupati diundang," jelas Emma (27 tahun).

Sumber: Dokumentasi Peneliti

Gambar 2.16. ***Sepintu Sedulang***

Lalu dilakukanlah acara sedekah (*sepintu sedulang* dalam istilah Melayu) yang sudah disusun rapih di tengah balai. Acara sedekah adalah makan bersama dengan lauk yang sudah dikumpulkan sebelumnya.

> "Satu *dulang* itu *sepintu sedulang* artinya setiap satu rumah bawa *dulang* besar diisi makanan apa itu ketupat, nasi, lauk pauk. Nah di dalam itu ada semua kan. Ada tutupnya nanti dibawa ke balai." (Nuraini, 34 tahun)

> “Ya baca doa dulu baru sedekah. Makanannya itu bareng-bareng. Makan punya siapa aja. Kan makanannya dijajarin gitu jadi ya sembarang aja ambilnya. Kalau orang sini bilangnya *sepintu sedulang*.” (Emma, 27 tahun)

Persiapan acara dilakukan jauh hari. Perwakilan dari masyarakat berkumpul di Kecamatan untuk menentukan jadwal *maulid* Nabi per desa. Kegiatan ini tidak dilakukan secara bersamaan agar menghindari kemacetan di desa.

Tak bisa dipungkiri, acara *maulid* Nabi merupakan acara besar yang bisa menyaingi acara idul fitri. Orang berdatangan daerah Toboali bahkan Pangkal Pinang untuk menghadiri acara *maulid* Nabi dan mencoba makanan khas di setiap rumah. “Oh, kalau *Maulid* itu rame, semua jalan penuh. Orang darimana aja datang. Banyak yang gak kenal. Mereka mau lihat adat di sini seperti apa…,” jelas Mat Rawi (64 tahun).

Orang yang dikenal maupun orang yang tidak dikenal diperbolehkan memasuki setiap rumah dan mencicipi makanan. “Inilah adat kami, *maulid* Nabi itu besar-besaran di sini, Idul Fitri aja kalah meriahnya,” tukas Baharudin (40 tahun).

> “Kalau *maulid* ini ramai, ada acara pembukaan, ada sambutan-sambutan dari Bupati. Kalau Bupati itu gak pernagh gak datang, pasti hadir. Tahun ini Gubernur juga datang. Selalu ada penceramah datang di acara ini makanya ramai memang kalau acara *maulid*.” (Nuraini, 34 tahun)

Ribuan *serujo* menghiasi acara ini. Semua masyarakat berbondong-bondong membawa *serujo* yang sudah dihias. Ada yang berbentuk rumah panggung dan ada juga yang membuat telur berbentuk perahu. Semua *serujo* yang tersisa dipegang oleh anak-anak TPA dan pasangan *bujang* (laki-laki), *dayang* (perempuan) untuk diarak menuju pantai. Para *bujang dayang* tersebut sudah menggunakan pakaian adat lengkap dengan *make up*.

Biasanya *bujang* dan *dayang* yang mengiringi arak-arakan hanya ada satu pasang saja, tetapi tahun 2016 sedikit berbeda, ada

empat pasang *bujang dayang* dalam memeriahkan acara *Maulid* Nabi. Mereka menggunakan pakaian adat sesuai dengan etnik masing-masing. Bagi mereka yang merupakan etnik Bugis maka mereka menggunakan pakaian adat Bugis, sedangkan etnik Melayu menggunakan pakaian adat Melayu. Hal tersebut merupakan ide dari Pak Kades yang baru menjabat beberapa bulan terakhir.

> "Kalau *Maulid* ini ramai, ada acara pembukaan, ada sambutan-sambutan dari Bupati. Kalau Bupati itu gak pernah gak datang, pasti hadir. Tahun ini Gubernur juga datang. Selalu ada penceramah datang di acara ini makanya ramai memang kalau acara *maulid*. Itu ada arak-arakan kalau *maulid*. Diarak dari depan masjid sampai ke pantai. Anak-anak yang hataman dari TPA itu bawa *serujo*. Ada juga *bujang dayang* untuk ngiringin yang hataman itu. Itu biasanya satu pasang. Tapi tahun ini agak ramai, ada empat pasang *bujang-dayang*, kita pakein adat Bugis sama Melayu. Yang orang Bugis kita pakein adat Bugis, yang orang Melayu kita pakein adat Melayu. Ini baru awal mula karena pak Kades baru. Biasanya gak pake baju adat." (Nuraini, 34 tahun)

Setelah selesai, acara adat masyarakat pun mempersilahkan tamu untuk mencicipi masakan seperti ikan lempah kuning, ayam opor, udang goreng, ketupat, mie, pempek, ketam, kue, kudapan dan berbagai minuman.

> "Di sini rame kalau Maulid-an, banyak orang yang datang. Pas acara semua jalan ini hah penuh. Mobil berjajar sampai pantai, gak bisa gerak tuh. Semua pada masuk ke sembarang rumah untuk makan." (Nuraini, 34 tahun)

Selain *Maulid* nabi, ada satu kegiatan lagi yang selalu meng-undang perhatian orang luar untuk datang ke Tukak. Acara tersebut bernama *ruwahan*. Bukan hanya masyarakat Melayu yang mengikuti tradisi orang Bugis tetapi masyarakat Bugis pun turut mengikuti kebudayaan orang Melayu seperti acara *ruwahan*. Kegiatan ini dilakukan 15 hari menjelang puasa. Semua orang memasak kue dan makanan berat seperti ketupat, daging dan makanan khas Bangka Selatan yaitu lempah kuning.

Kegiatan *ruwahan* hampir sama dengan kegiatan *maulid* Nabi. Semua masyarakat datang ke mesjid dengan membawa pintu se*dulang*. Acara *ruwahan* tidak ada acara sambutan, hataman dan khotbah, langsung memanjatkan doa selamat bagi arwah. Acara ini biasa dilakukan di balai masjid dengan dipimpin oleh ketua adat setempat. Setelah selesai barulah mereka menggelar makan bersama di masjid dan dilanjutkan di kediaman masing-masing.

> "Acara *ruwahan* hampir sama dengan *maulid* nabi. Kalau pintu se*dulang*nya tetap bawa cuma *ruwahan* nih enggak bawa *serujo* dan gak ada hataman. Kalau *ruwahan* gak ada ngaji langsung makan-makan aja. Doa-doa selamet, doa-doa untuk orang yang meninggal ngirim ke arwahnya kan langsung makan. Ngirim doa itu dilakukan di balai masjid. Ada sesepuh kan, ada orang tua orang sini yang baca kayak *tahlilan*. Barulah makan-makan bareng." (Nuraini, 34 tahun)

Tetangga rumah, warga desa sebelah hingga masyarakat Toboali turut hadir di acara tersebut. Orang yang sudah dikenal bahkan orang yang tidak kenal sekalipun diperbolehkan untuk memeriahkan acara dan masuk ke rumah untuk mencicipi makanan yang sudah disediakan. Jalanan akan dipenuhi kendaraan dan masyarakat berhamburan untuk saling memaafkan. "Kita undang desa lain. Orang Toboali juga datang ke sini padahal gak kenal," jelas Martoni (40 tahun, wakil ketua BPD).

Sumber: Dokumentasi Peneliti

Gambar 2.17. Kegiatan *Ruwahan,* 23 Mei 2016

Ruwahan merupakan acara keagamaan menjelang bulan puasa. Acara tersebut persis seperti lebaran. Ada ajang berma'afan dan bertandang ke rumah tetangga dan sanak saudara. Awalnya, acara *ruwahan* hanya dilakukan oleh masyarakat Melayu namun seiring jalan masyarakat Bugis pun mengikuti kegiatan tersebut. Semua orang membawa telur dan makan bersama tanpa ada kecuali. Saat ini, kegiatan tersebut sudah dijadikan budaya setempat "Tidak ada perbedaan Bugis dan Melayu, semuanya bercampur (Jaya, 35 tahun)." Bukan hanya masyarakat Bugis saja yang turut serta dalam kegiatan keagamaan Melayu. Mereka pun turut berkontribusi dalam acara yang diperuntukkan masyarakat Bugis seperti kegiatan *Maulid*.

> "Kalau Bugis daerah pantai itu memang ndak nyampur orangnya. Mereka pake cara mereka. Gak seperti Bugis kita yang ada di sini. Nanti ya *ruwahan* mereka ndak ikut. Kita Bugis ini ada yang tertentu juga soalnya. Kita Bugis ini memang dulunya tidak ada yang *ruwahan* tapi kita doa slametnya mau bulan puasa. Nanti subuh sahur ya kita lalu siang bawa seserahan pakai *dulang-dulang* ngirim ke arwah leluhur. Nah kalau orang Melayu ini pas di hari *ruwahan* itu ngirimnya. Kalau kita jadinya ngikut karena pendatang kan tapi tetep kita masih ngirim." (Nuraini, 34 tahun)

Pengiriman sesajen dilakukan oleh ketua adat atau orang yang pandai. Secara kebetulan, ayah dari informan yang bernama Daeng Malandre bisa berkomunikasi dengan para arwah sehingga banyak orang yang menggunakan jasanya ketika hendak mengirimkan sesajen. Pengiriman sesajen dilakukan secara pribadi. Masing-masing orang memberikan bentuk ucapan syukur kepada leluhur dengan ditemani oleh ketua adat ataupun orang pintar lainnya.

Saat mengirim makanan ke leluhur, tidak ada tetangga yang boleh mengetahuinya. Kegiatan tersebut berlangsung rahasia dan hanya boleh diketahui oleh penghuni seisi rumah saja. Saat selesai, barulah mereka memanggil tetangga dan tamu lainnya untuk datang dan mencicipi makanan yang telah disediakan.

Kalau pun satu daerah tetap saja adatnya berbeda. Informan sudah berbaur dengan adat setempat. Ketika *ruwahan* dilakukan,

keluarganya menyiapkan makanan bagi orang-orang yang hendak beramu. “Kalau ada tamu datang masa ndak disuguhkan makanan kan…,” kilah Nuraini (34 tahun).

Masyarakat Tukak selalu merayakan *ruwahan*. Meskipun di musim paceklik tetap saja masyarakat ingin memeriahkan acara keagamaan tersebut. Mereka antusias dan sudah mempersiapkan *ruwahan* jauh sebelum hari-H seperti bahan baku pembuatan kue, ketupat, lempah kuning, opor ayam. Acara ini sangat meriah, sama seperti idul fitri bahkan bisa lebih meriah lagi.

Acara *ruwahan* ini dilakukan untuk menyenangkan hati para arwah dan mengirimkan makanan kepada mereka. Jika tidak dikirim-kan maka mereka percaya arwah tersebut akan memakan makanan yang ada di jalan seperti tulang ayam dan makanan lainnya. Mereka pun takut jika arwah nenek moyang mengambil makanan dari tetangga sebelah. Itu sebabnya warga Tukak masih memegang teguh ritual tersebut.

Ketika tahun lalu, *ruwahan* dilakukan secara serentak di 5 desa sehingga jalanan penuh dengan mobil dan tidak bisa bergerak. “Rata-rata orang Bangka tau ada acara ini jadi orang-orang datang ke desa untuk lihat *ruwahan*. Orang yang gak tidak kenal pun boleh masuk ke rumah dan makan,” jelas Jaya (35 tahun).

Tahun ini (2016), masyarakat di desa lain sempat membuat kesepakatan untuk tidak mengadakan *ruwahan* di siang hari karena akan menghabiskan banyak modal dalam menyiapkan makanan bagi tamu yang datang berkunjung ke rumah. Tetapi warga Tukak tidak ingin menghilangkan tradisi tersebut. Mereka ingin acara *ruwahan* dilakukan di siang hari dan tetap merayakan dengan kemeriahan meskipun berada dalam masa paceklik. “Kalah itu sama kaya lebaran ramenya,” jelas Nuraini (34 tahun).

Ruwahan tahun ini dilakukan di mesjid dengan membawa makanan ke sana. Semua mayarakat berkumpul dan menggelar pengajian bersama. *Ruwahan* digunakan sebagai ajang kumpul dan makan bersama sekaligus juga membahas kepengurusan masjid.

“Tadi *ruwahan*nya di balai desa. Selain makan bareng juga tadi ada acara urus pergantian pengurus masjid. Anggotanya udah mau minta diganti tapi ditolak masyarakat soalnya masih satu tahun trus belum keliatan hasil kerja mereka.” (Baharudin, 40 tahun)

2.7.1. Kepercayaan Masyarakat Tukak terhadap Penyakit Raja Cacing

Dikenal penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh medis yaitu penyakit raja cacing. Penyakit ini dibuat oleh orang yang tidak menyukai korban. Penyakit ini masuk ke tubuh korban ketika ia makan dan tidur. Di setiap tubuh manusia terdapat cacing sehingga cacing tersebut dibangunkan untuk menggerogoti tubuh korban. “Itu dikirimnya sama orang pintar Melayu. Kalau orang Bugis gak ada kayak gitu yang santet-santet. Ga ada marak-maraknya tapi terus ada,” tukas Ani (29 tahun).

Meskipun banyak makan tetap saja badan terlihat kurus dan cenderung akan menyusut berat badannya. Lama-kelamaan orang yang terkena penyakit itu akan meninggal. Dahulu ada banyak orang yang terkena penyakit ini. Namun seiring perkembangan zaman penyakit ini jarang dijumpai lagi.

“Iya kalau orang Melayu itu ada Mel. Kalau orang Bugis ya ndak tau yang kayak gitu. Makan terus tapi ndak gemuk-gemuk. Kalau di sini itu namanya guna-guna. Kalau Melayu mau kirim ke Bugis kalau sakit-sakit hati kan bisa. Kadang-kadang langsung meninggal Mel. Ada melayu yang kirim ke Bugis itu ada kalau sakit hati kan. Kalau yang pendek pikirannya ya kayak gitu hehehe...”. (Ani, 29 tahun)

Baru-baru ini ada orang Desa Tukak yan terkena penyakit tersebut. ia tidak terlihat seperti sedang sakit namun kian hari bobot badannya kian menurun. Para medis pun tidak dapat mendeteksi penyakitnya dan obat yang diberikan tidak manjur. Lama-kelamaan kondisinya pun memburuk dan akhirnya meninggal.

“Ada banyak yang sampai meninggal. Ada dulu dia itu kata orang sih kuliah mungkin dia pintar. Mungkin orangnya sirik sama

> dia. Perempuan tuh meninggal, orang Tukak sini. Katanya kena tipes (*thypus*) berapa kali bolak balik ke rumah sakit. Tapi kata orang ada yang sirik sama dia. Apalagi kalau pacaran sama orang melayu kalau banyak tingkahnya bahaya kamu. Bisa dibuat kalau dia sakit hati…". (Suti, 49 tahun)

Menurut masyarakat setempat, penyakit ini jarang bisa disembuhkan oleh dukun. Tidak ada dukun yang bisa menyembuhkan penyakit tersebut di Tukak, sehingga mereka harus pergi ke desa sebelah untuk menemukan dukun yang dapat menyembuhkan penyakit raja cacing. Sebagian besar korban penderita raja cacing akan meninggal. "Kalau ada yang kena gitu jarang bisa disembuhin. Kebanyakan yang meninggal 10 banding satu mungkin. Itu yang paling kejam katanya di sini, raja cacing…," jelas Ani (29 tahun).

2.7.2. *Sandro* (Dukun)

Orang yang mampu menyembuhkan orang sakit disebut sebagai *sandro* atau dukun. *Sandro* adalah sebutan orang pintar bagi etnik Bugis, sedangkan dukun merupakan istilah dari etnik Melayu. Sebagian besar masyarakat masih percaya kepada orang pintar. Jika obat yang diberikan oleh para medis dirasa tidak manjur maka mereka segera pergi ke orang pintar untuk berobat.

Setiap etnik mempunyai orang pintar yang mereka unggulkan. Beberapa orang Bugis masih memilih berobat ke *sandro* yang bernama Nenek Elang (72 tahun) sedangkan etnik Melayu berobat ke dukun yang bernama Mat Rawi (64 tahun). Ada penderita yang datang karena penyakit medis tetapi ada juga yang datang karena sakit yang diakibatkan oleh makhluk supranatural.

Kehidupan masyarakat tidak bisa terlepas dari *sandro*/dukun karena terkait adat setempat yang tidak bisa dilepaskan. Mereka percaya khasiat jampi-jampi yang diberikan oleh *sandro* atau dukun jauh lebih baik dari obat yang diberikan oleh para medis.

Seperti yang dilakukan oleh Ani (29 tahun) etnik Bugis, jika anak demam dan tidak sembuh dengan meminum obat dari pihak Puskesmas setempat maka ia langsung pergi ke Nenek Elang (72

tahun) untuk meminta air yang sudah diberi jampi-jampi. Menurutnya, anak bisa langsung sembuh dengan meminum air tersebut.

> "Pake dua-duanya lah. Kalau demamnya ga turun padahal udah makan obat ya langsung dibawa ke Nenek Elang. Gak diapa-apain cuma dikasih air aja. Engga asal air, itu airnya udah dijampi-jampi. Minum itu anak langsung sembuh ga demam lagi…". (Ani, 29 tahun)

Sama hal nya dengan Nurani (34 tahun) etnik Bugis, meskipun ia merupakan perawat yang bertugas d Puskesmas ia tetap percaya terhadap *sandro*. Jika anak bungsunya sakit dan tidak kunjung sembuh meskipun sudah pergi ke Puskesmas maka ia langsung membawa anaknya ke *sandro*. Ia pun percaya bahwa jampi-jampi dan ramuan *sandro* dapat membuat penyakit yang diderita anaknya sirna.

> "Kalau cipa sakit sih ya dibawa dulu dong ke Puskes. Ya kalau gak sembuh-sembuh ya dibawa lah ke *sandro*, dikasih jampi-jampi sama ramuan gitu, sembuh langsung. Kalau kita sih orang Bugis masih percaya kayak gitu kan itu adat kita ya." (Nuraini, 34 tahun)

Menurut penuturan Nuraini, jika ada orang yang sakit pinggang dan tidak sembuh meskipun sudah diurut dan pakai salep yang dijual di pasaran maka orang tersebut harus datang ke *sandro*. Pinggang yang sakit akan ditempeli daun sarikaya. Jika daun menempel dan tidak jatuh maka letak penyakit tersebut sudah benar. Daun tersebut belum boleh dilepas karena penyakit akan diserap oleh daun tersebut. Jika semua penyakit sudah terserap maka daun akan jatuh dengan sendirinya. Sakit pinggang pun langsung sembuh dan tidak terasa nyeri lagi.

Di desa hanya ada satu orang dukun dari etnik Melayu. Beliau bernama Mat Rawi (64 tahun). Ia merupakan ketua adat Melayu yang sering diminta untuk menyembuhkan orang sakit khususnya anak kecil seperti demam, sakit perut dan masuk angin. Anak yang demam diberi ramuan tradisional seperti campuran remasan kembang sepatu dan air. Sarinya dioles ke kepala sampai basah. Beberapa saat kemudian, kepala pun kering kembali, lalu ramuan tersebut dioles lagi

hingga anak tidak demam lagi. Mat Rawi pun memiliki ramuan khusus bagi orang yang menderita sakit perut. Penderita diberikan ramuan yang berisi jahe giling yang telah dibakar dan dicampur dengan gula merah, garam dan air panas. Orang yang “masuk angin” diberi ramuan akar medang usung.

Penderita campak akan diberi ramuan air ditambah dengan kemenyan dan diminumkan. Penyakit langsung hilang dan orang yang menderita campak pun langsung sembuh. Menurutnya campak dapat terlihat dari perubahan fisik seperti mata yang susah terbelalak, bibir pecah-pecah, demam, kejang. Penyakit ini disebabkan karena perubahan cuaca hujan ke panas dan sebaliknya.

Orang yang sering berobat adalah orang yang berasal dari etnik yang sama dengan dirinya yaitu etnik Melayu. Jaman sudah berubah, saat ini Mat Rawi sudah jarang dipanggil untuk menyembuhkan karena orang lebih memilih pergi ke mantri.

2.7.3. Makna *Sawwa* dan Jimat bagi Kelahiran

Di hari ke tujuh setelah kelahiran sang buah hati, orangtua memanggil *sandro* untuk memasang tolak bala yang bernama *sawwa* pada ayunan sang bayi. Pemasangan *sawwa* tidak hanya dilakukan di hari ke-tujuh tetapi juga masih bisa di pasang pada hari ke-sembilan atau hari ke-40. Hal tersebut tergantung dari kesiapan keluarga untuk membuat *sawwa*.

> “Setelah umur tujuh hari, di*akikah*in. Tergantung ada rejekinya udah ada apa belum. *Aqiqah* sama *sawwa* harus tetap ada. Kalau *sawwa* kan ditentuin harinya, kalau *aqiqah*an engga tapi harus juga. Ini adat bugis, adat bugis yang di Bone sulsel juga kayak gitu.” (Emma, 27 tahun)
>
> “*Sawwa* itu biar bayinya ga diambil makhluk halus makanya itu ditaruh begituan. Itu takut diambil rohnya pas tidur. *Sawwa* itu untuk jaga bayi biar gak kaget-kaget. Kan sering kan anak-anak mudah sakit, kagetan ya biar gak kaya gitu.” (Ani, 29 tahun)
>
> “Dulu ga ada tujuh bulanan. Selamatannya pas lahiran, kaya yang panjang-panjang itu namanya *sawwa*. Bisa seminggu, bisa sembilan hari, empat puluh hari bikin kayak gitu. Ya harus

dilakuinnya pas itu tergantung kesempatan aja. Kalau tujuh harinya gak sempet ya sembilan harinya. Ya terakhir 40. Ga ada makna khusus, itu kan untuk selamatan aja. Itu ditentuin sama leluhur, emang adatnya udah begitu." (Emma, 27 tahun)

Sawwa untuk bayi berbeda dengan *sawwa* yang ditempelkan di atas pintu. Jika *sawwa* yang di atas pintu berisi beras yang dimasukkan kedalam ketupat dan berisi ketan yang dimasukan kedalam daun kelapa. Maka *sawwa* untuk bayi hanya berisi ketan yang dimasukan ke dalam daun kelapa saja. "Beda lah, kalau untuk bayi itu *sawwa* nya yang panjang-panjang, ga ada yang ketupat," jelas Ani (29 tahun).

Sebelum digantung, *sawwa* yang telah masak diberi jampi-jampi dan digantung di ayunan untuk menghindarkan bayi dari gangguan makhluk halus. Bersamaan dengan itu, *sandro* pun memberikan jimat dengan mengikat tangan, kaki dan pinggang bayi dengan gelang yang terbuat dari benang hitam. Jimat tersebut bertujuan untuk menghindari bayi dari perbuatan jahat. "Ya sama, dua-duanya untuk penangkal setan. Itu benangnya beli sendiri trus dipasangin sama Nek Elang atau Pak Herman," jelas Bunga (43 tahun). "Siapa yang baca *sawwa* nya, itu juga yang pasang jimatnya. Ya barengan. Itu buat penangkal setan biar ga digangguin setan," sambung Lina (20 tahun).

"Dani dipakein gelang dari pertama bayi. Kalau kekecilan dibuka dibesarin lagi dipakein di tangan. Itu terbuat dari benang hitam. Harus hitam, tapi gatau juga artinya. Orang-orang masangnya kayak gitu. Fungsinya gatau juga buat apa ikut-ikut aja. Itu punya dani aja ditaro ditangan, di perut di kaki. Kalau bahasa Melayunya itu namanya stanbul, kalau Bugis itu namanya Ponceng. Kalau ada pengikatnya kan biar ga digangguin sama mahluk-mahluk halus gitu. Katanya sih…". (Muhammad Yusuf, 36 tahun)

"Biar gak ada yang ikutin arwah-arwah roh halus. Orang hamil sama bayi itu kan wangi mel jadi harus pake itu. Bawa gunting juga. Gelang hitam gatau buat apa, ya ikut-ikut orang sini aja…". (Niar, 22 tahun)

Sandro yang biasanya menangani bayi adalah nenek Elang dan Pak Herman (Ketua BPD sekaligus pengepul ketam yang ada di desa). Mereka selalu bergantian diminta untuk mendoakan *sawwa* agar bayi terhindar dari bahaya. Tidak ada tarif khusus menggunakan jasa mereka. Tuan rumah hanya memberikan uang secara sukarela. "Di sini yang bisa ya itu Nek Elang sama Pak Herman juga bisa. Kalau untuk anak kecil Pak Herman bisa doanya," jelas Ani (27 tahun).

Setelah *sawwa* sudah terpasang maka bayi sudah boleh keluar rumah (turun tanah). Sebelum keluar, keluarga menyiapkan bawang merah dan gunting kecil untuk disematkan di pakaian sang bayi. Bawang merah, gunting kecil dan Al Qur'an harus tetap berada di dekat sang bayi ketika bayi sedang tidur dan sendirian.

> "Kalau udah bikin kek gitu baru boleh dibawa keluar anaknya. Sebelum tu gak boleh keluar, kalau belum itu gak boleh turun dulu. Kalau mamanya boleh keluar, kalau anaknya gak boleh. Dulunya orang seminggu tapi ada juga orang kalau belum punya uang ya 40 hari. Jemur ke matahari sekalipun ga boleh. Ini kalau orang Bugis ya… Ya biar aman. Biar ga kagetan anaknya. Kalau anak mau pergi-pergi atau ditinggal di rumah sendiri ya ditaro itu, pengganti induk. Fungsinya sama juga biar gak diganggu. Kalau kita tinggalin kan gak apa-apa biar ayunan sendiri dia. Kalau kita lagi masak, lagi beres-beres, lagi apa kan gak apa-apa ditinggalin diayunan sendiri…". (Ani, 27 tahun)

Setelah memasang *sawwa* dan jimat, selanjutnya dilakukanlah acara *aqiqah*. Acara ini boleh diselenggarakan kapan saja tergantung dari kesiapan dana keluarga. Menjelang acara *aqiqah*, pada malam harinya diadakanlah lomba gap (kartu gaple). Hal ini bertujuan untuk memeriahkan acara *aqiqah*. Bukan hanya di acara *aqiqah*, lomba gap juga dilakukan di acara pernikahan.

> "Acara *aqiqah* tak tentu dilakukannya. Umur 40 hari hingga satu tahun pun masih bisa digelar. Ya tergantung ini (uang). Kalau sudah umur tiga bulan udah mampu ininya ya buat...". (Sayuti, 39 tahun)

Biasanya lomba gap (gaple) hanya diikuti oleh laki-laki. Tua maupun muda berunjuk kebolehan dalam memainkan kartunya. Mereka bersaing dalam memperebutkan hadiah. Bentuk hadiah bermacam-macam tergantung kesanggupan dari sang pemilik rumah.

Seperti yang terjadi pada acara *Aqiqah* yang diselenggarakan di RT 05, lomba gap diikuti banyak pemuda dan para orang tua. Masyarakat sangat antusias mengikuti lomba meskipun proses terjadi sangat alot sampai dini hari. Mereka memperebutkan hadiah utama yaitu lemari dua pintu. Sedangkan juara dua mendapatkan lemari satu pintu, juara tiga meja rias dan juara empat adalah meja belajar anak.

Pagi harinya, acara *aqiqah* pun dimulai. Pertama dilakukan doa selamat untuk mendoakan sang bayi, setelah itu dilakukan acara pemotongan rambut. Warga berdatangan untuk memberikan selamat dan menikmati makanan yang sudah disediakan tuan rumah.

> "*Aqiqah* itu istilahnya potong rambut kalau orang sini bilang. Sebelumnya ada acara doa dulu. Udah tadi pagi. Biasanya doa selamat. Bugis kaya gitu, di sini macam itu juga. *Shalawat* itu ada imamnya, kita makmumnya cuma ikut aja...". (Sayuti, 39 tahun)

Hiburan untuk tamu undangan yang sedang menyantap makanan pada acara *aqiqah* pun dilengkapi dengan musik dangdut. Tuan rumah memasang panggung dan menyewa penyanyi dangdut untuk memeriahkan acara. Para tamu undangan tidak perlu membawa uang amplop karena acara *aqiqah* merupakan acara sedekah "Oh kalau *aqiqah*an juga ada dangdutannya. Jadi sambil makan sambil nonton, jelas Emma (27 tahun).

> "Kalau acara begitu, ga perlu datang bawa uang ya tinggal datang aja hahaha (Ani). Ya tergantung, kan namanya juga sedekah. Sedekah itu memberikan. Jadi gak bawa uang juga gak apa-apa. Orang itu kan sebagai saksi bahwa *aqiqah* itu udah pernah dilakukan, gitu kan. Kan ini istilahnya ikhlas memberi sedekah jadi tidak ada istilah harus bawa uang." (Sayuti, 39 tahun)

2.7.4. *Boting* (Pernikahan)

Masyakat Bugis yang ada di Tukak sebagian besar ada pertalian darah. Kebanyakan dari mereka berasal dari Bone. Pada jaman dahulu, etnik Bugis harus menikah dengan sesama Bugis dan merupakan kerabat dekat. Hal ini dilakukan agar kekerabatan tidak hilang dan selalu dekat. Jika sudah kerabat jauh maka didekatkan kembali. Itulah fungsinya menikah dengan kerabat sendiri sehingga tidak terjadi penurunan derajat.

Menurut pengakuan sebagian besar etnik Bugis yang ada di Tukak, adat istiadat etnik Bugis di Tukak tidak sekental etnik Bugis yang ada di Sulawesi Selatan. Saat ini, etnik Bugis sudah dapat menikah dengan orang yang bukan kerabatnya, bahkan mereka boleh menikah dengan Etnik lain seperti Melayu.

> "Boleh nikah sama Melayu, boleh sama orang jauh, gak harus sama kerabat. Sekarang udah gak pake lagi yang kayak gitu. Kalau jaman dulu nenek moyang kita harus sama-sama Bugis lah gak boleh sama yang lain. Anaknya nanti katanya pangkatnya turun gitu kan. Jaman dulu iya harus ama kerabat." (Nuraini, 34 tahun)

Menurut Martoni (40 tahun), penggunaan adat istiadat etnik Bugis di Tukak sudah tidak kental lagi sehingga pernikahan sudah tidak diharuskan untuk menikah dengan sesama tingkatan ataupun dengan saudara. Hal senada juga disampaikan Jaya (35 tahun), "Kalau sama-sama cinta ya udah. Mau nikah sama-sama dengan orang Bugis atau Melayu pun sudah boleh. Semua udah berbaur". Menegaskan hal tersebut Baharudin (40 tahun) yang asli Bugis menyatakan, "Kalau Bugis ada hubungan jauh harus diambil lagi biar erat. Biasanya langsung saja dijodohkan. Tapi di sini udah gak kaya gitu kalau di Sulawesi Selatan masih kuat."

Kenyataan di lapangan berbeda, ditemui kasus sebuah pernikahan Bugis yang menggemparkan seluruh masyarakat Tukak karena calon mempelai wanita kabur di malam hari menjelang pernikahan. Sang gadis dijodohkan dengan saudara jauhnya yang bekerja di Jakarta. Sang gadis sempat menolak untuk dijodohkan karena sudah

memiliki kekasih di Desa Tukak yang tak lain adalah anak dari Bapak Kepala Desa. Dengan tekanan yang besar akhirnya sang gadis pun menyetujui perjodohan tersebut dan ia kembali ke Tukak untuk melangsungkan pernikahan. Namun di malam sebelum pernikahan, ia memilih untuk lari dari rumah dan bersembunyi di Koba (Bangka Tengah). Ia mematikan *handphone* dan tidak dapat dihubungi oleh siapapun.

Akhirnya pihak keluarga memutuskan untuk bertanya kepada orang pintar terkait dengan keberadaan sang gadis. Diberitahu bahwa ia sedang bersembunyi di rumah kosong. Keluarga pun dikerahkan untuk mencari di semua rumah kosong yang ada di desa namun tak berhasil. Sang gadis akhirnya mengaktifkan *handphone* dan menghubungi kekasihnya yang ada di Tukak, ia mengatakan bahwa ia tidak ingin menikah dengan sepupunya. Ia hanya ingin menikah dengan kekasihnya tersebut. Ia tidak akan pulang jika dijemput oleh keluarganya. Ia akan pulang jika dijemput oleh kekasihnya.

Sesampainya di rumah, semua keluarga gempar dan memarahi sang gadis. Tetapi sang gadis tetap dalam pendiriannya. Ia tidak mau dinikahkan dengan sepupunya. "Silahkan bunuh saja saya," ujar gadis tersebut. Keluarga pun semakin panik ditambah calon mempelai pria memutuskan untuk meninggalkan Tukak dan kembali ke Jakarta pada malam itu juga. Keesokan harinya, tidak terjadi pernikahan namun acara jamuan makan tetap berlangsung karena makanan sudah siap.

Banyak orang yang menyayangkan kejadian ini. Perjodohan ini dilakukan karena orang tua masih menganut adat Bugis yang kental. Mereka menginginkan putrinya untuk menikah dengan orang yang serupa kasta dengannya, meskipun calon pria tersebut bekerja sebagai satpam di sebuah perusahaan di Jakarta.

Keluarga sang gadis hanya orang biasa namun memiliki gelar yang disegani oleh masyarakat Bugis. Berbeda dengan anak bapak kepala desa yang tidak memiliki gelar, meskipun kepala desa adalah juragan lada dan menjadi pengepul ketam.

Sikap keluarga sang gadis akhirnya melunak dan memperbolehkan sang gadis untuk menikah dengan pacarnya. Empat malam

setelah kejadian tersebut, pihak laki-laki datang melamar ke kediaman sang gadis. Di sana pihak laki-laki membicarakan mahar dan batasan waktu untuk menyerahkan mahar kepada keluarga sang gadis. Uang mahar harus diberikan sebelum akad nikah agar kelurga sang gadis bisa menggunakan uang untuk keperluan pernikahan. Setelah semua sepakat, barulah diputuskan tanggal dan bulan acara akad nikah.

> "Laki-laki datang ke rumah perempuan ngomongin uang. Nah di situ ada keputusan, laki-laki kasih uang 30 juta belum termasuk seserahan di hari akad. Di situ juga keputusan tanggal nikah...". (Baharudin, 40 tahun).
>
> Jadi pertama itu ada omongan masalah berapa sanggupnya mengatar, itu namanya melamar. Di situ, uang belum dikasih. Ada perjanjian dulu sampe tanggal berapa janjinya. Ada yang seminggu sampai sebulan. Pokoknya sebelum akad nikah udah dianterin uangnya." (Martoni, 40 tahun)

Tiga hari setelah acara lamaran, akad pun berlangsung. Pihak laki-laki datang ke rumah pihak perempuan dengan membawa seserahan berupa kue, pakaian dan mas kawin. Lalu kedua pihak keluarga pun bersama-sama untuk pergi ke rumah sang laki-laki untuk melangsungkan acara akad nikah.

Acara diawali dengan doa selamat. Sepiring nasi ketan, sesisir pisang dan sebiji telur rebus dijadikan alat sesajen ketika dipanjatkan doa selamat. Sesajen merupakan syarat mutlak untuk melangsungkan pernikahan. Tujuannya agar calon mempelai dapat selamat dunia akhirat.

Setelah selesai, sesajen dipindahkan lalu syarat nikah pun dibacakan oleh penghulu dan sang laki-laki mulai mengucapkan ijab qobul. Proses itu terjadi lebih dari tiga kali karena kesalahan calon mempelai laki-laki dan kesalahan penghulu. Saat pengucapan terakhir tidak ada yang salah dan penghulu mengatakan sah.

Semua orang mengucapkan amin dan berdiri untuk melafalkan *shalawat*. Pengantin pun mengelilingi orang yang hadir sambil bersalaman. Acara pun ditutup dengan makan bubur kacang hijau

bersama-sama. ”Makan apa aja. Kayak kue, apa makan bubur, apa makan nasi. Gak tau artinya apa, itu udah tradisi yang penting tamu dikasih makan, tukas Emma (27 tahun).

Resepsi dilakukan seminggu kemudian, resepsi juga dilakukan di kediaman mempelai laki-laki. Serupa dengan proses akad nikah, proses resepsi pun tidak dihadiri oleh orangtua sang putri. Mereka sedang berada di Jakarta, sebagai gantinya sang putri di temani oleh paman dan bibinya. Resepsi berjalan dengan lancar dan tampak kedua belah pihak berbahagia mengikuti serangkaian acara.

Sebelumnya memang sudah ada pembicaraan antar keluarga perempuan dan laki-laki, untuk membantu kerugian perempuan akibat acara yang batal. Pihak laki-laki memberikan uang sebesar Rp. 30.000.000,- dan semua acara pernikahan mreka ditanggung semua oleh pihak laki-laki. “Ya begitu, biar jadi aja. Gak enak diomongin tetangga. Biar reda aja semuanya,” jelas Baharudin (40 tahun). Hal ini membuktikan bahwa masyarakat Tukak khususnya Bugis belum berbaur secara sempurna.

2.7.5. Kematian

Semua warga desa turut membantu ketika ada keluarga yang mengalami kesedihan karena telah ditinggalkan oleh orang yang dikasihi. Semua masyarakat yang tinggal di RT 01 hingga RT 05 turut membantu dengan cara memberikan uang sejumlah Rp. 20.000,- per rumah tangga. Ketua RT bertugas berkeliling memungut sumbangan dan hasilnya dikumpulkan ke bendahara desa untuk diberikan kepada keluarga yang ditinggalkan.

> “Kalau di sini ada bantuan dari masyarakat kalau lagi ada kemalangan. Bisa dapat dua setengah sampai tiga juta dari masyarakat. Dari satu rumah sudah dipatokin, 20.000. Setiap orang harus bayar. Ada RT yang keliling nagih dan setor ke bendahara. Dia yang kasih ke keluarga yang kemalangan.” (Sanatang, 40 tahun)

Sama seperti masyarakat pada umumnya, baik etnik Bugis ataupun Melayu tidak memiliki adat prosesi dalam menghantarkan

jenazah ke liang lahat. Masyarakat mengadakan selamatan untuk mendoakan orang yang meninggal agar ditempatkan di tempat yang layak. Biasanya selamatan dilakukan di hari yang ke-25, 40 dan 100 hari.

Keluarga orang yang ditinggalkan mengundang orang sekampung untuk mendoakan orang yang meninggal. Pria maupun wanita diundang untuk berdoa. Kegiatan ini berlangsung malam hari seusai shalat magrib.

Terdapat sedikit perbedaan tradisi antara etnik Melayu dan Bugis dalam memperingati hari kematian. Etnik Melayu hanya menyelenggarakan *tahlilan* saja sedangkan etnik Bugis menyelenggarakan acara *tahlilan* dan acara pengajian. “Bugis ada pengajian, Melayu cuma *tahlilan* aja,” ujar Sanatang (40 tahun).

Biasanya, *tahlilan* hanya diikuti oleh laki-laki saja, sedangkan acara pengajian bebas diikuti oleh laki-laki ataupun perempuan, namun biasanya adalah perempuan. Kedua acara tersebut dilakukan di hari yang sama tetapi pada jam yang berbeda.

> “Kalau *tahlilan* itu biasanya laki-laki. Kalau ngaji itu bebas. Saat acara, jam *tahlilan* dan pengajian berbeda. Selesai *tahlilan* baru dilanjut dengan pengajian. Kalau ngundang pengajian ibu-ibu ya sore setelah jam empat.” (Niar, 22 tahun)

Setelah selesai acara *tahlilan*, para lelaki diberikan makanan ringan yang dimasukan ke dalam kotak untuk dibawa pulang. Tetapi untuk acara pengajian, para ibu disuguhi makanan berat seperti nasi dan ayam santan. “Biasanya dilakukan di hari ke-7, ke-25, ke-40 dan ke-100. Di situ lah ada makan besar,” pungkas Sanatang (40 tahun).

2.8. Stratifikasi Sosial dan Bahasa

Masyarakat Melayu tidak memiliki stratifikasi khusus di dalam hidup bermasyarakat. Menurut Pak Jaya (35 tahun) yang merupakan orang Melayu, semua orang yang berasal dari etnik Melayu adalah sama. Tidak ada pangkat yang lebih tinggi maupun lebih rendah.

Berbeda dengan etnik Bugis, mereka memiliki tingkatan kasta kebangsawanan.

Etnik Bugis yang ada di Tukak mengaku tidak menggunakan gelar tersebut, namun pada kenyataannya disadari atau tidak mereka tetap memakainya. Menurut informan Melayu yang bernama Iswandi (39 tahun), masyarakat Bugis yang ada di Tukak selalu mengagungkan raja sehingga mereka sering berselisih paham. Orang Bugis ingin selalu dihormati dan menganggap mereka berada di strata yang tinggi.

Hal inilah yang membuat etnik Melayu terkadang jengkel terhadap etnik Bugis, meskipun tidak membuat perpecahan diantara mereka. Orang Melayu sering menimpali perkataan orang Bugis tetapi tidak sampai berkelahi.

> "Orang Bugis kalau ngomong tinggi betul. Gaya bicaranya tinggi dan selalu mengagungkan raja Bugis. Padahal semua suku punya raja juga kan, ya saya ladeni tapi tak sampai berkelahi (dengan nada sedikit meninggi)." (Iswandi, 39 tahun)

Kedua etnik tersebut sudah berbaur dalam segi bahasa. Mereka selalu menggunakan bahasa Tukak (Melayu) ketika berbincang-bincang dengan tetangga sekitar. Etnik Bugis sangat lancar berbahsa Melayu, mereka pandai mengartikan dan pandai mengucapkannya. Lain hal dengan etnik Melayu, mereka hanya tahu sedikit tentang bahasa Bugis, banyak dari mereka yang mengerti tetapi masih sulit mengucapkannya.

2.9. Transportasi dan Aksesibilitas

Jalan di desa Tukak sudah diaspal sejak tahun 1990, dan saat ini sebagian besar masyarakat sudah menggunakan motor maupun mobil sebagai alat transportasi. Anak sekolah sudah banyak yang membawa kendaraan sendiri. Sangat jarang ditemukan masyarakat yang jalan kaki, bahkan anak SD yang hendak ke sekolah juga memilih menggunakan sepeda.

Desa Tukak semula masih belum tersentuh listrik, masyarakat setempat menggantungkan hidup ke PLTD (Pembangkit Listrik Tenaga Diesel). Masyarakat harus membayar 500.000 setiap bulan. Listrik digunakan mulai jam lima sore sampai jam delapan malam. Masyarakat baru bisa menikmati fasilitas listrik di desa pada tahun 2014. Listrik prabayar baru masuk desa sekitar dua tahun terakhir, tetapi sering padam. Listrik bisa padam satu hingga tiga kali sehari dengan durasinya satu sampai empat jam.

Air PAM (Perusahaan Air Minum) masuk ke desa pada tahun 2000 untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Masyarakat tidak bisa hanya mengandalkan air PAM (Perusahaan Air Minum) karena air sering kering. Sebagian besar masyarakat membuat sumur bor dan mengambil air di sumur Air Rambut dan Air Rumbia (lebih lanjut pembahasan tentang nilai air akan dibahas lebih detail pada bab IV).

BAB III

SEKILAS KESEHATAN MASYARAKAT DI DESA TUKAK

Pada bab III ini akan dituliskan tentang konteks kesehatan yang berlaku di Desa Tukak, Kecamatan Tukak Sadai, Kabupaten Bangka Selatan. Penulisan akan dilakukan dalam lima sub bahasan, yang terdiri dari 1) Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Tiram; 2) Konsep sehat-sakit etnik Bugis di Desa Tukak; 3) Akseptabilitas masyarakat Desa Tukak terhadap Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Tiram; 4) Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat; 5) Kejadian dan Faktor Resiko Cedera dan 6) Aktivitas Pengelolaan Sampah di Desa Tukak.

3.1. Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Tiram

Puskesmas Tiram adalah Puskesmas yang membawahi Desa Tukak sebagai salah satu wilayah kerjanya. Banyak sekali tantangan yang harus dengan segera diselesaikan untuk dapat membuat Puskesmas ini berjalan. Tidak hanya masalah yang terkait dengan masyarakat, tetapi juga masalah internal yang terkait manajemen yang perlu segera diselaraskan.

3.1.1. Kesimpangsiuran Informasi Pelayanan

Masuk pertama kali menuju Desa Tukak dari jalan utama, kita akan terlebih dahulu disuguhi papan nama Puskesmas yang terletak di jalan utama. ‘Puskesmas Tukak Sadai’, demikian nama Puskesmas yang terpampang. Tetapi apabila kita melihat lebih dalam lagi, di

gedung Puskesmas tertempel tulisan nama yang berbeda, 'Puskesmas Tiram'. Perbedaan yang cukup membuat bingung masyarakat.

Sumber: Dokumentasi Peneliti

Gambar 3.1. Papan Nama dan Pelayanan Puskesmas Tiram

Berdasarkan Surat Keputusan Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Selatan tahun 2009, Puskesmas Tiram merupakan salah satu Puskesmas yang melayani rawat inap. Tetapi pada tahun 2010 berubah status menjadi Puskesmas rawat jalan.

Tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 lagi-lagi pelayanan berubah lagi menjadi pelayanan rawat inap. Pada bulan April 2015 bentuk pelayanannya dilakukan peningkatan menjadi Puskesmas PONED (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergenci Dasar), yang seharusnya hanya bisa dilakukan oleh Puskesmas yang memiliki rawat inap, sedang realitas saat ini Puskesmas Tiram tidak memiliki fasilitas rawat inap.

Menurut Kepala Puskesmas, anggaran tahun 2016 yang diperuntukan bagi Puskesmas Tiram hanya cukup untuk operasional rawat jalan, sehingga sementara diajukan perubahan. Lebih lanjut, petugas Puskesmas lain menjelaskan bahwa sering bergantinya fungsi pelayanan lebih disebabkan kurangnya fasilitas dan sumber daya manusia, sehingga para tenaga kesehatan merasakan paksaan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab.

"...di surat keputusan (SK) kami sudah tertera nama Puskesmas Tiram saat penempatan 2009, kami juga bingung, masyarakat juga sampai saat ini bingung, mungkin karena papan nama yang di depan itu pesanan orang, jadi waktu kami datang sudah ada, kami juga kurang perhatikan, soal status Puskesmas kami juga ikut saja sesuai dengan permintaan dari atas (Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Selatan) padahal fasilitas dan SDM belum memadai." (Susiana, 38 tahun, petugas Puskesmas)

3.1.2. Sumber Daya Puskesmas

Puskesmas Tiram berada di jalan raya Tukak Desa Tiram Kecamatan Tukak Sadai. Gedung pelayanan kesehatan masyarakat ini sangat mudah ditemui oleh warga karena berada di bahu jalan desa. Terdapat bangunan baru berlantai dua, yang selasarnya disambung dengan gedung lama.

Wilayah kerja pelayanan kesehatan Puskesmas Tiram mencakup lima desa. Sedang untuk menjangkau wilayah kerja, Puskesmas Tiram dilengkapi dengan satu unit kendaraan operasional Puskesmas Keliling (Pusling).

Sumber: Dokumentasi Peneliti

Gambar 3.2. Aktivitas Pelayanan di Puskesmas Tiram

Saat ini tenaga kesehatan yang bekerja dalam gedung Puskesmas Tiram berjumlah 37 orang. Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 33 orang, pegawai honor satu orang, bidan PTT (pegawai

tidak tetap) satu orang dan tenaga kesehatan sukarela (TKS) sebanyak dua orang. Setiap desa di wilayah kerja Puskesmas Tiram mempunyai satu bidan desa dan satu Posyandu.

Sejak berdirinya bangunan Puskesmas, pengunjung yang memanfaatkan jasa tenaga kesehatan sangat minim. Hal tersebut menurut Kepala Puskesmas lebih dikarenakan pelayan kesehatan yang masih bersifat kuratif, dan belum adanya pemegang program.

> "Rata-rata jumlah pengunjung saat saya menjadi Kepala Puskesmas tahun 2015, pasien hampir tidak ada, sepi, yah tujuh puluhan setiap bulan, karena sistemnya tidak jalan, programnya tidak jalan, awal tahun 2016 kami sudah sosialisasi dengan masyarakat, saya juga turun lapangan, orang juga kenal saya karena saya orang sini juga, saya orang Toboali jadi bisa bahasa setempat dan sekarang Alhamdulillah rata-rata pasien yang datang berobat sudah banyak rata-rata dua ratusan lah…". (Rudi H., 35 tahun, Kepala Puskesmas Tiram)

Senada dengan keterangan Kepala Puskesmas, Kepala Sub Bagian Tata Usaha Puskesmas Tiram menyatakan;

> "…sama dokter Rudi ini sekarang pasien sudah agak banyak, karena kemarin Puskesmas tidak melayani pasien. Jadi kalau perawat memang tidak bisa tangani baru, dokter turun. Karena dia memang fungsinya Kepala Puskesmas beda dan memang dulu sering keluar. Makanya posisi Kepala Puskesmas susahnya dokter itu ya begitu. Sama dokter Rudi ini dia dari rumah sakit ya, jadi pelayanannya di poli umum. Ada kelemahan masing-masing. Kalau di rumah sakit itu pelayanan saja, kalau di Puskesmas itu pelayanan (pengobatan) dan pelayanan masyarakat ada dua. Jadi dia harus pintar dua-duanya. Kalau di sini mau bikin rawat inap, tenaga saja kurang sesuai Peraturan Menteri Kesehatan nomor 75…". (Megawati, 39 tahun, Kepala Sub Bagian Tata usaha Puskesmas Tiram)

Dalam pandangan petugas Puskesmas, sebelum tahun 2015 Puskesmas Tiram sangat sepi pengunjung. Menurut mereka hal tersebut disebabkan kurangnya peran promosi kesehatan di masyarakat. Sejak berubah menjadi Puskesmas rawat jalan, dan tenaga

kesehatan dipercayakan memegang program. Seluruh elemen terkait dikerahkan mulai dari tingkat Puskesmas, desa sampai ke dusun. Hasilnya, menurut mereka warga sudah mulai memanfaatkan Puskesmas Tiram sebagai balai pengobatan masyarakat.

3.1.3. Gagap SOP

Penanganan pasien oleh medis maupun paramedis sudah seharusnya mengikuti alur standar operasional prosedur (SOP). Puskesmas Tiram hingga saat ini belum mempunyai SOP untuk semua bagian Poliklinik. Alasannya sederhana, "SOP-nya ada di file komputer, belum dipajang, jika di tempel pun Puskesmas ini seperti *wallpaper*… penuh semua, oleh karena itu kami tidak menempelnya," dalih penanggung jawab Poliklinik Umum, Susiana (38 tahun, perawat). Keterangan sedikit berbeda saat kami menanyakan hal yang sama pada Kepala Sub Bagian Tata Usaha Puskesmas Tiram;

> "Kebetulan pada zamannya kita ini Kepala Puskesmasnya baru juga ya tahun 2015. Dokter Rudi sekarang baru. Kebetulan yang lamanya sudah huh gitu, jadi pindah tempat gitu istilahnya. Pada zamannya dokter Rita dulu, SOP belum pernah dibikin. Sudah pernah dibikin tapi kayaknya kacau-balau amburadul gitu ya. Jadi permintaan kemarin Desember 2015 saya minta mereka bikin SOP. Kebetulan di komputer sudah ada tapi soft copy. Maksud saya mau bikin satu, nanti di benerin, tapi sebagian belum selesai jadi saya belum saya cetak gitu. Yang sudah itu poli gigi kalau ngak salah dia sudah punya, cuma protap atasnya belum ada nomornya segala macam itu belum kita ini (belum buat)…". (Megawati, 39 tahun, Kepala Sub Bagian Tata Usaha)

3.1.4. Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat

Urutan saat pasien datang berobat pertama kali langsung bertemu dengan petugas piket di depan pintu masuk. Setelah mendata identitas pasien, langsung diarahkan ke unit pemeriksaan sesuai dengan antrian kedatangan. Orang yang diperiksa akan mendapat status rekam medik dari pendiagnosa dalam bentuk catatan pada selembar kertas putih. Berkas tersebut diserahkan ke petugas loket sebagai file pasien sebelum meninggalkan Puskesmas.

Pengguna jasa dan layanan Puskesmas Tiram yang tidak membawa Kartu Indonesia Sehat/Bapan Penyelenggara Jaminan Sosial (KIS/BPJS) atau kartu Jaminan Kesehatan Bangka Selatan[25] (JKBS) diharuskan menyertakan Kartu Tanda Penduduk (KTP), atau Kartu Keluarga. Apabila tidak bisa menunjukan persyaratan dimaksud, maka akan dikenakan biaya sebagai pasien umum.

Pasien yang berasal dari Desa Tukak hanya sebagian kecil yang mempunyai kartu BPJS. Sedang warga yang mempunyai kartu JKBS terdata ada 19 orang di Kantor Desa Tukak. Apabila mempunyai kartu JKBS, maka masyarakat cukup menunjukan KTP Bangka Selatan kepada tenaga kesehatan atau pemerintah desa sebagai pesyaratan utama. Ada niatan untuk dari perangkat desa menambah kuota pemilik kartu JKBS.

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN

Pas Foto 2 x 3

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Bangka Selatan

Dto

dr. H. R. M. Yusuf Badaruddin
Nip. 19551106 199002 1 001

Bawalah kartu setiap anda berobat ke puskesmas dan jajarannya serta rumah sakit. Pelayanan kesehatan diatur sesuai perjanjian dan persyaratan JKJB.

IDENTITAS PESERTA JAMINAN KESEHATAN JUNJUNG BESAOH

Nomor KA : 19050 032983

Nama : PAWE
Ttl : SULAWESI, 27-08-1949
Alamat : DS. TUKAK
RT. 05
KEC. TUKAK SADAI

Kades/Lurah : TUKAK

(..............................)

Anggota Keluarga

1. Nama : ASGE
Ttl : TUKAK, 10-02-1989
P/L : L

2. Nama :
Ttl :
P/L :

3. Nama :
Ttl :
P/L :

4. Nama :
Ttl :
P/L :

5. Nama :
Ttl :
P/L :

6. Nama :
Ttl :
P/L :

Sumber: Dokumentasi Peneliti

Gambar 3.3. Kartu Kepesertaan Jaminan Kesehatan Bangka Selatan (JKBS) atau Jaminan Kesehatan Junjung Besaoh (JKJB)

"Tahun ini (2016) ada penambahan 100 orang untuk di- usulkan. Tahun 2015 pemegang JKBS hanya ada 19 orang, tidak

25 Program Jaminan Kesehatan Bangka Selatan dibiayai melalui mekanisme anggaran APBD. Kebijakan pembiayaan ini mulai dirilis pada tahun 2006.

tahu juga, belum tahu mungkin mereka soal JKBS ini…". (Rollis, 24 Tahun, Kaur Pemerintahan Desa Tukak)

Paket manfaat kedua kartu kesehatan tersebut hampir sama. Bedanya, untuk BPJS masyarakat selalu membayar iuran setiap bulan, sedang untuk JKBS, masyarakat tidak mengeluarkan biaya, karena ditanggung pemerintah daerah. Selain itu dalam pemberian obat, peserta BPJS hanya menanggung obat yang tertera pada katalog, jika kategori obat diluar katalog maka pasien harus membeli.

Paket manfaat kartu JKBS juga menanggung semua jenis obat, termasuk obat di luar katalog. Selain Puskesmas, paket manfaat JKBS juga bisa untuk layanan lanjutan di rumah sakit umum yang telah bekerja sama dengan pemerintah Bangka Selatan. Beberapa rumah sakit yang telah bekerja sama dengan JKBS adalah RS Bakhti Timah, RS Bakhti Waras, RS Satania Sungaliat, RSUD Gadung Bangka Selatan dan Posyandik Toboali.

Pengguna kartu JKBS lebih sering menyebut kartunya sebagai 'Junjung Basaoh' karena kartu tersebut saat pertama diluncurkan pada tahun 2006 bernama Jaminan Kesehatan Junjung Basaoh. Perubahan nama JKJB ke JKBS terjadi pada tahun 2015 akibat proses politik pemenang dalam Pemilihan Kepala Daerah (Bupati).

Hasil wawancara dengan petugas kesehatan menunjukkan mereka lebih condong untuk mensosialisasikan pada masyarakat agar memilih kepesertaan BPJS. "…karena biaya yang dapat diklaim ke pemerintah lebih besar, lumayan buat kita petugas kesehatan, Kalau JKBS sedikit sekali, hehe…," dalih Nuraini (perawat, 35 tahun). Sebuah alasan polos yang cukup manusiawi.

Sedikit berbeda dengan paramedik yang berada di pelayanan, mereka yang berada di administrasi mempunyai pandangan lain;

"…kalau di Bangka Selatan, kebetulan kemarin saya pengurus BPJS juga di Dinas Kesehatan ceritanya hahaha... Saya keberatan, karena BPJS meminta pagu dana yang terlalu tinggi kalau ngga' salah. Sedangkan kartu Bangka Selatan, dana untuk JKBS aja mereka hanya meminta sekitar tujuh miliar kalau nga' salah. Sedangkan BPJS meminta itu untuk masyarakat miskin sekitar 40

Miliar dalam satu tahun. Jadi fasilitas bisa digunakan siapa saja. Jadi Bangka Selatan (masyarakat) setengah mau, setengahnya ga' mau. Tergantung masyarakat masing-masing kan. Kalau JKBS dan BPJS sama saja, tidak ada bedanya karena pengklaimannya lama juga… pelayanannya juga sama…". (Megawati, 39 tahun, Kepala Sub Bagian Tata Usaha)

3.1.5. Sepuluh Penyakit Terbanyak

Pada saat ini perawat yang bertugas di poliklinik umum ada tiga orang. Tugasnya menggantikan peran dokter jika berhalangan hadir atau sedang tugas ke luar. Perawat atau bidan sebagai aktor utama dalam menjalankan tugas sebagai pendiagnosa dalam menentukan jenis penyakit yang diderita oleh si sakit. Bidan menangani pasien dengan kategori umur bawah lima tahun di Poliklinik Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), sedangkan umur enam tahun ke atas dirujuk ke perawat baik itu di UGD atau di Poliklinik Umum.

Diagnosa status pasien dari perawat bersifat kesimpulan yaitu memberi status pasien yang paling mendukung terhadap penyakit, sedangkan dokter lebih detail. Diagnosa dokter sampai ke penyakit dan pemberian resep sedangkan perawat sebatas meneruskan status diagnosa dokter. "Perawat kurang menguasai pemeriksaan fisik pasien…," kata dokter Rudi (35 tahun, Kepala Puskesmas Tiram) mengevaluasi kinerja para perawatnya.

> "Saat periksa pasien dengan keluhan batuk, pilek kami langsung menyimpulkan pasien menderita penyakit ISPA sedangkan dokter lebih spesifik, bisa jadi ada komplikasi atau riwayat penyakit asma. Ada perbedaan juga dalam kode etik dalam hal pengobatan, sebagai perawat kami hanya dapat mengeluarkan resep obat yang bersifat aman seperti obat generik." (Susiana, 38 tahun, perawat poli umum)

Membahas tentang 10 penyakit terbanyak, pemegang program poliklinik umum dan Kepala Puskesmas Tiram menjelaskan bahwa klasifikasi penyakit di Puskesmas Tiram yang selalu dikirimkan ke Dinas Kesehatan sebagai laporan adalah 20 penyakit terbanyak dalam

bentuk catatan manual dan angka. Bukan karena terlalu semangat dalam penulisan laporan bulanan melainkan sudah menjadi format baku dari Bidang Pelayanan Medik Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Selatan.

Berbeda dengan pendapat pemegang program poliklinik umum dan Kepala Puskesmas Tiram, menurut Megawati (39 tahun, Kasubbag Tata Usaha Puskesmas Tiram), yang dikirim sebagai laporan ke Dinas Kesehatan adalah 10 penyakit terbanyak;

> "…dua puluh (wajah heran), dimana tuh lihatnya, ooo begini mungkin sebenarnya yang dilaporkan itu tetap 10 penyakit terbanyak untuk ke Dinas Kesehatan. Mungkin ini (LB 1) untuk tingkat Puskesmas jadi mereka lebih gesit, senang begitu, kadang-kadang penyakitnya tidak ada jadi KLB (Kejadian Luar Biasa) jadi mereka harus siap-siap, tapi yang dikirimkan tetap 10 penyakit terbanyak formatnya ada…".

Laporan tahunan poliklinik umum tahun 2014 dan 2015 awalnya belum ada dan belum direkapitulasi saat diminta. Informan (Susiana, 38 tahun) hanya menunjukan laporan bulanan dengan format 20 penyakit bulan Januari sampai dengan Mei 2016. Tepat tanggal 10 Juni, informan baru menulis rekapan dengan pena pada sehelai kertas yang dilipat beserta laporan bulan Mei tahun 2016. Dalam coretan tangan tersebut memuat tentang 10 penyakit terbanyak sepanjang tahun 2014 dan 2015.

Tabel 3.1. Rekapitulas 10 Penyakit Terbanyak di Puskesmas Tiram Tahun 2014 dan 2015

Tahun 2014	Jumlah Pasien	Tahun 2015	Jumlah Pasien
ISPA	196	Dispepsia	186
Gastritis	102	Febris	170
Hipertensi	98	Hipertensi	170
Dermatitis	78	ISPA	168
Gangguan Gigi	70	Dermatitis	120
Hiperkolesterol	68	Rino Akut	98
Rino Akut	56	Diabetes Melitus	70
Diare	48	Hiperkolesterol	60
Diabetes Mellitus	45	Gangguan Gigi	58
Cepagia	38	Diare	40

Sumber: Laporan Tahunan Puskesmas Tiram Tahun 2015

Menelusuri arsip pencatatan-pelaporan, rekapitulasi 20 penyakit terbanyak dalam Laporan bulanan 1 (LB 1) cukup menimbulkan tanda tanya tersendiri. LB 1 bulan Januari tahun 2016 yang sudah ditandatangani oleh kepala Puskesmas dan pengelola program mencatat bahwa ada kasus kejadian diare sebanyak tujuh orang. Sementara berdasar data register Poliklinik Umum di meja loket pada bulan Januari tahun 2016 tidak ditemukan pasien dengan diagnosa diare pada bulan yang sama.

Berdasar paparan data pada Tabel 3.1 dapat kita lihat bahwa rangking teratas 10 penyakit terbanyak diduduki oleh penyakit yang disebabkan oleh faktor infeksi yang terkait dengan kesehatan lingkungan. Sementara penyakit-penyakit degeneratif semacam hipertensi, hiperkolesterol dan diabetes mellitus, yang lebih banyak disebabkan oleh gaya hidup yang salah, menyelip di antara penyakit-penyakit infeksi. ini adalah cerminan yang sama dengan pola penyakit di negara berkembang, dimana ada beban ganda (*double burden*) yang harus ditanggung, penyakit infeksi belum selesai, sementara penyakit degeneratif sudah mulai bermunculan.

3.1.6. Tentang Petugas Puskesmas

Dari 37 petugas kesehatan di Puskesmas Tiram, ada tiga orang tenaga perawat yang tinggal di Desa Tukak, kesemuanya sudah berkeluarga dengan warga setempat. Sedangkan 34 petugas lainnya tinggal di Toboali (Ibu Kota Kabupaten Bangka Selatan).

Rumah Dinas Puskesmas Tiram saat ini ada sejumlah empat unit, dengan bangunan seperti perumnas. Instalasi listrik pra bayar, saluran air, kamar tidur, fasilitas MCK dan dapur juga tersedia. Meski demikian kelengkapan rumah permanen ini tak mampu menarik perhatian tenaga kesehatan Puskesmas Tiram untuk tinggal. Keberadaan rumah mess hanya mampu menarik satu orang sanitarian asal dari Palembang yang baru menikah dengan seorang TNI yang bertugas di Pangkal Pinang. Sedangkan satu unit lagi dihuni oleh seorang perawat, namun dalam penggunaannya hanya sebatas untuk tidur siang.

Jarak tempuh Toboali sebagai ibukota kabupaten ke Puskesmas Tiram kurang lebih 23 kilometer. Semua tenaga kesehatan di Puskesmas Tiram mempunyai kendaraan pribadi untuk menempuh perjalanan ke Puskesmas, baik sepeda motor roda dua dan mobil.

Sumber: Dokumentasi Peneliti

Gambar 3.4. Rumah Dinas Paramedis Puskesmas Tiram

Alasan utama petugas tidak mau tinggal di wilayah Puskesmas Tiram atau di rumah dinas Puskesmas seringkali dengan alasan karena Desa Tiram yang sepi. “Tinggal di sini? Hahaha… sepi! Ga’ rame… mau lihat apa? Ga’ bisa jalan-jalan, cuci mata. Ga’ deh! Jekis tinggal di Toboali aja deh… pagi baru ke sini,” dalih Jekis (24 tahun).

> “Sebenarnya saya mau tinggal di belakang (rumah dinas), tapi lihat atapnya sudah bolong-bolong (sambil menunjuk atap ruang kerjanya yang sudah lapuk dan berlubang). Padahal ini proyek gedung baru dikerjakan dua tahun lalu. Sama seperti rumah belakang itu kan saya lihat-lihat aduh plafonnya sudah begitu, tiba-tiba kalian lagi tidur atau lagi nyantai di teras atapnya jebol, bagaimana?... disana sih sepi… ga bisa buka praktik.” (Rudi H., 35 tahun)

3.2. Konsep Sehat-Sakit dan Pola Pencarian Pengobatan etnik Bugis di Desa Tukak

Kata ‘sehat’ secara bahasa merupakan antonim dari kata ‘sakit’, sedang pengertian sakit dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berasa tidak nyaman di tubuh atau bagian tubuh karena menderita sesuatu (demam, sakit perut, dan sebagainya). Seringkali konsep sehat dan sakit dalam secara emik berbeda dengan konsep secara etik.

Konsep sakit yang berlaku di masyarakat etnik Bugis di Desa Tukak pun mirip secara konsep dengan konsep sakit di beberapa etnik lain di Indonesia. Diare misalnya, saat diare tahap awal akan dianggap kondisi yang biasa saja, tidak sakit, tetapi apabila sudah parah, sudah lemas dan tidak bisa bangun, barulah disebut sakit. “Yaa… tetap turuun, mau gimana lagi. Ya dikuat-kuatkan… namanya juga kerja…,” Ujar Asse (30 tahun).

> “Kalau terasa tidak enak badan ya dipaksa-paksa pak. Kalau masih bisa jalan ya turun (melaut)… kan ya mau makan apa kalau tidak turun… kalau sudah tidak bisa bangun itu baru bilang sakit. Tidak turun…” (Rustam, 41 tahun)

Sementara Pawi (67 tahun), nelayan etnik Bugis paling senior di wilayah pemukiman pantai memiliki konsep tersendiri bagi dirinya sendiri tentang sakit. “Kalau saya sudah muntah-muntah, sudah sakit itu… sudah cepat-cepat pulang saja…,” jelas Pawi.

Sedikit berbeda dengan diare, saat seorang etnik Bugis di Desa Tukak mengidap sakit kulit semacam dermatitis, maka tetap dianggap bukan sakit. Hal itu sudah biasa bagi etnik Bugis yang tinggal di wilayah pantai ini.

> “Kalau di sini udah biasa sakit kulit. Anak-anak biasa kek gitu. Ya pake bedak aja ditabur waktu selesai mandi. Tapi kalau ga sembuh-sembuh, masih gatal-gatal terus atau tambah banyak ya beli salep dari pak Sulaiman.” (Ani, 29 tahun)
>
> “Biasa aja… kalau anak-anak gatal ya mandi lagi. Soalnya biar dilarang tetaplah mandi. Ada yang dikasih bedak gatal sama

salep beli di warung. Ada salep gatal-gatal. Cuma itu, ga ada yang dibawa ke mantri atau rumah sakit. Hahaha...” (Linda, 23 tahun)

Apabila orang Bugis di Desa Tukak sedang merasa sakit, maka langkah awal yang dilakukan adalah melakukan swa medikasi, mengobati diri sendiri terlebih dahulu. Seringkali membeli obat bebas di warung adalah langkah terapi awal yang dilakukan.

Bila langkah pertama tidak sembuh atau tidak mendapatkan perubahan kondisi yang berarti, maka tahap selanjutnya, beberapa orang Bugis seringkali meminta jampi-jampi. Langkah ke dua ini berhubungan dengan seorang *sandro. Sandro* adalah seorang dukun atau pengobat tradisional etnik Bugis. Pada tahap ini biasanya *sandro* memberikan air putih yang sudah dijampi-jampi, atau terkadang juga memberikan tambahan ramuan tertentu untuk diminum atau dioleskan pada bagian tertentu.

> “Dikasih obat warung dulu. Kalau ga sembuh ya dijampi-jampi. Kalau ndak sembuh dijampi ya baru dibawa ke dokter. Kalau anak ga tahan ya langsung lari ke dokter. Pernah anak muntaber tiga hari baru dibawa ke RS Toboali. Sebelumnya ya di rumah ajaa…”. (Murni, 43 tahun)

Pada beberapa orang Bugis sudah tidak lagi percaya atau tidak mau berobat ke *sandro*. Bahkan orang yang dianggap masyarakat sebagai *sandro* sudah tidak diakui lagi. Apabila penyakit dirasa cukup berat, maka mereka langsung menghubungi atau datang ke tenaga kesehatan. “Sudah tidak ada *sandro* di sini (Desa Tukak), ada itu di (desa) Tiram. Kalau saya sakit yaa… itu ke pak Yanto (perawat) di Tiram…,” jelas Idrus (50 tahun).

> “…kalau sudah terlalu sakit misal minum obat ga sembuh-sembuh dibilangnya malaria. Kalau diarenya udah terlalu parah ya ga ke rumah sakit. Paling kaya nenek aku itu yang di sana, dipanggil aja mantrinya, baru diinfus di rumah.” (Ani, 29 tahun)

Konsep sakit menurut etnik Bugis di Desa Tukak ini mirip dengan konsep sakit yang dimiliki oleh etnik Baduy Dalam. Meski etnik Baduy Dalam memaknai sakit tidak hanya sakit secara fisik saja,

melainkan juga sakit secara psikologis, tetapi mereka beranggapan secara fisik dikatakan sakit apabila sudah mengganggu aktivitas keseharian, seperti tidak bisa pergi ke huma atau ladang. Jadi selama masih bisa melakukan kegiatan sehari-hari maka kondisi badan demam, lemas atau lesu belum dikatakan sakit[26]. Konsep sakit yang sama juga berlaku pada etnik Jawa di Kabupaten Bantul[27] dan etnik Muyu di Mindiptana, Kabupaten Boven Digoel[28].

Bila kita membandingkan pola pencarian pengobatan etnik Bugis di Desa Tukak dengan etnik Gorontalo di Desa Dulupi, maka ada perbedaan urutan pola. Pada etnik Gorontalo, mereka ketika pertama kali merasa sakit akan menghubungi pengobat tradisional, baru bila tidak ada perubahan akan membeli sendiri obat di warung. Urutan satu-dua inilah yang membedakan kedua etnik tersebut, meski pada urutan ketiga keduanya pada akhirnya sama-sama mencari pengobatan ke fasilitas kesehatan atau tenaga kesehatan[29].

3.3. Akseptabilitas Masyarakat Desa Tukak Terhadap Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Tiram

Pengertian akseptabilitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “Hal dapat diterima; keberterimaan”[30]. Sedang pengertian akseptabilitas pelayanan kesehatan menurut Badan Kesehatan Sedunia (WHO) adalah karakteristik dan kemampuan pelayanan kesehatan (meliputi masalah jenis kelamin, bahasa, budaya, usia, dll) untuk mengobati semua pasien dengan bermartabat, menciptakan

---

26 Baca Ipa, M., Prasetyo, D.A., Arifin, J., Kasnodihardjo (2014). *Balutan Pikukuh Persalinan Baduy*. Lembaga Penerbit Balitbangkes, Jakarta. Halaman 144.

27 Periksa Kristiana, L., Murwanto, T., Dwiningsih, S., Sapardi, H., Kasnodihardjo (2012). *Buku Seri Etnografi Kesehatan Ibu dan Anak 2012. Etnik Jawa, Desa Gading Sari, Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*. Pusat Humaniora, Kebijakan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Surabaya. Halaman 33-35.

28 Periksa Laksono, A.D., Faizin, K., Raunsay, E.M., Soerachman, R. (2014). *Perempuan Muyu dalam Pengasingan*. Lembaga Penerbit Balitbangkes, Jakarta. Halaman 190-207.

29 Periksa Ningsi, Nggeolima, R.A., Hamzah, S., Handayani, L. (2014). *Rekam Jejak Terengi.* Lembaga Penerbit Balitbangkes, Jakarta. Halaman 197.

30 Pelacakan istilah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia juga bisa dilakukan secara *online* (daring) melalui alamat. http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/kbbi/. Situs ini dikelola oleh Pusat Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.

kepercayaan, dan meningkatkan permintaan untuk layanan[31]. Dalam konteks buku ini akseptabilitas pelayanan kesehatan diartikan sebagai kemudahan masyarakat menerima pelayanan yang disajikan oleh fasilitas pelayanan kesehatan yang tersedia.

Jadwal pelayanan pelayanan di Puskesmas Tiram dilakukan pada hari Senin sampai Kamis dimulai pada pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB. Khusus hari Jum'at ditutup pada pukul 11.00 WIB, sedang hari Sabtu Pelayanan berakhir pukul 13.00 WIB. Tidak ada jadwal pelayanan selain jadwal tersebut di atas, pada malam hari misalnya.

Berbagai upaya untuk mempromosikan layanan kesehatan Puskesmas Tiram telah dilakukan, namun belum menemui titik temu yang pas dalam menarik minat masyarakat. Saat pasien datang berkunjung ke Puskesmas Tiram, harapan untuk sembuh merupakan hal yang mutlak. Pelayanan kesehatan yang ingin dirasakan adalah pelayanan yang cepat dan memuaskan hati. Di Puskesmas Tiram dalam satu bulan rata-rata kunjungan tidak sampai 50 pasien. Bulan Mei 2016 misalnya, hanya ada 175 orang yang berkunjung. Sementara satu bulan sebelumnya, bulan April 2016, hanya ada 196 kunjungan[32], artinya secara rata-rata per hari hanya ada tujuh sampai delapan kunjungan saja. Dengan jumlah petugas yang mencapai 37 orang di Puskesmas Tiram, tentu saja kondisi ini menjadi timpang, tidak efisien.

Berbicara tentang pelayanan kesehatan di Puskesmas seakan bicara tentang muramnya wajah pelayanan kesehatan di mata masyarakat. Perspektif yang dilontarkan masyarakat dan tokoh masyarakat seakan tidak nyambung dengan apa yang ada di benak petugas kesehatan. Berikut beberapa pernyataan dari Kepala Puskesmas dan tokoh masyarakat Desa Tukak.

---

31 Periksa Global Health Workforce Alliance, WHO (2016). *What do we mean by availability, accessibility, acceptability and quality (AAAQ) of the health workforce?* WHO, Geneva. Tersedia pada laman http://www.who.int/workforcealliance/media/qa/04/en/

32 Data didapatkan secara langsung dari penghitungan secara manual oleh peneliti pada register Puskesmas Tiram.

“Masyarakat sudah tahu adanya Puskesmas, tetapi memiliki kekurangan karena bukanya hanya sampai siang saja. Sedangkan masyarakat malas karena harus bekerja di siang hari sedangkan sakit bisa datang kapan saja sehingga masyarakat lebih memilih untuk pergi ke mantri karena bisa kapan saja. Jam bukanya yaitu malam selasa dan malam jumat. Masyarakat tidak mau repot-repot mengantri di Puskesmas mereka lebih milih ke mantri karena dinilai mudah. Meskipun Puskesmas murah harganya tetap saja masyarakat memilih untuk pergi ke mantra.” (Rudi, 35 tahun, Kepala Puskesmas Tiram)

“Di sini orang lebih nyaman pergi ke mantri karena mantri bisa datang ke rumah. Gak perlu surat-menyurat kan praktis. Meskipun harga beda dan lebih mahal tetap aja orang milih ke mantri karena bisa cepat, periksa, kasih obat, pulang. Sekali berobat ke mantri, mereka dikenakan tarif Rp. 30-50 ribu setiap periksa.” (Baharudin, 49 tahun, Kaur Pembangunan Desa Tukak)

“Di Puskesmas Tiram pasien diperhatikan tapi tidak maksimal, kadang-kadang pasien sudah parah tapi seolah-olah acuh tak acuh, sebagai seorang tenaga kesehatan itu beda, apalagi BPJS dokter-dokter itu lebih murah, yang pasti informasi dari pelayanan itu harus jelas diberi solusi dulu, kalo belum lengkap itu disuruh tunggu, disuruh ambil ini dan itu. Mereka tidak memperhatikan, kalo administrasi mereka jalan, kalo kemampuan prinsip pelayan dipercepat kenapa diperlambat. Terlalu kaku lah. Menyangkut kerjasama Puskesmas dengan desa itu nah tidak ada. Mereka sosialisasi begitu saja, mereka tidak intim. Mereka istilahnya tidak jemput bola apalagi mereka berpikir ah Tukak itu dekat dengan Puskesmas, jadi kalo mengklaim kecil. Satu kilometer lima ribu, sekarang dihitung perkilometer saja, kalo disini kan dua kilometer saja, jadi 10 ribu jadi data-data nya itu semacam sampel saja.” (Holbi, 28 tahun, Ketua Karang Taruna)

“Masyarakat malas pergi ke Puskesmas karena kadang-kadang sakit kepala saja tidak beres. Jadi orang malas ke situ kan. Kadang-kadang kalau udah dijahit di Puskesmas trus dibawa ke Toboali, jahitannya dibuka lagi… ga’ beres itu. Aku juga bisa kalau cuma jahit-jahit kaya gitu, walaupun ga’ ada sekolahnya. Kalau khusus untuk Bangka Selatan ini dalam merawat pasien kurang tapi kalau Bangka Tengah lumayan sih…” (Iswandi, 39 Tahun, tokoh masyarakat)

Pernyataan yang diungkapkan oleh masyarakat pun senada dengan pendapat para tokoh masyarakat. Mayoritas warga di Desa Tukak pun menilai bahwa pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Puskesmas Tiram kurang memuaskan. Selain masalah kepuasan terhadap pelayanan, kemampuan Puskesmas untuk menyembuhkan pun ternyata masih banyak diragukan.

> “Saya ke mantri atau ke Koba (Kabupaten Bangka Tengah) saja, di sana itu bagus… kemarin saya jaga mertua empat hari tidak bayar, petugasnya ramah-ramah, di Puskesmas tidak…”. (Iros, 36 tahun)
>
> “Lebih baik ke Koba (Kabupaten Bangka Tengah) saja. Di Puskesmas mata saya ini dikorek-korek pake korek kuping tidak keluar kotorannya… perawat kerjanya lambat… tidak beres…”. (Aris, 27 tahun)
>
> “Wah tergantung kalo berat langsung ke Toboali dan Pangkal Pinang. Mana bisa orang Puskesmas sini mengurus? Sakit kecil, luka, lecet, sakit kepala, panas dingin, meriang, demam itu bisa ke Puskesmas. Kalau sakit berat seperti encok, kecelakaan patah tulang itu ga bisa…”. (Amir, 27 tahun)
>
> “Penyakit *kulot* itu sering bengkak kaki kena duri laut, ga bisa jalan, itu berat, itu harus dibedah kakinya, ga bisa Puskesmas, aih apa Puskesmas sini, kalo bisul-bisul bisa ngejahit, kalo luka-luka biasa bisa. Ngejahit ga ada benangnya untuk ngejahit dalam bisa, kalo ngejahit luar ga bisa…”. (Anca, 27 tahun)
>
> “Ke mantri saja kita, di Puskesmas ga’ ada orangnya di tengah hari. Kita kan nelayan… jadi waktu pulang sore atau malam, Puskesmas kan sudah tutup… sudah tidak ada pelayanan.” (Asse, 30 tahun)
>
> “Saya ada kartu BPJS, tapi kartu ini hanya berlaku dari pagi sampai jam satu siang saja, tuh buktinya mertua saja ke Puskesmas tidak dilayani, katanya petugas BPJS sudah pulang, jadi harus bayar, padahal kan gratis kartu ini…”. (Ani, 29 tahun)

Di sisi lain, masalah pencatatan-pelaporan juga dinilai sebagai hal yang menambah kerumitan, meski sebenarnya kegiatan ini penting untuk kepentingan Puskesmas dalam hal pemantauan penyakit. “Saya malas ke Puskesmas situ karena harus masuk ruang

inilah pindah lagi ke ruang lain, ngurus surat-surat, malas saya," ujar Emma (27 tahun). Hal inipun di-amin-i oleh Agus (30 tahun), "Pergi ke mantri saja di Puskesmas itu kurang cepat, harus urus surat…".

Akseptabilitas masyarakat Desa Tukak terhadap pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Puskesmas Tiram memang dirasa kurang memuaskan, tetapi akseptabilitas ini berubah saat mereka berhubungan dengan tenaga kesehatan di rumah pribadinya. Sekalipun 'perang dingin' terhadap pelayanan kesehatan dari Puskesmas Tiram namun mereka tetap mempercayakan pengobatan ke tenaga kesehatan, yaitu mantri. "Di mantri itu obatnya lebih ampuh dari Puskesmas, sekali *basuntik* sembuh, bayarnya Rp. 50.000 ke atas kalau *basuntik*… tapi langsung sembuh," dalih M. Yusuf (35 tahun). Mantri yang dimaksud adalah seorang perawat yang dirasakan mempunyai keahlian dan ketrampilan dalam pengobatan medis, meski sebenarnya secara etik bukan kompetensinya.

Mantri yang dimaksud masyarakat sebenarnya juga bekerja di Puskesmas Tiram sebagai perawat, dan berdomisili di Desa Tukak. Untuk panggilan, jadwal pelayanan menyesuaikan dengan permintaan pasien. Tersedia juga etalase berisi obat-obat medis di ruang praktiknya.

> "Iya pak… masyarakat sini memang manja, mereka kalau berobat maunya manggil. Maksud saya itu mereka supaya mau datang ke sini, tapi yaitu… manja. Maunya panggil ke rumah… saya sih 24 jam saja…" (Sulaiman, 35 tahun, perawat)

Mahir berbahasa Bugis serta memiliki ikatan kekeluargaan dengan sebagian warga, membuat tingkat kepercayaan terhadap mantri menjadi tinggi. Apalagi dengan jam buka praktik yang fleksibel. Penanganan pasien pun dilakukan seorang diri tanpa pengurusan administrasi pencatatan-pelaporan menjadi nilai tambah tersendiri bagi warga. Menurut warga Tukak, biaya yang dikeluarkan oleh pasien di atas 50 ribu untuk sekali berobat. Biaya itu meliputi biaya injeksi dan obat.

Sumber: Dokumentasi Peneliti

Gambar 3.5. Ruang Praktik Mantri Kesehatan

Tidak hanya seorang perawat saja yang membuka layanan pengobatan bagi masyarakat, dua orang perawat Puskesmas Tiram lainnya, serta beberapa bidan turut membuka praktik pelayanan di wilayah Desa Tukak. Bahkan seorang perawat senior lulusan SPK yang membuka praktik di lain desa, Desa Tiram, juga menjadi tujuan dari beberapa masyarakat Desa Tukak yang sedang sakit dengan pertimbangan harga yang lebih terjangkau dan senioritas.

3.4. Usaha Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat

Usaha Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat, atau biasa disingkat UKBM adalah segala bentuk kegiatan kesehatan dari, oleh dan untuk masyarakat. Kegiatan difokuskan pada upaya survailans berbasis masyarakat, kedaruratan kesehatan dan penanggulangan bencana serta penyehatan lingkungan.[33]

33 Periksa Pusat Promosi Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI. (2016). *Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengembangan UKBM*. Kementerian Kesehatan RI., Jakarta. Tersedia pada laman http://promkes.depkes.go.id/pemberdayaan-masyarakat

Ada dua hal yang menarik dan menjadi catatan bagi tim peneliti terkait kegiatan UKBM di wilayah Desa Tukak. Dua hal tersebut adalah kegiatan *spionase* untuk menanggulangi permasalahan janda di bawah umur dan *ngerumpi* tentang Posyandu.

3.4.1. *Spionase* untuk Menanggulangi Fenomena Janda di Bawah Umur

Maraknya pernikahan dini anak usia sekolah, *free sex* dan penggunaan narkoba menjadi latar belakang pemerintah Kabupaten Bangka Selatan mengaktifkan progam kesehatan berbasis sekolah. Program tersebut bernama 'Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja'. Program ini hasil kerjasama antara pihak Puskesmas Tiram dengan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) di Desa Tukak melalui guru bimbingan konseling. Sebanyak empat orang guru menjadi tim inti dengan 10 orang 'Agen Rahasia' di lingkungan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Tukak.

Sumber: Dokumentasi Peneliti

Gambar 3.6. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Tukak; Satu-satunya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas di Kecamatan Tukak Sadai

Agen Rahasia? Agen Rahasia adalah anak yang bersekolah di tempat dia ditugaskan, dipilih dengan latar belakang memiliki banyak teman. Selain itu anak yang dipilih adalah yang mempunyai prestasi

di kelasnya. Menurut Alien (Bidan koordinator program Konselor Sebaya), program ini awalnya ada pada tahun 2014 dengan pelatihan kepada para agen rahasia. Belum ada, atau justru tidak ada Surat Keputusan untuk hal ini, karena sifatnya tertutup dan menjaga privasi informan yang bermasalah.

> "Undang-undang (tentang) Perkawinan syaratnya 17 tahun, menurut kesehatan umur yang pas sesuai dengan kematangan reproduksi adalah 20 tahun, kalau di bawah 20 tahun banyak restinya (resiko tinggi), emosi, mental, makanya disini banyak 'jamur', janda bawah umur, akibat pernikahan dini yang menjadi pencetus anemia dan berat badan bayi lahir rendah…". (Alien, 30 tahun, bidan)

Metode komunikasi yang diterapkan untuk berhubungan dengan para agen rahasia di lingkungan sekolah dengan memanfaatkan banyak jalur media social (*Line Telephone*, *Blackberry Messenger* atau Whatsapp) yang dibuka 24 jam. Ada semacam uang pengganti pulsa bagi para agen rahasia. Dana tersebut tergolong kecil. Itupun berasal dari dana pribadi koordinator program di Puskesmas Tiram.

Secara umum, di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) Tukak sudah banyak murid yang mengenal seks bebas. Beberapa orang diantaranya menggunakan obat-obat terlarang, sehingga seringkali terjadi permasalahan terkait dengan pergaulan bebas tersebut.

> "…untuk anak yang dilaporkan bermasalah sudah banyak, macam-macamlah ada yang berkelahi gara-gara putus dengan pacar, sudah *free sex*, hamil, pakai obat terlarang… datanya ada, cuma maaf kami tidak bisa memberikan datanya karena sangat privasi, kami juga menjaga kerahasiaan para agen rahasia di sekolah supaya tidak dimusuhi, dijauhi teman-temannya…". (Alien, 30 tahun)

Suasana remang dengan pemandangan penuh pohon hijau menjadi tempat teduh para remaja putra-putri dalam mengekspesikan kemerdekaan di tengah padatnya jadwal sekolah. Ada sebuah jalan yang dijuluki 'JB' (jalan Baru), di depan Kantor Urusan Agama

Kecamatan Tukak Sadai yang ramai pengunjung. Jalan beraspal dengan trek lurus menjadi ajang balap liar, demi *minta' alo* (istilah lokal untuk mendapatkan perhatian cewek). Ajang balap liar baru akan berakhir seiring bunyi ayam berkokok menjelang pagi hari.

Kalangan muda-mudi Desa Tukak mempunyai istilah tersendiri untuk pacaran, yang disebut dengan '*betunang*'. Istilah popular lain adalah gaya pendekatan dua insan yang dikenal dengan 'cinta lima langkah', untuk jenis menjalin hubungan dengan tetangga terdekat. Malam Kamis dan malam Minggu adalah waktu pertemuan popular bagi muda-mudi Desa Tukak dalam mewujudkan rasa cinta sekaligus melepas rasa rindu. Tidak ada larangan dari orang tua dalam menanggapi fenomena kawula muda ini sejak dahulu, meski mereka mengaku ada ketakutan tersendiri.

> "Di sini bukan takut ga laku, tapi takut kenapa-kenapa anak kita itu kan. Kalau keluar malam dia kan takut gimana. Jadi daripada nanti bikin pusing ya dinikahkan aja biar aman. Nah karena banyak yang dijodohkan orang tua, tapi anaknya ndak ingin... jadi cerai, padahal masih muda." (Murni, 43 tahun)

Praktik perjodohan memang masih lumrah terjadi pada etnik Bugis di Desa Tukak. Meski sesekali ada juga yang berontak, menolak untuk dijodohkan.

> "...ada untuk perjodohan. Kalau yang melayu tidak. Menurut saya jika ada anak boleh menikah umur 17, ada yang 15 dijodohkan. Dijodohkan sudah kesepakatan dengan orang tua. Dijodohkan sama kenalan saudara, bukan kecil-kecil, bukan bayi juga, sudah besa-besar. Kalau anak masih sekolah ada juga, tergantung dari anak, kalau misalnya anaknya ga' mau, bisa batal juga, ada juga yang menolak. Ya amanah dari orang tua, ga melawan lah mereka...". (Amir, 27 tahun)

Sementara Samsir (23 tahun) dan Lita (20 tahun) pasangan suami istri etnik Bugis yang mengaku menikah muda, justru merasa bahwa menikah muda itu sudah seperti 'keturunan' (herediter), karena orang tua mereka pun juga menikah muda. Justru orang tua merekalah yang mendorong untuk bersegera menikah.

> “…dari umur 16 tahun istriku menikah, saya 19 tahun, ga’ dijodohkan, menikah sama-sama suka to, biaya nikah 14 juta habis. Pergi sama Asse kemarin pergi lamar di orang tuanya dia, bilang ke saya cepat-cepat menikah, usahalah cepat-cepat, tidak semua (menikahkah muda), aku ga’ sekolah, di laut, istriku ga sekolah, ketemu di pinggir jalan, ada band, itu ada acara-acara di pinggirir jalan kan ada band, ketemu disana, *betunang* (pacaran) 11 bulan, kalo jodohnya ya, pengaruh orang tua sudah keturunan, orang tua muda-muda sudah nikah, baru belasan udah menikah, keturunan Arung Palakka (raja orang Makassar), cuman jaman sekarang kan menikah muda, uang itu kumpul-kumpul sama keluarga, kemarin saya pengangguran, kalo pegang uang pergi habiskan uang saja, sudah habis baru kerja lagi, sekarang anak sudah dua anak, yang pertama dua setengah tahun, yang satu ini belum nyampe satu tahun. Kita telpon-telponan dengan dia sebelum datang, (setelah datang lamar) saya tidak diberitahu orang tua, tapi sudah tau dari telepon kan, ya mau lah, sudah kenal…”

Pada umumnya mahar untuk perkawinan etnik Bugis di Desa Tukak cukup tinggi. Angkanya mencapai 30 sampai 50 juta rupiah, tergantung permintaan keluarga perempuan.

Prinsip perkawinan warga Bugis adalah jenis perkawinan endogami. Pengertian endogami menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah prinsip perkawinan yang mengharuskan orang untuk mencari jodoh di lingkungan sosialnya sendiri, misal di lingkungan kerabat, lingkungan kelas sosial, atau lingkungan pemukiman. Pengertian lainnya adalah proses reproduksi secara perkawinan antar individu yang sangat dekat kekerabatannya[34]. Prinsip perkawinan endogami di Indonesia juga bisa kita temukan pada etnik Banjar.

3.4.2. *Ngerumpi* tentang Posyandu

Desa Tukak hanya memiliki satu Posyandu dengan jadwal pelaksanaan setiap tanggal 15 setiap bulan. Cakupan Posyandu meliputi

---

34 Periksa Pusat Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Pelacakan istilah juga bisa dilakukan secara *online* (daring) melalui alamat. http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/kbbi/

dua dusun dan lima Rukun Tetangga. Letak Posyandu yang berada di ujung desa membuat semua ibu membonceng balitanya sendiri dengan sepeda motor dan memenuhi halaman Kantor Desa Tukak. Harapan para ibu balita etnik Bugis yang tinggal pesisir agar Posyandu berada di tengah-tengah pemukiman Desa Tukak sehingga menurut mereka lebih adil dalam hal jarak tempuhnya.

Hasil wawancara, lebih tepatnya *ngerumpi*, tentang dengan para ibu etnik Bugis yang tinggal di pesisir menuai reaksi yang beragam, penuh dengan pro dan kontra, yang ditunjukkan dengan gaya khas ibu-ibu. Beberapa menunjukkan antusiasme keikutsertaan para ibu balita dalam Posyandu yang cukup membuat bangga.

> "Saya pergi terus, rajin lah, nama kader itu ibu Opiah, setiap tanggal 15 datang ke Posyandu. Dapat kacang hijau, susu, kue… macam-macamlah, anak juga ga' sakit, ada vitaminnya…". (Iros, 36 tahun, menikah dari umur 17 tahun, baru punya satu anak batita)
>
> "Anak sudah tiga sekarang, paling bungsu ini 2,5 tahun, rajin terus pergi ke Posyandu, kalau ke Posyandu itu anak tidak akan sakit-sakitan karena dapat vitamin, kalau kita ga pergi nanti kadernya datang kasihkan di rumah…". (Telima, 35 tahun, memiliki satu anak balita)

Sumber: Dokumentasi Peneliti

Gambar 3.7. Pelaksanaan Posyandu di Desa Tukak

Sementara beberapa ibu balita mempermasalahkan soal penempatan Posyandu yang berada di ujung desa, dan ternyata ‘jarak yang adil’ cukup berpengaruh terhadap angka partisipasi di Posyandu. Meski sebenarnya pelayanan kader di Posyandu sudah cukup ramah, setidaknya menurut para ibu balita tersebut.

> “Harusnya Posyandu di tengah-tengah kampung, masa di ujung kampung sana, jauh. Aku malas datang jauh-jauh cuma ditimbang doang. Iya… sudah lengkap imunisasi juga. Dulu dari mulai hamil sampai 10 bulan ke Posyandu… ga’ pernah dapat kelambu, hanya dapat obat…” (Ani, 29 tahun, memiliki anak kembar berusia empat tahun)
>
> “Sudah satu tahun ga’ ke Posyandu karena Velma takut… menangis, umurnya sekarang satu tahun 11 bulan. Waktu kecil, itu ada diberi makan agar-agar, susu, sekarang ga’ pergi ke Posyandu lagi. Sudah malas, sudah suntik dua kali, jadi sekarang cuma ditimbang saja. Pelayanannya bagus, kalo mau disuntik orangnya megang-megang…”. (Linda, 23 tahun, memiliki satu anak balita)

Di sisi lain, para ibu rumah tangga yang juga mengambil pekerjaan sebagai pengupas ketam kadang merasa berat meninggalkan pekerjaannya tersebut. Karena tidak mengupas ketam, berarti tidak ada tambahan penghasilan. Sebuah pilihan yang sulit.

> “Tidak pernah ke Posyandu, sekali ke Posyandu, sekali kubawa demam, ga pergi lagi. Kalo Wansa dulu sering. Kalo kita ga pergi dia datang. Dulu kita ga’ pergi dia ga’ datang. Kalo ada motor pergilah, kalo ga’ ada ga’ pergi… jauh. Petugas sering datang juga kasih tahu setiap tanggal 15 hari Posyandunya apalagi harus kupas ketam, ga’ pergilah…”. (Ida, 36 tahun, memiliki dua balita)

Working moms or stay a home moms? Saat mendengar semua ibu mengatakan ‘tidak bekerja’ rasanya kurang tepat, padahal seharian penuh dalam balutan celana pendek, menyiapkan sarapan, antar-jemput anak sekolah, mengupas ketam dengan polesan bedak dingin di wajah, mengatasi kenakalan anak, menyiapkan bekal suami untuk melaut, membayar tagihan tukang kredit harian, menimbang dan menunggu pembayaran dari bos kepiting saat mengangkut

hasil olahan daging *ketam*, menjual hasil tangkapan suami jika hasil melimpah, merapikan ruangan rumah dan menidurkan anak sambil menyusui. Jika diamati inilah letak keseruan aktivitas ibu-ibu balita di pesisir pantai Tukak. Berharap ada kisah lain 'menjadi ayah itu seru' yang dapat menandingi kehebatan mereka.

3.5. Kejadian dan Faktor Resiko Cedera

Kecelakaan kerja dalam proses melaut bagi para nelayan Bugis di Desa Tukak sudah menjadi hal yang biasa, terutama pada musim angin Utara pada bulan Desember dan Januari. Antusias mereka (para nelayan) bercerita tentang ngerinya suasana di lautan saat itu, yang mengakibatkan banyaknya nelayan Bugis Tukak yang hanya pulang nama saat berlayar.

> "Saya takut sekali kalau sudah ombak besar itu pak! Wuiihh… ada yang hilang waktu itu. Saya ikut mencari itu selama beberapa hari, dibantu itu dengan kapal cepat dari perikanan… lama baru ketemu. Itu kapalnya ada pak, *handphone* juga ada di kapal, tapi orangnya tidak ada, terlempar ombak. Seringkali seperti itu pak…"
> (M. Yusuf, 36 tahun, nelayan)

Para nelayan menganggap kematian sudah merupakan nasib. Itulah resiko menjadi nelayan, mereka tak merasakan cuaca sebagai kendala. Peristiwa kecelakaan kerja semacam itu adalah hal yang biasa. Kejadian itu cukup saja sebagai pembelajaran untuk bertindak lebih hati-hati. "Ya mau gimana lagi, kalau tidak turun (melaut) nanti tidak bisa makan…," dalih Asse (30 tahun, nelayan).

Kejadian lain akibat kondisi lingkungan menimpa seorang bocah perempuan, yang meninggal akibat jatuh dari rumah panggung kemudian terseret arus. Hal ini terjadi sebelum pembangunan *talud* (dam penahan ombak) dilakukan. Hal ini pun sudah mulai dilupakan warga etnik Bugis yang tinggal pesisir. Beberapa nelayan yang di-mintai keterangan pun menjawab seakan hal yang sudah jamak terjadi, biasa saja. "Ooo… itu anaknya pak Jamal, sudah pindah

ke Riau. Lama itu kejadiannya…,” tutur Amir (27 tahun). Beberapa nelayan lain pun akhirnya menimpali;

> “Rata-rata perumahan di pinggir laut itu di dalam laut iya ga’. Jadi angka kecelakaan itu tinggi. Nah kita juga sedang memikirkan pengalaman tahun berapa itu pernah terjadi pas air pasang dalam, ngasuh anaknya kan, anak jatuh dan meninggal. Tahun berapa itu lupa saya…”. (Ardan, 55 Tahun)
>
> “Oo… itu lama sekali kejadianya, sudah hampir tujuh tahun lalu, bocah perempuan ga tau lah umurnya berapa? Sekitar enam apa tujuh tahun… waktu itu belum ada *dam* ini, pas air pasang, banjir besar naik sampai sini, ga’ tau juga kejadiannya. Katanya anak itu main-main sendiri di air terus terseret arus, orang tuanya juga ga’ tau, kita cari tapi ga ketemu, lama itu tiga hari baru ketemu…”. (Yoga, 36 tahun)
>
> “… itu anaknya pak Jamal, budak perempuan (anak kecil). Mamanya lagi putar musik DJ (sejenis *house music*) sambil tidur. Kan siang apa sore itu jadi ketiduran. Kirain anaknya di dalam rumah jadi tidur lah dia (ibunya). Air besar… belum ada yang ini (menunjuk *talud*). Masih rumah panggung juga seperti kita, tapi di darat situ (tepat kejadian perkara ±10 meter dari bibir *talud*). Mainnya di belakang rumah. Jatuh kebawa arus. Mayatnya tiga jam baru ketemu. Mayatnya ketemu di hutan bakau sana (sambil menujuk arah Timur)...”. (Lena, 20 tahun)

Para ibu balita seringkali cemas dengan keberadaan anak-anak tanpa pengawasan, terutama saat mereka bermain di belakang rumah panggung jika air pasang besar. Kecemasan tersebut hadir karena dirasakan rumah panggung tidak kuat. Kerapatan lantai antar papan tidak saling menutup satu dan lainnya, terkadang sudah lapuk. Air pasang mulai meninggi di area rumah panggung dari sore hari hingga sampai waktu menjelang subuh.

Sumber: Dokumentasi Peneliti

Gambar 3.8. Lingkungan Pemukiman Nelayan yang Sangat Beresiko sebagai Penyebab Cedera bagi Anak-anak

Salah satu permainan favorit anak-anak Bugis di pesisir Desa Tukak adalah *cenggong-cenggong* atau *pance,* yang mirip dengan permainan petak umpet di wilayah lain. Satu orang menutup mata, sementara teman-temannya yang lain berlarian mencari tempat rahasia untuk menyembunyikan dirinya di sela-sela rumah panggung. Proses kemenangan dilakukan dengan mencari dan menangkap teman, kemudian penentuan kemenangan dilihat dari siapa yang tercepat berlari sampai pada pos penjagaan. Sebuah permainan mengasyikan yang cukup beresiko cedera saat dilakukan di lingkungan perkampungan nelayan Desa Tukak.

Mereka berlarian di atas *jerambah-jerambah* (jembatan-jembatan rumah) dan setiap sudut rumah pangggung. Beberapa anak terjatuh, beberapa lainnya tersangkut di celah-celah papan pijakan. Tangisan anak saat terjatuh kadang tidak dihiraukan para ibu, karena sedang sibuk dengan aktivitas mengupas kepiting, atau justru aktivitas sepele semacam sedang menonton sinetron saat malam.

Seorang ibu, Ida (36 tahun), menuturkan bahwa apabila anak jatuh nanti bangun sendiri, paling menangis. Sementara seorang bapak, Dika (23 tahun), mengatakan jika anak jatuh ke bawah nanti temannya tertawa, si anak nanti akan naik sendiri itu ada tangga di

sebelah. Terlihat miris saat melihat mereka berlompatan dia atas jalan papan yang sudah lapuk, namun justru para orang tua berkata, “Jangan kuwatir kau, mereka sudah biasa…,” dalih Asse (30 tahun), sambil terkekeh.

Sumber: Dokumentasi Peneliti

Gambar 3.9. Terjatuh dengan Bibir Cedera saat Bermain *Pance*

3.6. Aktivitas Pengelolaan Sampah di Desa Tukak

Desa Tukak telah menjalankan operasional angkutan sampah sejak bulan Maret 2015. Tujuan utamanya adalah sebagai wujud kepedulian kebersihan lingkungan desa. Hal ini juga merupakan tindak lanjut terhadap bantuan tong sampah yang telah dibagikan tahun 2014 kepada setiap rumah baik di darat maupun di wilayah pesisir.

Pengadaan kendaraan operasional sampah berupa sepeda motor roda tiga dengan bak pengangkut di bagian belakang. Pengadaan kendaraan operasional sampah ini ditujukan untuk lima desa di Kecamatan Tukak Sadai. Masing-masing mendapatkan satu unit.

Sumber: Dokumentasi Peneliti

Gambar 3.10. Kendaraan Operasional Pengangkut Sampah di Desa Tukak

Ada dua tenaga kontrak yang bertugas sebagai tenaga pengangkut sampah yang berasal dari desa setempat. Jadwal kerja pengambilan sampah setiap seminggu sekali. Mereka mendatangi dan mengambil setiap sampah dari bak sampah di rumah masing-masing warga.

Hingga saat ini, saat penelitian berlangsung, operasional pengelolaan sampah tersebut sudah berjalan satu tahun dua bulan. Seiring berjalannya waktu kegiatan pengangkutan sampah saat ini dihentikan, karena terkendala masalah mekanis dengan mesin motor, dan juga kendala administrasi.

Menurut Firman (30 tahun), upah yang diterima tenaga kontrak pengangkut sampah sebesar Rp. 500.000,- dipotong pajak Rp. 25.000,- setiap bulan. Meski upah tenaga kontrak pengangkut sampah Desa Tukak jauh dari upah minimum regional (UMR), tetapi tetap dikerjakan sebagai tambahan penghasilan keluarga. Kebetulan informan tenaga kontrak pengangkut sampah juga memiliki pekerjaan lain sebagai penjaga malam di Puskesmas Tiram.

Pengelolaan sampah merupakan proses pengambilan dan pengangkutan dari tempat sampah rumah tangga ke tempat pem-

buangan akhir. Dalam aktivitas ‘ambil-angkut-buang’ yang dikerjakan petugas kontrak setiap minggu tanpa menggunakan alat pelindung diri. Alat pelindung diri yang diharapkan adalah masker wajah dan sarung tangan. Keperluan sepatu boot tidak terlalu disinggung karena rata-rata sampahnya sudah dikemas dalam bungkusan plastik. Kebutuhan Alat pelindung diri sudah pernah disampaikan ke pihak desa namun sampai saat ini belum terealisasikan.

> “Buang sampah itu susah kawan, bau busuk, berat. Keliling tak tentulah, misal teman ada kerja, tunda besok baru ambil, buang di tanah *kuru* (tanah milik desa). Kerja jam tujuh pagi habis jam satu siang. Bisa angkat bak motor tapi mau buang ndak pas dengan mulut bak tempat pembuangan itu… ahh tumpah berantakan di jalan semua, angkut lagi, pake tangan tidak ada sekop, waduhh, ada yang softek, pempers ada tainya, asal *move on* kawan. Setelah tiga bulan jalan, aku mengeluh kawan, terus putar-putar cari jalan masuk hutan ada tuh lubang besar. Hutan belakang sana, kalau tempat baru itu kerja jam 10 pagi habis.” (Firman, 30 tahun)

Pekerjaan pengelolaan sampah di Desa Tukak termasuk jenis gampang-gampang susah. Hal ini tak lepas dari perilaku warga dalam mengelola limbah rumah tangga. Tong sampah plastik yang disediakan kurang dimanfaatkan. Informan mengakui bahwa tumpukan sampah paling banyak terdapat di wilayah RT 05 dan RT 01 yang merupakan basis pemukiman etnik Bugis. Akibat banyaknya sampah menumpuk di bawah pemukiman rumah (rumah panggung di atas pantai), dua titik tersebut menjadi dilema tersendiri bagi dua orang kru motor sampah.

> “Sampah-sampah yang paling banyak adalah RT 05 tambah RT 01 waduh itu *full*. RT 01 Bugis, RT 05 Bugis, yang pertengahan ini Melayu, ada sih Bugis tapi hanya satu dua rumah. Kalau yang RT 05 baru isi berapa rumah sudah full sampah. Aku ambil cuma yang di bak sampahnya. di kolong rumah banyak sampah. Warganya nga’ nyadar diri, apa gitu kan kotor ndak diisi, saya sudah pernah bilang, coba di sapu, taroh di tong sampah atau karung nanti kami ambil. Kalau bersih kan enak kita ambil dan

cepat, untuk Desa Tukak satu kali angkut. RT 01 sampai dengan RT 04, buang sampah juga banyak tapi ke hutan. Tapi kalau RT 05 langsung ke laut." (Firman, 30 tahun, tenaga pengangkut sampah)

Kehadiran motor sampah dengan dua orang tenaga kebersihan tak bisa berbuat banyak. Motor pengangkut sampah hanya fokus pada tempat sampah. Pemukiman warga darat berdekatan dengan hutan sehingga sampah langsung dibuang ke kawasan tersebut. Tidak ada papan pengumuman dilarang membuang sampah di seputaran desa. Ketiadaan tong sampah ukuran besar masih menjadi masalah vital bagi rumah-rumah nelayan dan tempat santasi umum.

Tumpukan bekas bungkus deterjen dan makanan ringan terlihat banyak tergeletak pada area pemandian Air *Tumbek* di RT 03. Sementara kolong rumah-rumah panggung di pesisir pantai sangat terasa bernuansa sampah. Hal tersebut menandakan bahwa kesadaran menjaga kebersihan sanitasi umum masih rendah.

Seringkali dirasakan kemajuan Desa Tukak ditentukan dengan adanya slot anggaran dari kabupaten, macam dana operasional pengelolaan sampah misalnya. Jika dana dari kabupaten tidak turun, maka aparat desa tidak ada upaya lain agar operasional tetap berjalan.

Saat ini, perhatian Pemerintah Desa Tukak sementara disibukan dengan penataan desa sebagai desa wisata seni daur ulang. Tepian jalan di Desa Tukak dipenuhi oleh barang hasil kreativitas berupa tempat duduk dan pot bunga yang dibuat dari drum bekas. Wajah desa tampak asri di jalan utama. "Pagar rumah itu dicat warna hijau sebagai lambang warna kesehatan," tutur Baharudin (49 tahun).

Kegiatan 'kretifitas daur ulang' inipun menggunakan acara peresmian dari pihak kabupaten. Peresmian dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2016. Acara peresmian dimulai di gapura pintu masuk Desa Tukak yang baru kembali dibangun. Gapura terbuat dari bahan kayu beserta beberapa barang bekas barang plastik daur ulang. Garis *finish* sekaligus penutupan acara peresmian berlangsung di Dermaga Tukak.

Sumber: Dokumentasi Peneliti

Gambar 3.11. Hasil Olah Kreativitas Daur Ulang

Ada kecemburuan yang dirasakan oleh warga pesisir pantai, yang muncul sebagai candaan satire. Barang kreativitas hasil daur ulang memang diletakkan hanya sampai ke tempat penjualan ikan (TPI), yang semua adalah wilayah pemukiman darat. “Rumah di darat mendapatkan drum bunga besar, rumah di pesisir macam mana? Mungkin di sini kami orang kecil, rumah orang miskin ga’ dapat!” seru M. Yusuf (36 tahun).

BAB IV

MENGGAPAI ODF DI DESA TUKAK

Pada bab ini kami menuliskan khusus secara detail tentang tema utama dalam buku ini, yaitu tentang ‘Menggapai ODF di Desa Tukak”. Pembahasan akan dilakukan dalam lima sub bab, yang ditampilkan secara berurutan, yaitu 1) Antara ODF, Jamban Sehat dan Tenaga Kesehatan Teladan; 2) Antara Kepemilikan dan Perilaku Pemakaian Jamban; 3) Nilai Air dan Konsep Bersih-Kotor dalam Keseharian; dan 4) Meretas Harapan Baru melalui Relokasi.

4.1. Antara ODF, Jamban Sehat dan Tenaga Kesehatan Teladan

Open Defecation Free, atau biasa disingkat ODF, atau dalam bahasa Indonesia Bebas Buang Air Besar Sembarangan adalah suatu kondisi ketika setiap individu dalam suatu komunitas tidak lagi melakukan perilaku buang air besar sembarangan yang berpotensi menyebarkan penyakit[35]. Pengertian tersebut pada pokoknya adalah melokalisir kotoran manusia, tidak membiarkan dalam kondisi terbuka, dengan harapan tidak menjadi sebab persebaran penyakit yang bisa ditularkan melalui feses.

Sebuah komunitas di masyarakat telah dianggap mencapai ODF apabila telah memenuhi lima hal berikut[36]:

---

35 Periksa Kementerian Kesehatan RI. (2014). *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat*. Kemenkes RI, Jakarta. Halaman 4.

36 Lima kondisi yang dijadikan persyaratan komunitas ODF ini dirumuskan oleh Bank Dunia melalui program *Water and Sanitation Program East Asia and the Pacific* pada tahun 2009. Lihat World Bank Office Jakarta (2009). *Informasi Pilihan Jamban Sehat*. Water and Sanitation Program East Asia and the Pacific, Jakarta. Halaman 6.

1) Semua masyarakat telah BAB hanya di jamban yang sehat dan membuang tinja/kotoran bayi hanya ke jamban yang sehat (termasuk di sekolah).
2) Tidak terlihat tinja manusia di lingkungan sekitar.
3) Ada penerapan sanksi atau peraturan atau upaya lain oleh masyarakat untuk mencegah kejadian BAB di sembarang tempat.
4) Ada mekanisme *monitoring* umum yang dibuat masyarakat untuk mencapai 100% KK mempunyai jamban sehat.
5) Ada upaya atau strategi yang jelas untuk dapat mencapai Total Sanitasi.
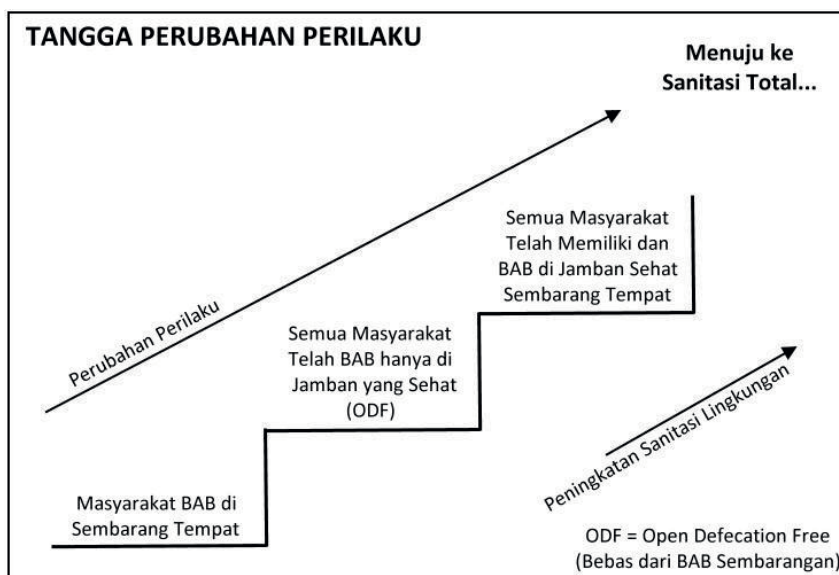
Sumber: World Bank Office Jakarta (2009); Visualisasi oleh Peneliti

Gambar 4.1. Tangga Perubahan Perilaku

Sebagaimana di dunia, di Indonesia ODF merupakan sebuah tahapan dalam Tangga Perubahan Perilaku[37], yang tujuan besarnya adalah upaya pencapaian Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Hal ini sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Kesehatan

37 Termaktub dalam *Road Map* Percepatan Program STBM 2013-2015 yang disusun oleh Direktorat Penyehatan Lingkungan, Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2013). Halaman 5.

(Permenkes) nomor 3 tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat. Dalam Permenkes tersebut Pengertian STBM termuat dalam Ketentuan Umum yang menyatakan bahwa STBM adalah sebuah pendekatan untuk mengubah perilaku higienis dan saniter melalui pemberdayaan masyarakat dengan cara pemicuan[38].

Permenkes nomor 3 tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat telah menyebut dengan gamblang senjata utama dari STBM adalah 'pemicuan'. Pemicuan merupakan suatu cara untuk mendorong perubahan perilaku higiene dan sanitasi individu atau masyarakat atas kesadaran mereka sendiri dengan menyentuh perasaan, pola pikir, perilaku, dan kebiasaan individu atau masyarakat[39].
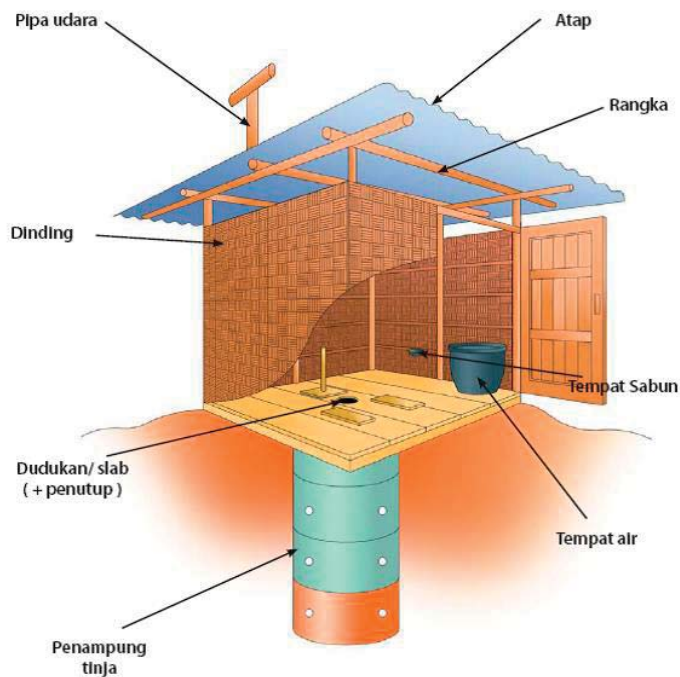
Sumber: World Bank Office Jakarta, 2009

Gambar 4.2. Desain Jamban Sehat[40]

---

38 Periksa Kementerian Kesehatan RI. (2014). *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat*. Kemenkes RI, Jakarta. Halaman 6.

39 *Ibid.*

40 Lebih lanjut periksa World Bank Office Jakarta (2009). *Informasi Pilihan Jamban Sehat*. Water and Sanitation Program East Asia and the Pacific, Jakarta. Halaman 11.

Secara umum pembuangan tinja yang tidak memenuhi syarat sangat berpengaruh pada penyebaran penyakit berbasis lingkungan, sehingga untuk memutuskan rantai penularan ini perlu dilakukan rekayasa pada akses ini. Berdasarkan hal tersebut maka dipandang perlu untuk adanya akses sanitasi pada jamban sehat di setiap rumah tangga.

Prinsip dari jamban sehat pada pokoknya adalah memutus hubungan antara tinja dengan lingkungan masyarakat. Hal ini menjadi penting untuk dilakukan agar sisa pembuangan akhir dari kotoran manusia tidak menjadi penyebab atau sarana penularan penyakit.

4.1.1. Desa ODF Tukak, Berhasilkah?

Berdasarkan informasi dari kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Selatan dan pemegang Program Pendidikan dan Penyehatan Lingkungan (P2L) menyebutkan bahwa Desa Tukak yang berada di Kecamatan Tukak Sadai merupakan salah satu desa di wilayah Bangka Selatan yang telah mendeklarasikan diri sebagai desa yang telah mencapai bebas buang air besar sembarangan atau ODF. Keterangan ini juga diperkuat oleh keterangan Kepala Puskesmas dan juga sanitarian yang bertugas di Puskesmas Tiram, Puskesmas yang membawahi Desa Tukak sebagai salah satu wilayah kerjanya.

> "Iya pak… Desa Tukak ini salah satu yang telah mencapai ODF. Di sini yang tinggal kebanyakan orang dari Bugis dan Melayu… Kalau di Desa Tukak itu… yang tinggal di pinggir pantai itu orang Bugis semua pak… orangnya susah pak waktu kita kasih pengertian… pemicuan, meski akhirnya berhasil untuk ODF. Berbeda dengan masyarakat yang di Desa Tiram sini, kalau yang tinggal di sini lebih mudah untuk diarahkan…" (Yulita M., 28 tahun, Sanitarian Puskesmas Tiram)

Desa Tukak sebagai desa tertua di Kecamatan Tukak Sadai secara wilayah berbatasan langsung dengan Desa Tiram, dimana tempat gedung Puskesmas berdiri. Secara akses, sanitarian Puskesmas Tiram yang berjumlah tiga orang, bisa dengan mudah untuk mencapai atau mendatangi dan memberi penyuluhan pada masya-

rakat di Desa Tukak. Jarak Puskesmas dengan garis pantai di Desa Tukak, yang merupakan wilayah Desa Tukak terjauh, tidak lebih dari dua kilometer.

Dahulu, masyarakat Tukak masih membuang air besar sembarangan. Bagi masyarakat yang tinggal di daratan mereka terbiasa membawa cangkul ke hutan ketika hendak buang air besar. Ada juga yang menaruh feses di kantung plastik (kertas dalam istilah lokal) dan melemparnya ke hutan.

Namun, menurut keterangan petugas Puskesmas, setelah adanya penyuluhan dari petugas kesehatan lingkungan Puskesmas maka lambat laun masyarakat pun berubah. Pihak Puskesmas mempunyai program sanitasi yang dilakukan pada tahun 2014 yaitu arisan jamban. Petugas kesehatan lingkungan menilai bahwa masyarakat sulit untuk diminta membuat jamban sendiri sehingga mereka membuat program arisan ini agar masyarakat mau untuk membuat jamban.

Pada kenyataannya, banyak masyarakat yang menolak dengan ide tersebut karena alasan ekonomi. Meski dalam bentuk arisan, masyarakat tidak mau membuat jamban. Akhirnya pihak Puskesmas pun membuat penyuluhan dibantu dengan aparat setempat. Penyuluhan ini tidak berlangsung sekali saja tetapi berkali-kali. Akhirnya ada juga masyarakat yang mau membuat jamban dengan sistem arisan.

Ketika pihak kesehatan lingkungan memberikan rincian biaya pembuatan jamban ke masyarakat dengan nominal 1,2 juta hingga 1,3 juta banyak masyarakat yang tidak mau mengikuti arisan karena biaya yang mahal. Menurut petugas kesehatan lingkungan, Yulita Muhammad (28 tahun), harga yang ditawarkan ini sudah murah karena harga tersebut sudah termasuk dengan kloset, pipa, semen, pasir dan pembuatan *septic tank*.

Akhirnya petugas kesehatan keliling pun kembali memutar otak untuk melancarkan program pembuatan jamban. Mereka pun meminta tolong kepada pemerintah desa dalam mensosialisasikan pentingnya jamban di rumah. Pemerintah desa mendukung program tersebut, dan akhirnya ada bantuan dari Forum Kabupaten Sehat yang

bersedia mengeluarkan dana untuk membantu 10 kepala keluarga membeli kloset. Dana pun bisa diperkecil menjadi Rp. 800.000,-.

Meski demikian, tetap saja masyarakat tidak tertarik membuat jamban sendiri. Hanya ada tujuh sampai delapan keluarga saja yang mau turut serta mengikuti arisan jamban dengan tarikan iuran Rp. 35.000,- sampai Rp. 40.000,-. Saat ini program tersebut sudah selesai dan belum ada wacana untuk membuat arisan periode kedua.

Petugas sanitarian selalu melakukan penyuluhan ke masyarakat dengan dibantu aparat desa. Jika tidak ditemani aparat desa, seringkali tidak ada masyarakat yang mau datang dan mendengarkan penyuluhan tersebut. Mereka baru mau mendengar jika aparat desa turut serta di dalam penyuluhan. Mereka sepakat untuk memberi kesadaran kepada masyarakat bahwa buang air besar sembarangan itu tidak baik bagi kesehatan dan lingkungan sekitar.

Sulitnya mengumpulkan warga menjadi kendala tersendiri bagi petugas kesehatan keliling. Akhirnya dalam setiap penyuluhan mereka selalu membawa *snack* sebagai penarik minat warga untuk datang dan mendengarkan penyuluhan yang mereka berikan.

Ketika penyuluhan dilakukan, warga yang hadir sebagian besar adalah para ibu yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga dan memiliki sampingan membuka cangkang kepiting (ketam). Ada banyak ibu yang tidak bisa hadir penyuluhan karena harus bekerja sehingga orang yang datang pun sedikit.

Bukan hanya petugas sanitarian yang datang ke acara penyuluhan tetapi ada dokter dan dua orang kader yang menemani mereka. Kegiatan penyuluhan adalah ajang tempat petugas kesehatan memberikan motivasi kepada masyarakat untuk tidak membuang air besar sembarangan. Mereka mencoba membuka pikiran masyarakat agar mereka mempunyai malu jika tidak memiliki jamban di rumah.

> "Ya dikasih tahu, ndak malu apa ga ada jamban? Ga sulit apa kalau mau ee' harus ke hutan dulu? Kalau ada tamu gimana? Masa kalau dia mau ke kamar mandi di bawa ke hutan? Gak malu apa sama tamu kalau rumah kita bau ee'?" (Yulita M., 28 tahun, sanitarian Puskesmas Tiram)

Lebih lanjut Yulita, sanitarian yang mengaku turun langsung melakukan pemicuan pada masyarakat di Desa Tukak menceritakan sulitnya mendekati masyarakat etnik Bugis yang tinggal di pantai,

> "Itu ada beberapa kali kita turun melakukan pemicuan di sana pak (Desa Tukak). Kalau masyarakat yang tinggal di sini, di daratan, itu relatif lebih gampang pak… mereka lebih sadar. Tapi itu masyarakat yang tinggal di pantai… orang Bugis pak… itu jauh lebih sulit. Mungkin karena lebih gampang ya pak (untuk buang air). Langsung di laut… di atas air… jadi langsung hilang…" (Yulita M., 28 tahun, sanitarian Puskesmas Tiram)

Pada akhirnya, 9 Desember 2014, pihak Puskesmas menginisiasi untuk deklarasi Desa Tukak sebagai desa ODF (*open defecation free*). Desa Tukak sudah dinyatakan benar-benar bebas dari kotoran manusia, dengan kata lain tidak ada lagi masyarakat yang buang air sembarangan. Deklarasi ini sekaligus memuat pernyataan masyarakat yang tertuang dalam perjanjian hitam di atas putih yang diwakili oleh Kepala Desa Tukak. Puncaknya, sertifikat penghargaan sebagai komunitas ODF dari Dinas Kesehatan pun diterima dengan pemberian secara langsung oleh Bupati Bangka Selatan.

SERTIFIKAT KOMUNITAS ODF
STOP BABS KABUPATEN BANGKA SELATAN

DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANGKA SELATAN
Pada Tanggal 09 Desember 2014
Memberikan Sertifikat ODF
Kepada

Desa Tukak

Sebagai
KOMUNITAS DESA ODF

Semoga semangat dan upaya seluruh warga desa menuju Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dapat bermanfaat bagi peningkatan derajat kesehatan Masyarakat

Mengetahui,
Bupati Bangka Selatan

H. JAMRO[illegible] JALIL

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Bangka Selatan

AKHMAD SOBIRIN, SKM

Sumber: Dokumentasi Peneliti

Gambar 4.3. Sertifikat Komunitas ODF untuk Desa Tukak

Dalam sebuah diskusi, klaim pencapaian ODF di Desa Tukak oleh tenaga kesehatan (Puskesmas) tidak sepenuhnya mulus. Tak kurang dari aparat Desa Tukak sendiri yang justru mementahkan klaim tersebut.

> "Kite adanya kendala seperti ini, makanya bupati yang memutuskan datang ke sini. Karena kite ini sebenarnya ndak ada lagi yang di pinggir laut itu. Laporan kite sampai ke pusat ternyata dicek masih ada yang ga' punya jamban. Di pinggir laut itu yang kena. Padahal laporan kite itu ndak pernah kita buat, laporan dari kesehatan. Puskesmas ini yang bikin bilang kita ini di desa semuanya sudah punya jamban semua. Puskesmas itu bikin laporan fiktif jadi sebenarnya Puskesmas sendiri yang harus turun ke lapangan. Jadi laporan dengan fakta itu beda..." (Martoni, 40 tahun, Wakil Ketua BPD)

Pernyataan wakil ketua BPD ini didukung oleh Emma (27 tahun), seorang ibu rumah tangga warga Desa Tukak yang tinggal di pemukiman pantai, "Ya kita memang tahu ada arisan jamban ituu… tapi itu di RT sana (daratan) saja yang bikin. Lha kalau di sini mau ditaruh mana itu tabung WC-nya? Buangnya tetep aja ke laut…"

Kasubbag Tata Usaha Puskesmas Tiram pun secara terus terang mengakui hal tersebut;

> "...sekarang masih, itu yang di pesisir pantai itu masih pups (buang air besar) di sana, misal nanti jalan-jalan ke sana lihat sendiri di pinggiran pantai, banyaklah ada yang putar-putar dengan plastik langsung plung (dilemparkan ke laut..." (Megawati, 39 tahun)

Lebih lanjut pernyataan tersebut bersambung, sahut menyahut, berujung pada pernyataan ketidakpuasan tokoh masyarakat terhadap kinerja Puskesmas dalam melaksanakan kinerja lapangannya.

> "Maunya kita itu orang Puskesmas jika mau penyuluhan ke masyarakat undang semua tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda sehingga kita juga terlibat, yang Puskesmas ini tidak. Jarang turun ke lapangan, saya salut kepada anak mahasiswa KKN dari akbid (akademi kebidanan) Bangka Belitung tahun 2008, itu

kami semua diajak, bersama-sama kami dilibatkan, kita sama-sama memberi masukan, akhirnya kita sepakat dengan arisan jamban, dulunya belum sampai 50%, tapi semenjak program itu rata-rata sudah 80-90 persen lah, cuma sekarang yang belum itu yang di pantai itu…" (Sumarjo, 47 tahun)

"Ada mereka sosialisasi tapi mereka berdasarkan kegiatan kayak ada Posyandu hanya terpaku saja di situ. Bukan mereka yang bikin, sebenarnya itu instruksi dari Dinas (Kesehatan), Program dari Dinas itu, kemarin itu ada program forum desa sehat, itu berapa tahun saya lupa itu nah pas ada program itu jadi kita dadakan kejarnya. Sekretariat juga dadakan kita buat, mereka tidak punya inisiatif…" (Holbi, 28 tahun, Ketua Karang Taruna Desa Tukak)

4.1.2. Tenaga Kesehatan Teladan 2015

Sumber: Dokumentasi Peneliti

Gambar 4.4. Perhargaan Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas Tingkat Nasional Tahun 2015

Seni Pusyani (27 tahun), salah satu sanitarian di Puskesmas Tiram, pada tahun 2015 lalu mendapatkan penghargaan secara langsung dari Menteri Kesehatan sebagai 'tenaga kesehatan teladan' tingkat nasional. Salah satu sanitarian terbaik yang dimiliki Bangka Selatan ini mendapatkan penghargaan karena upayanya menjadikan

desa-desa di wilayah kerjanya untuk ber-sanitasi total berbasis masyarakat (STBM).

Deklarasi desa ODF dan juga penghargaan yang diterima sanitarian perwakilan dari Kabupaten Bangka Selatan merupakan dua indikator, bahwa telah terjadi perubahan mendasar pada bidang kesehatan lingkungan di wilayah ini. Trend perbaikan sudah menuju ke arah yang benar, ke arah yang lebih baik. Semoga.

4.2. Antara Kepemilikan dan Perilaku Pemakaian Jamban

Adanya dikotomi besar berdasarkan lingkungan wilayah tempat tinggal pada masyarakat etnik Bugis yang tinggal di Desa Tukak, wilayah pantai dan wilayah daratan, juga turut berpengaruh terhadap pola kepemilikan dan perilaku pemakaian jamban sehat di wilayah ini. Masyarakat etnik Bugis yang tinggal di daratan rata-rata sudah memiliki kamar mandi dengan jamban yang sudah dibuat dengan standar umum jamban sehat. Jamban dibuat dengan dudukan leher angsa serta adanya *septictank* pada pembuangannya.

Sumber: Dokumentasi Peneliti

Gambar 4.5. Tipikal MCK di Wilayah Daratan

Meski rata-rata masyarakat yang tinggal di daratan telah memiliki fasilitas MCK di dalam rumah, masyarakat etnik Bugis dan juga Melayu yang tinggal di daratan beberapa juga masih belum memiliki sumur, baik sumur gali maupun sumur bor. Beberapa dari mereka memilih mempergunakan sumber air yang mengumpul dalam kubangan yang berukuran sedang.

Masyarakat etnik Bugis di Tukak mengenal dua jenis sumber air yang semacam kubangan, yaitu air t*umbek* dan air *terentang.* Air *tumbek* adalah air yang mempunyai mata air kecil, mengalir mencari dataran rendah, bermuara ke laut Tukak. Biasa juga disebut sebagai air *kolong,* karena tidak ada aliran air dari atas. Sumber mata air besar dari desa lain. Sedang air *tarentang* adalah air yang bersumber dari mata air besar.

Ada dua sumber mata air *tumbek* berukuran sedang yang sering dipakai masyarakat daratan melakukan kegiatan MCK-nya. Kedua sumber mata air ini berada terpisah di dua dusun yang ada di Desa Tukak, yaitu Dusun Air Rambut dan Dusun Air Rumbia.

Sumber: Dokumentasi Peneliti

Gambar 4.6. Kegiatan Masyarakat Wilayah Daratan di Sumber Air Rambut; Seorang lelaki sedang mandi, sementara di sebelahnya lelaki lain sedang buang air kecil (kiri); Aktivitas mandi dilanjutkan dengan mencebur dan berenang ke dalam sumber air (kanan)

Menurut masyarakat, sumur Air Rambut tidak pernah kering. Masyarakat percaya bahwa pada jaman dahulu ada jin raksaksa yang

menginjak mata air tersebut sehingga ada telapak besar. Sumur tersebut terbuat secara alami. Meskipun sedang musim kemarau, sumur Air Rambut tidak pernah bisa kering. Pada musim hujan sumur hanya diambil dengan gayung saja dan air akan meluap dari sumur tersebut.

Dahulu, tempat sumber mata air ini dianggap angker karena berada di tengah hutan. Tidak ada masyarakat yang berani datang meskipun di siang hari dan masyarakat tidak diperbolehkan untuk datang ke sana pada jam 12 siang. Tetapi sekarang sudah tidak lagi. Sudah banyak masyarakat yang datang ke sana untuk mandi ataupun mengambil air. Mata air ini dianggap keramat bagi warga. Lingkungan sekitar sumber mata air ini haruslah tetap bersih. Masyarakat tidak diperbolehkan untuk membuang sampah di sana.

Jika ada pendatang yang meminum air dari mata air rambut maka dipercaya orang tersebut akan kembali lagi ke Tukak. Orang yang meminumnya akan selalu memikirkan Desa Tukak dan akan kembali entah untuk kerja ataupun menetap. Hal ini memang sebuah mitos tetapi masih dipercaya oleh masyarakat setempat. Mereka menganggap bahwa kejadian ini memang nyata.
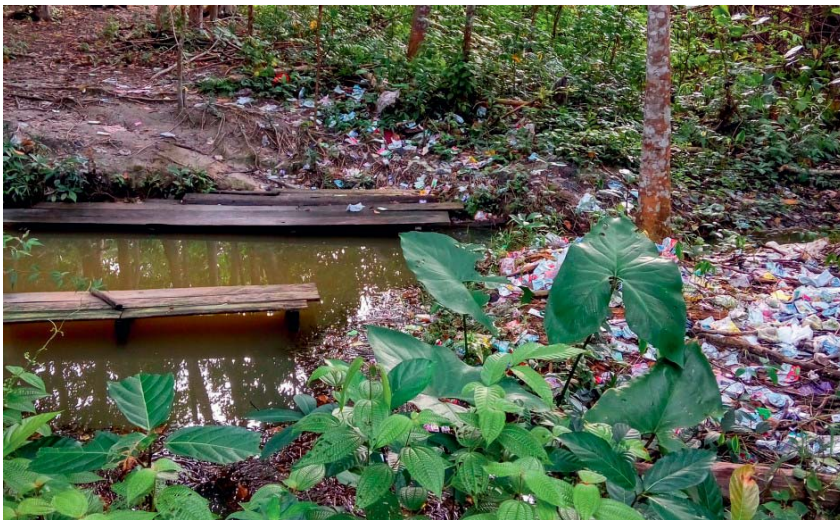
Sumber: Dokumentasi Peneliti

Gambar 4.7. Sumber Mata Air di Wilayah Dusun Air Rambut yang Bersebelahan dengan Tempat Pembuangan Sampah

Sumber mata air lain yang berukuran lebih kecil juga ada di wilayah Dusun Air Rambut. Kondisinya terlihat kumuh, karena bersebelahan dengan tempat orang membuang sampah. Hampir tidak ada batas di antara keduanya.

Di batas desa, antara Desa Tukak dan Desa Tiram, ada air *terentang.* Air *terentang* adalah air yang bersumber dari mata air besar. Air tersebut yang tertampung dalam kubangan yang jauh lebih kecil. Kubangan ini berada di pinggir jalan raya akses utama menuju Desa Tukak.

Kubangan yang berukuran luas tak lebih dari enam meter persegi dan kedalaman setengah meter ini justru selalu penuh dengan pengguna. Ibu-ibu yang mandi sekaligus cuci-cuci, anak-anak yang berenang, para remaja dan bapak-bapak yang mencuci motor, dan bahkan sekali tempo kami menemui ada bus berukuran sedang yang diparkir dan dicuci di sebelah kubangan.

Sumber: Dokumentasi Peneliti

Gambar 4.8. Kubangan Kecil di Batas Desa; Air berwarna keruh saat anak-anak bermain air dengan riang di samping bapak-bapak yang sedang mencuci motor (kiri); Sementara kondisi air yang terlihat jernih saat tidak ada yang melakukan aktivitas di dalamnya (kanan)

Seringkali beberapa kegiatan oleh orang-orang yang berbeda tersebut dilakukan bersamaan. Para ibu mencuci baju dan mandi ditemani dengan ramainya anak-anak yang bermain air. Kadangkala anak-anak tersebut bermain air bersamaan dengan bapak-bapak yang sedang mencuci motor.

Bila sedang tidak ada yang memakai, air di dalam kubangan memang terlihat jernih dan menyegarkan. Tetapi bila para pengguna sudah ada di dalamnya, air cenderung menjadi keruh dan berwarna coklat.

Berbeda dengan kepemilikan jamban sehat pada masyarakat etnik Bugis yang tinggal di daratan, mereka yang tinggal di pantai tidak demikian. Berdasarkan observasi di setiap bangunan rumah nelayan di wilayah pantai ini, memang tidak ada satupun rumah yang mempunyai jamban sehat secara khusus.

Sumber: Dokumentasi Peneliti

Gambar 4.9. Tampak Luar Fasilitas MCK di Rumah Nelayan Wilayah Pantai

Tampak luar, fasilitas MCK yang dibangun masyarakat di wilayah pantai banyak yang terlihat dibangun dengan ala kadarnya. Ada yang hanya dibatasi dengan kain atau terpal sekedar saja, ada pula yang dibangun dengan pembatas papan seperti bangunan utama.

Pada suatu kesempatan bertamu ke rumah salah satu warga, kami berniat untuk menumpang untuk buang air kecil, beliau pun mempersilahkan kami masuk, "…eh silahkan pak… silahkan langsung saja masuk ke dalam. Itu ada di dalam…" Kami diantar masuk sampai ke bagian paling belakang rumah. Terlihat bangunan berdinding papan setinggi tidak sampai satu meter tanpa atap, dengan ukuran 1,5 x 1,5 meter persegi. Hanya itulah fasilitas MCK yang dimiliki keluarga ini.

Pada kesempatan berbeda kami juga melakukan observasi pada rumah tangga lain yang cukup berada, kami indikasikan berdasarkan kepemilikan meubelair yang cukup wah serta adanya lemari es yang cukup besar berada di ruang keluarga tersebut. Kami mendapati bahwa fasilitas MCK di rumah tersebut jauh lebih baik, dengan dinding papan yang utuh sampai ke atas dan dengan atap dari lembaran asbes, sementara bahan lantai dibuat dari potongan-potongan bambu yang disusun rapi.

Sumber: Dokumentasi Peneliti

Gambar 4.10. Tampak Dalam Fasilitas MCK di Rumah Nelayan Wilayah Pantai; Drum plastik yang difungsikan sebagai bak mandi (kiri); Dudukan jamban yang dibuat dengan memotong bagian bambu sebagai lubang yang langsung mengarah ke laut (kanan)

Kami dapati bahwa kamar mandi hanya berisi penampung air dari drum plastik besar serta satu jerigen ukuran 20 liter yang telah dipotong bagian atasnya. Sedang untuk jamban, hanya ada sebagian

potongan lantai bambu yang sengaja diambil untuk dudukan tempat jongkok, dengan lubang yang langsung terarah pada air laut. Terlihat beberapa kerumunan ikan laut kecil-kecil yang seperti berebut saat ada kotoran yang jatuh dari lubang berukuran 12 x 30 centimeter tersebut.

Sumber: Dokumentasi Peneliti

Gambar 4.11. Kondisi Pagi Hari Saat Air Laut Surut

Kondisi rumah nelayan etnik Bugis yang bersisian dan menjorok ke laut sampai dengan tiga-empat rumah membuat beberapa rumah pada waktu-waktu tertentu tidak berada di atas air laut. Pada pagi sampai dengan sore hari, saat air laut sedang surut, kotoran bekas buang air besar akan terlihat berceceran dan menumpuk di tanah pasir pasir pantai persis di bawah dudukan jamban. Pada saat menjelang sore hari , saat air mulai pasang, barulah kotoran-kotoran itu hanyut dibawa air ke tengah laut.

Hasil pengamatan yang kami lakukan diperkuat oleh observasi harian penduduk daratan setempat;

> "Saya tunggu kalian (peneliti) besok subuh-subuh datang. saya tunggu sekitar pukul 04.00 WIB di ujung *talud* sana, rumah keluarga saya juga disana, saya juga biasa ambil perahu angkut barang subuh-subuh. Baru kita tengok. Banyak itu kuning-kuning (feses) di bawah rumah mereka. Iya kelihatan semua karena airnya lagi surut, biasanya sore baru air pasang. Mereka belum

punya jamban jadi buang ke laut saja. Kesadaran masyarakat susah, kurang, meskipun ada, itu sampah ringan, itu sampah rumah tangga kalau bekas kepiting itu tadi itu kan ga' mungkin, bekas-bekas jaring yang tertumpuk nah inilah…" (Ardan, 55 tahun, warga RT 03, tinggal di darat)

"…jelas-jelas ga menciptakan keluarga yang sehat kuncinya yang pertama. Jadi seandainya mereka masih tinggal di pinggir pantai itu, saya rasa jambannya juga ga bisa dari mereka secara pribadi sampai dengan masyarakat kan BAB (buang air besar) di rumah itulah sehingga air (laut) pasang kotoran itu bubar, air surut itu juga meninggalkan ini. Merusak pemandangan di sana lah…" (Sumarjo, 47 tahun, warga RT 04, tinggal di darat)

Kondisi tentang ketiadaan jamban sehat di setiap rumah masyarakat yang tinggal di wilayah pantai ini juga diakui sendiri oleh masyarakat setempat;

"Tidak punya pak! Semua yang tinggal di pinggir pantai ini tidak punya. Di sini adanya itu yang MCK umum. Beda dengan itu yang di situ (menunjuk rumah di daratan), kalau itu kan yang punya masing-masing… pribadi." (Asse, 30 tahun, nelayan)

"Ya memang begini saja yang kami punya. Namanya juga rumah di pantai… di atas laut… mau gimana lagi… semua ya sama saja itu dengan rumah-rumah lain yang ada di sini…" (Emma, 27 tahun, ibu rumah tangga)

Secara fisik memang sulit untuk membangun fasilitas MCK dengan jamban sehat ber-*septictank* di wilayah perumahan di atas laut. Meskipun tetap bisa diakali dengan model tertentu, tetapi tentu saja membawa konsekuensi biaya yang cukup mahal, hal ini tentu saja cukup memberatkan bagi masyarakat nelayan yang kebanyakan berada pada status ekonomi lemah.

Pada saat ini pemerintah setempat sudah memberi bantuan dengan mendirikan tempat MCK (mandi, cuci, kakus) umum, yang dikhususkan untuk masyarakat nelayan yang tinggal di wilayah bibir pantai ini. Menurut keterangan aparat desa setempat, fasilitas MCK umum ini telah dibangun pada tahun 2013.

Secara umum kondisi bangunan fasilitas MCK yang dibangun di Desa Tukak sangat bagus dan megah untuk kategori fasilitas umum. Ada enam kamar MCK yang tersedia dengan lantai dan dinding yang telah dipasang keramik dengan sangat rapi. Lokasinya pun hanya berkisar 20 meter dari perkampungan nelayan di wilayah pantai. Sangat dekat.

Sumber: Dokumentasi Peneliti

Gambar 4.12. Fasilitas MCK Umum Desa Tukak; a) Pintu utama MCK; b) empat dari total enam pintu jamban yang tergembok; c) Kondisi dalam yang seperti baru karena jarang dipakai; d) Satu jamban mempunyai pintu rusak dan diganti dengan kain

Sejak dibangun pada tahun 2013 sampai dengan saat ini kondisinya masih sangat bagus. Hanya ada satu pintu dari enam jamban yang rusak, dan diganti dengan tutup kain sekedarnya (Gambar 4.12.d). Sementara empat dari enam jamban yang tersedia,

pintunya tertutup rapat dan dipasang gembok (Gambar 4.12.b). "… sepertinya ditutup karena airnya tidak dialirkan di kamar mandi yang digembok itu pak…," kilah ibu penjaga toko yang lokasinya berdekatan dengan fasilitas MCK Desa Tukak ini. Sementara Martoni, Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa (40 tahun), seorang aparat desa beralasan bahwa, "Itu masyarakat tinggal pakai-pakai saja, tidak mau jaga kondisinya…".

Air di dalam bak mandi MCK terlihat bening dan segar dengan kran yang airnya bisa mengucur deras. Kondisi ini berbeda dengan air di rumah yang kami tempati yang terlihat keruh seperti kopi susu encer dengan rasa yang payau, meski sumber airnya berasal dari sumur bor.

Positif hanya satu kamar MCK saja yang difungsikan, dan kondisinya terlihat seperti masih sangat baru (Gambar 4.12.c), meski tidak ada penjaga khusus yang membersihkan fasilitas ini. Kondisi ini menunjukkan bahwa kamar MCK ini sangat jarang dipakai untuk kondisi sebuah bangunan MCK umum yang telah berumur lebih dari tiga tahun.

> "Dulu masyarakat sering pak ke sana (fasilitas MCK), untuk ambil air. Dulu itu airnya lancar di sana, tapi kemudian dibuatkan saluran airnya ke sini (perumahan nelayan wilayah pantai), jadi sudah ada air sampai ke rumah-rumah… sumber airnya sama pak. Itu dari sumur bor. Sekarang sih sudah ada air di rumah… sepi itu di MCK… klo buang air ya di rumah pak…" (Ajik, 54 tahun, nelayan)
>
> "…ituu (fasilitas MCK umum) untuk tamu pak… kalau ada tamu ke situ, atau kalau air mati… kalau air macet. Jaranglaah ke situ, kalau kemarau saja. Lebih enak di rumah masing-masing, air banyak kan…." (Emma, 27 tahun, ibu rumah tangga)
>
> "…ya gimana ya pak? Itu setiap ke situ (fasilitas MCK umum) harus bayar… itu kalau mau mandi bayar… mau cuci-cuci bayar… mau buang air besar bayar… itu dua ribu rupiah… trus siapa yang mau bayar di situ… jadi ya malas masyarakat ke situ…" (Sunarto, 34 tahun, nelayan)
>
> "…ke MCK jauh… di sini kan sudah ada selang. Waktu pertama dulu bayar tiga ratus ribu… trus (setelah itu) bayar

bulanan. Mending mandi di rumah daripada ke sana… mandi aja jauuh…” (Hasna, 42 tahun, ibu rumah tangga)

“Jarang ke PNPM[41]… sudah ada air PAM di rumah-rumah… kalau ada tamu ya dibawa ke PNPM… kalau air ga jalan dibawa ke PNPM. Ada enam kamarnya… tapi enak mandi di rumah, bisa langsung ga jauh-jauh…” (Ida, 26 tahun, ibu rumah tangga)

Sisi kepraktisan, efisiensi waktu dan efisiensi uang rupanya yang selalu menjadi alasan bagi masyarakat etnik Bugis yang mempunyai rumah di wilayah Pantai Tukak ini. “Di rumah laaah… banyak air to! Tidak perlu ke sana-sana…,” kilah Asse (30 tahun), salah seorang nelayan saat kami tanya alasan tidak buang air besar di jamban umum yang telah dibangun pemerintah.

Jarak 20 meter sepertinya cukup dirasa memberatkan bagi etnik Bugis di wilayah pantai untuk ditempuh kalau hanya digunakan sekedar untuk buang air besar. Apalagi ditambah dengan faktor ‘membayar’ untuk setiap kali berkegiatan di fasilitas MCK milik umum ini. Kecuali bila memang air yang mengalir di dalam rumah macet atau tidak mengalir saat kemarau, barulah mereka beranjak untuk ambil air di sumur yang menjadi sumber air MCK umum. Jadi apabila mereka beranjak ke fasilitas MCK umum alasan utama adalah kebutuhan akan ‘sumber air bersih’, bukan kesadaran untuk melokalisir limbah kotoran buang air besar.

Fakta yang terjadi pada etnik Bugis di Desa Tukak ternyata juga ditemukan dalam beberapa kasus penelitian di tempat lain. Sebuah penelitian studi kasus yang dilakukan di Kabupaten Lombok Barat juga menemukan bahwa masyarakat, terutama yang tinggal di dekat air (sungai), cenderung sulit untuk diajak untuk berperilaku buang air di jamban sehat, meski sebenarnya bangunan MCK umum telah dibangun dengan sangat layak. Hal ini berbeda dengan keberadaan masyarakat yang justru sulit untuk mendapatkan air. Pada masyarakat yang tinggal di daerah kering dan sulit air, pemicuan

41 Menurut keterangan ibu Ida, fasilitas MCK umum yang ada di wilayah RT 5 Desa Tukak ini dibangun melalui mekanisme pembiayaan PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) Mandiri Perdesaan.

untuk berperilaku menggunakan jamban sehat justru dirasakan lebih mudah[42].

Hal yang sama juga berlaku di Kabupaten Murung Raya, masyarakat yang tinggal di sungai dan menjadikan sungai sebagai bagian dari hidupnya, justru berperilaku buang air di sungai tersebut. Penelitian yang dilakukan secara kualitatif tersebut justru memperkuat sinyalemen bahwa pada masyarakat yang tinggal di dekat sumber air (sungai, laut, danau), justru yang paling sulit untuk diajak berperilaku bersih dan sehat dengan buang air hanya di jamban sehat. Mereka justru cenderung lebih memilih untuk buang air di sumber air tersebut, yang notabene juga merupakan sumber air makan-minum mereka[43].

Pemanfaatan aliran sungai yang menyatu dalam kehidupan keseharian juga ditemukan dalam sebuah penelitian kualitatif yang dilakukan di kota salak Padang Sidempuan. Wilayah yang secara geografis memiliki sebelas sungai ini justru mempunyai tantangan tersendiri atas keberadaan sungai tersebut. Betapa tidak? Masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah aliran sungai justru cenderung memanfaatkan aliran sungai sebagai sarana MCK. Penggunaan air sungai yang juga merupakan bahan baku perusahaan daerah air minum (PDAM) untuk kegiatan MCK ini sudah dilakukan masyarakat secara turun temurun.[44]

Hasil riset etnografi kesehatan pada etnik Dayak Ngaju di Kabupaten Kapuas juga menemukan fakta menarik. Masyarakat etnik Dayak Ngaju mempunyai pemahaman bahwa buang air di aliran sungai itu juga merupakan hal yang sehat, karena sudah dilakukan

---

42 Baca bab 6 pada Agung Dwi Laksono, dkk (2015). *Geliat Sistemik Kabupaten Lombok Barat, Upaya Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Lombok Barat*. Penerbit Kanisius, Yogyakarta. Halaman 209-260.

43 Lihat “Sungai sebagai Bagian dari Kehidupan Masyarakat” pada Nunik Kusumawardani, dkk (2015). *Kabupaten Murung Raya Mengejar Ketertinggalan; Tira Tangka Balang (Maju Terus Pantang Mundur) untuk Perbaikan Status Kesehatan.* Penerbit Kanisius, Yogyakarta. Halaman 101-108.

44 Lihat “Romantisme Sungai sebagai Sumber Inspirasi” dalam Turniani Laksmiarti, dkk (2015). *Potret Kota Padang Sidempuan dalam Permasalahan Gizi Balita dan Kesehatan Lingkungan.* Penerbit Kanisius, Yogyakarta. Halaman 163-170.

secara turun-temurun. Selama ini tidak masalah, karena mereka sudah bertahun-tahun hidup di aliran sungai tersebut.[45]

Masyarakat etnit Bugis yang mendiami wilayah pantai secara keseluruhan beragama Islam, tetapi perilaku hidup bersih yang dinampakkan dalam menyikapi kondisi lingkungan dirasakan bertentangan dengan ajaran yang dianut. Materi Dakwah Sanitasi STBM[46] versi Islam yang digagas di Provinsi Jawa Timur, memuat hadist tentang larangan buang air besar di sembarang tempat,

> "*Ittaqul mal'uunata anits tsalasati, albaroozu fil mawaaridi wa faarighotit thoriiqi wadzzilli* (Takutlah tiga tempat yang dilaknat, buang kotoran pada sumber air yang mengalir, di jalan dan tempat berteduh)." (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majjah).

Merujuk pada hadist tersebut, maka yang dianjurkan atau bahkan diwajibkan dalam Islam adalah tidak buang air besar atau kotoran di tempat-tempat terbuka semacam air mengalir, baik sungai ataupun laut. Selain itu juga dilarang untuk membuang kotoran di jalan dan tempat dimana banyak orang diperkirakan akan berkumpul atau berteduh, apalagi di sebuah pemukiman.

4.3. Nilai Air dan Konsep Bersih-Kotor dalam Keseharian etnik Bugis di Desa Tukak

Dalam keseharian, etnik Bugis yang tinggal di wilayah pantai hidup damai berdampingan dengan sampah. Bagaimana tidak? Di tanah pasir pantai, di kolong-kolong lantai rumah papan mereka, terlihat sampah menumpuk berceceran di mana-mana. Tidak ada sejengkal pun tanah pasir yang terbebas dari sampah. Dikonfirmasi pendapatnya tentang sampah yang berserakan dan menumpuk di pinggir laut tersebut, mereka pun berkomentar,

---

45 Lihat pada bahasan topik "Pemakaian Jamban Sehat" pada Septa Agung Kurniawan, dkk (2014). *Tetesan Danum Tawar di Desa Seribu Akar. Buku Seri Etnografi Kesehatan 2014*. Lembaga Penerbit Balitbangkes, Jakarta. Halaman 202.

46 Lihat "*Materi Dakwah Sanitasi STBM*" (2013) yang diterbitkan atas kerja sama Pemerintah Indonesia, MUI Jawa Timur, IAIN Surabaya, WSP-EAP/TSSM, Gates Foundation. Halaman 6.

“Ya kalau menurut saya sih ya kotor lah paak! ...cuma kan enak pak kita… mudah saja buangnya, ga perlu repot-repot… tinggal lempar ke laut… suuutt… gitu saja. Hahaha…” (Sunarto, nelayan, 34 tahun)

“Ya kotor… mau dibuang ke mana lagi, ini kan gampang buang ke belakang aja nanti hilang (terbawa air laut saat pasang). Sampah-sampah yang di bawah akan saya bersihkan kalau sore. Disapu terus dibakar. Tapi kadang sore airnya sudah naik. Nah kalau kayak sekarang itu tanahnya sudah becek, malas untuk sapu”. (Emma, 27 tahun)

Perilaku membuang sampah seenaknya sepertinya sudah mendarah daging pada semua lapisan umur, tanpa batasan, dari anak-anak, orang dewasa, sampai dengan orang-orang tua. Hal ini terlihat dari beragam sampah yang terserak di atas tanah pasir, mulai dari botol dan gelas minuman kemasan, bungkus rokok, kulit kerang, cangkang ketam, bekas jaring yang telah rusak, bungkus jajanan produk pabrik, tas plastik, sampai dengan popok bekas bayi (*diapers*).

Sumber: Dokumentasi Peneliti

Gambar 4.13. Kondisi Sampah yang Berserakan di mana-mana

Sebagian masyarakat yang tinggal di wilayah pantai sudah menyadari bahwa membuang sampah, seperti bekas cangkang ketam, akan menyebabkan daerah bawah rumah mereka menjadi kotor dan mengganggu ekosistem, namun mereka tetap saja melakukannya dengan alasan kepraktisan.

> "*Ao* (iya) buang di sini saja (bawah rumah) hahaha, ini kalau air pasang sampah ga kebawa (tidak terbawa), buang saja, enakkan lebih praktis, kalau yang di itu (tempat sampah) ada petugas setiap minggu sekali ambil, *ao* (iya) kite pakai juga hahaha (tempat sampahnya dipakai)…".
> (Lena, 20 tahun)
>
> "Kalau misalkan sampahnya ga' pernah bisa bersih karena bolak-balik (air pasang-surut), tidak ada pilihan lain buang sampahnya ke bawah tuh, bekas kulit kepiting, lain-lain kan bisa terhadap plankton, terhadap ikan-kan kecil terganggu, nilai sehatnya pencemaran deterjen juga mengganggu ekosistim laut seperti bunga karang." (Ardan, 55 tahun)
>
> "Ada itu di sana (menunjuk tempat sampah). Kita sering buang di bawah sini makanya ada bantuan tempat sampah dari desa, tidak semua rumah dapat, paling berapa saja itu, kotor juga tapi kita kan nelayan jadi tidak pikirkan soal yang sampah di bawah ini, padahal kalau sampahnya banyak di laut bisa merusak terumbu karang, tempat hidup ketam (kepiting). Kite orang sini belum mengerti soal yang begini. Sudah sering kite didatangi petugas soal ini (sampah) makanya diberi tempat sampah." (Sumarto, 34 tahun)

Sebagian sampah memang akan hilang, hanyut dibawa gelombang laut saat air pasang. Tetapi sampah yang tertinggal dan kembali jauh lebih banyak, sehingga kolong di bawah rumah serta area pantai tetap terlihat kumuh dan kotor.

Pada suatu kesempatan ngobrol dengan beberapa orang bapak-bapak, ada seorang bapak yang sedang minum teh dalam kemasan botol, saat sudah habis dia dengan mudah saja melempar botolnya di tengah pelataran depan pemukiman. Tidak terlihat sama sekali rasa sungkan dan canggung dengan adanya orang lain dan kami di situ.

Seorang ibu juga kedapatan membuang sembarangan bekas minuman instan gelas, meski sebuah bak sampah pemberian pemerintah desa yang disebar untuk setiap rumah tangga tidak jauh bertengger, hanya berjarak sekitar dua setengah meter. Saat ditegur oleh salah seorang bapak yang kebetulan adalah perangkat desa, dengan enteng ibu itu menjawab, “Halaah… pagi dan sore pelataran ini saya yang sapu juga. Nanti kan bersih lagi saya sapu saat sore.”

> “Sampah-sampah yang di bawah akan saya bersihkan kalau sore. Disapu terus dibakar… tapi kadang sore airnya udah naik. Nah kalau kaya sekarang (sore hari) itu tanahnya becek, malas untuk sapu…” (Emma, 27 tahun, ibu rumah tangga)

Pada kesempatan lain saat bercengkrama santai dengan salah satu keluarga nelayan di ruang tamu, kami mendapati tuan rumah santai saja saat meludah melalui celah lantai pada sisi dinding. Beberapa kali kami dapati tuan rumah yang perokok juga membuang putung rokoknya di celah-celah papan lantai. Memang pemasangan lantai dari papan seringkali disengaja tidak berdempetan, hal ini ditujukan agar papan tidak menyerap air, tetapi langsung ke bawah.

Konsep bersih sebenarnya juga ada di benak masyarakat etnik Bugis di wilayah pantai Desa Tukak ini. Saat pagi menjelang siang, kami mendapati pelataran yang bersih bekas disapu dan dibersihkan. Semua sampah di daratan terkumpul di bak sampah berwarna biru yang merupakan sumbangan pemerintah desa. Hanya saja terlihat kontras dengan kondisi sisi sebelahnya, sisi tanah pasir pantai, yang terlihat kumuh karena sampah yang berserakan. Meski juga terkadang bak sampah bantuan itu dipergunakan tidak sebagaimana mestinya.

> “…ada tempat sampah, kemarin ada itu di depan rumah cuma diambil, tidak ada sampahnya, tidak ada isinya, percuma kan jadi tukang sampahnya ambil kembali bawa ke sana. Saya juga ga’ tau soalnya saya lagi turun ke laut, pas ku tengok ga ada lagi haha…”. (Agus, 30 tahun)

Sumber: Dokumentasi Peneliti

Gambar 4.14. Kondisi Pelataran yang Bersih saat Pagi Hari

> "Kemarin waktu dibagi satu rumah dapat satu tempat sampah, sekarang tinggal berapa itu, dua saja hahaha, itu nelayan pakai ngisi umpan *bubu*, ada yang pinjam pakai sementara ngisi *ketam* (Kepiting) disana tapi mungkin lupa kembalikan, ada juga satu tempat sampah yang saya lihat di tanah sana, pakai untuk angkat tanah, kerja fondasi rumah di tempat baru sana." (M. Yusuf, 35 Tahun)

Secara emik, konsep bersih-kotor yang melekat ada di masyarakat etnik Bugis wilayah pantai ini memang sangat longgar. Mereka terbiasa hidup dengan ambang 'jijik' yang sangat rendah. Hidup keseharian di atas sampah dan tinja sudah tidak asing dan bukan hal yang aneh.

Konsep bersih-kotor yang longgar ini juga secara langsung diturunkan pada anak-anak dalam keseharian. "Di sini anak-anak suka berenang di belakang. Jarang badannya gatal-gatal… jarang sakit perut. Main aja kemana (saja) boleh… jajan apa (saja) boleh… asal ada uangnya…," kata Emma (27 tahun, ibu rumah tangga). Berenang di belakang? Di bagian mana biasa orang buang air besar.

Sumber: Dokumentasi Peneliti

Gambar 4.15. Anak-anak sedang Main Air Asin (Laut)

> "Kotor juga, kalo pas *baberak* (buang air besar) itu pagi-pagi, nanti sore pas air pasang tai (feses) dari tetangga sebelah sana (arah Barat) ke sini, terus nanti dari sini ke sana. Makanya kalo mau mandi air asin (air laut) di belakang itu jangan sore nanti mandi air tai (feses)." (Adrian, 16 tahun)

Saat kami mencoba ikut melaut, menjelang *maghrib* kapal nelayan yang kami tumpangi pulang menuju dermaga. Dalam perjalanan, di perairan laut menjelang Desa Tukak terlihat tumpukan sampah membentuk seperti gugusan daratan. "Itu sampah-sampah yang hanyut dari sana semua (dari rumah warga pesisir). Banyak juga ya, kalo kita tabrak macet lah perahu kita," ujar Hamsah (28 tahun).

Sebagai orang muslim, perilaku yang ditunjukkan oleh etnik Bugis di pemukiman wilayah pantai ini bertentangan dengan ajaran Islam. Hal ini merujuk pada 'Materi Dakwah Sanitasi STBM' yang menerangkan tentang dalil kebersihan[47],

> *"Fainnallaaha ta'aala banal Islaama 'alan nadhoofati. Walan yadkhulal jannata illa kullu nadhiifii* (Sesungguhnya Allah membangun Islam diatas kebersihan. Dan tidak akan masuk

47 Lebih lanjut bisa dilihat pada "Materi Dakwah Sanitasi STBM" (2013) yang diterbitkan atas kerja sama Pemerintah Indonesia, MUI Jawa Timur, IAIN Surabaya, WSP-EAP/TSSM, Gates Foundation. Halaman 8.

> surga kecuali orang-orang yang memelihara kebersihan).” (HR. Thabraani)

Catatan tentang dalil hadist ini menerangkan bahwa dapat disimpulkan orang-orang yang terbiasa dengan perilaku tidak memelihara kebersihan alias jorok tidak akan masuk surga. Orang yang berperilaku tidak bersih dapat berarti pula tidak ikut membangun Islam, karena sesungguhnya Allah membangun Islam di atas kebersihan. Kebiasaan membuang sampah sembarangan tidak mencerminkan perilaku hidup yang Islami.[48]

4.4. Meretas Harapan Baru melalui Relokasi

Rumah etnis Bugis yang berada di pinggir pantai akan di segera direlokasi. Alasan utama pemerintah desa merelokasi karena pada tahun 2011 kawasan pesisir pantai pernah banjir dan merenggut seorang nyawa anak kecil. Lalu pemerintah desa sepakat membuat *talud* (dam penahan ombak). Dengan begitu, banjir pun bisa ditangani. Selanjutnya, agar pesisir pantai tidak terlihat semrawut dan kumuh, dibuatlah program relokasi yang akan segera dilaksanakan agar pesisir pantai terlihat indah.

Rencana pemerintah desa setempat untuk melakukan relokasi perkampungan nelayan yang berada di wilayah pantai sebenarnya sudah lama dicanangkan. Sudah dari kepala desa periode sebelumnya hal ini direncanakan, tetapi belum mendapat respon yang positif.

Sebenarnya pada tahun 2014-2015, ada 27 unit rumah yang akan direlokasi. “Tinggal nunggu waktu pemindahan saja…,” jelas Syamsudin (45 tahun, Kepala Desa). Namun terdapat kendala dalam usaha untuk merelokasi ke 27 rumah karena masyarakat tidak memiliki lahan di daratan.

Tidak semua masyarakat pinggiran pantai yang akan direlokasi. Hanya masyarakat pinggiran pantai dengan batas *talud* (dam penahan ombak) saja yang dipindahkan.

---

48 *Ibid.*

> “...memang diharuskan pindah pak, tapi masih bermasalah itu. Pokoknya yang di sisi sini (menunjuk *talud*/dam pembatas pantai), harus pindah semua. Naah... yang di sebelah situ (sisi lain dam pembatas) tidak digusur, hanya yang di bagian ini saja semua yang diminta pindah...” (Ajik, nelayan, 54 tahun)
>
> “Iya pak... memang sudah lama rencananya... tapi terputus saat kepala desa ganti... belum selesai itu urusannya... berhenti di tengah jalan. Dulu sudah ada yang mendata-data... menanya-nanya...” (Tani, nelayan, 64 tahun)

Pada tahun 2016 ini, Kepala Desa pun berganti. Kepala Desa yang baru merupakan orang Bugis yang udah lama tinggal di Desa Tukak. Sebelum menjabat sebagai Kepala Desa, sebelumnya ia menjabat sebagai ketua BPD. Ia tidak mencalonkan diri sebagai Kepala Desa tetapi masyarakatlah yang memilih.

Sumber: Dokumentasi Peneliti

Gambar 4.16. *Talud* (Dam Pembatas Pantai)

Dalam tiga bulan masa jabatannya, Desa Tukak mendapat penghargaan dari Bupati. Desa Tukak ditunjuk menjadi percontohan desa wisata. Dari 50 desa di Bangka Selatan, Desa Tukak terpilih salah satunya. Hal inilah yang membuat pemerintah desa semakin ingin merelokasi pemukiman pesisir pantai.

Dengan ditunjuknya Desa Tukak sebagai desa wisata, maka pemerintah desa mengambil keputusan untuk merapikan wilayah

desa. Fokus terbesar mereka adalah merelokasi rumah yang ada di pinggir pantai ke daratan.

Pemerintah desa berusaha keras merangkul masyarakat agar mereka mau memindahkan rumahnya ke daratan yang lebih layak. Aparat desa sangat mengharapkan jawaban positif dari masyarakat. Bagi masyarakat yang khawatir terhadap nasib mereka yang tidak mempunyai lahan maka pemerintah menjanjikan untuk memberikan bantuan dana. Pemerintah akan mecarikan lahan, tetapi dengan aturan yang tidak boleh dilanggar oleh masyarakat.

Pemerintah desa sudah mengajukan permohonan kepada pemerintah pusat untuk memberikan dana untuk perumahan laya huni bagi warga Desa Tukak. Selain itu, pemerintah desa meng-upayakan sebagian Alokasi Dana Desa (ADD) untuk dipakai biaya relokasi. Meskipun biaya tersebut tidak cukup jika digunakan untuk membangun rumah di daratan bagi masyarakat yang direlokasi.

> “Kami akan berusaha keras. Kami selaku perangkat desa sekuat hati berusaha cari dana supaya ada dana bantuan dari pemerintah. Kemarin atas saran dari Dinas Pekerjaan Umum kami bikin proposal mengajukan dana bantuan untuk itu ke Kementerian Perumahan Rakyat, dengan dana desa sebagai dana pendamping.” (Syamsudin, 45 tahun, Kepala Desa)

Semua masyarakat yang direlokasi rencananya akan menda-patkan dana santunan dari pemerintah desa. Jika ada masyarakat yang sudah mempunyai lahan maka pemerintah tidak lagi memberi lahan tetapi memberi dana untuk membangun rumah.

Pada periode kepala desa yang saat ini sedang menjabat, masyarakat mulai ditemukan titik cerah. Kepala desa merelakan sebagian tanah keluarganya yang luas untuk dilepas pada warga di wilayah pantai dengan harga yang relatif sangat murah untuk rata-rata harga di wilayah setempat. Pada umumnya, harga tanah untuk satu rumah berkisar 10 juta namun ia menjual tanah seluas 7,5 meter kali 30 meter dengan harga 3,5 juta, itupun masyarakat masih diperbolehkan untuk mencicil.

“Iya ini diusir dari sini… disuruh pindah dari pantai trus ke sana… ke daratan. Sudah beli itu tanahnya… tinggal bangun sajaa. Itu dikasih ganti rugi… diganti tapi rugi… hahaha…” (Pawi, 67 tahun, nelayan dan pekebun)

“Memang disuruh pindah pak dari pantai ini. Sebenarnya keluarga saya sudah beli tanah di sana (menunjuk arah rerimbunan hutan), jadi tinggal bangun saja… ini bahan-bahan (papan, asbes, kayu) yang masih bisa dipakai ya dipakai. Katanya ada ganti rugi tapi tidak tau berapa…?” (Agus, nelayan, 33 tahun)

“Kami yang gak punya rumah dapat lahan baru belinya di pak Kades. Harganya 3,5 juta ukuran 7,5 m x 30 m. Murah itu dibanding rumah yang di depan ini bisa 10 juta tanahnya doang. Apalagi di belakang, tambah mahal…” (Emma, 27 tahun)

“Kami gak punya lahan jadi beli punya pak Kades. Itu di hutan sebelah sana makanya harganya murah. Banyak yang beli tanah punya pak Kades. Soalnya murah, bisa dicicil. Ini aku dicicil (Ida). Katanya rumah kami mau digusur jadi kami beli. Ya pindah, ga dipaksa. Pak Kades baik mau kasih harga murah…” (Hasna, 42 tahun)

“Rumah ini mau digusur. Sudah beli tanah dua juta per rumah. Dulu beli dari tanah pak Kades. Kalau bukan dari tanah pak Kades mana dikasih dua juta. Itu juga masih bisa dicicil. Hanya beberapa orang saja yang beli tanah dari pak Kades karena tanahnya tidak luas. Dua juta itu ukurannya 7,5 m x 30 m. Untuk meratakan tanahnya bayar lagi satu juta. Kalau di darat mahal juga main… 20-an. Ini aja yang murah karna kan lokasinya di hutan.” (Asse, 30 tahun).”

“Memang masyarakat sudah beli itu pak dari kepala desa yang sekarang. Dia punya tanah luas. Harga tiga setengah juta itu ukuran tujuh kali tiga puluh meter. Kalau bukan punya kepala desa tidak boleh harga segitu pak… rata-rata pasaran paling murah sepuluh juta pak… tergantung letaknya…” (Ajik, nelayan, 54 tahun)

“Itu tanah milik keluarga kepala desa pak yang dijual pada warga. Itu adik-adik kepala desa diajak berunding untuk bagaimana bila tanahnya dijual ke warga yang rumahnya di atas laut, agar laut ini bersih… adik-adiknya semua mau pak. Jadilah dijual pada yang rumahnya disini-sini (wilayah pantai)… jadi kami juga akhirnya mau pindah pak, karena ada kan tanah

> untuk pindah. Tidak seperti yang dulu-dulu (kepala desa lama), yang nyuruh pindah-pindah saja tapi tidak tahu bagaimana-bagaimananya…” (Paul, 40 tahun, nelayan)

Sumber: Dokumentasi Peneliti

Gambar 4.17. Proses Penimbunan Tanah Relokasi (kanan); dan Pembuatan Akses Jalan Menuju Wilayah Relokasi

Kerelaan kepala desa atas kepemilikan tanah keluarganya juga berdampak pada kerelaan warga penghuni pantai untuk direlokasi. Mereka ikhlas untuk direlokasi demi kebaikan bersama.

> “Semua yang di sini (wilayah pantai) ya beli tanah di tempat relokasi itu pak. Harga segitu… siapa yang ga mau. Karena di sini katanya mau untuk wisata percontohan… ya kami ikhlas saja pindah. Ini juga kan untuk kebaikan bersama…” (Ajik, 54 tahun, nelayan).

Rapat mengenai rencana relokasi pemukiman nelayan di atas laut yang penghuni keseluruhan adalah etnik Bugis ini sudah digelar sekali pada periode kepala desa yang menjabat saat ini. Rapat diadakan pada hari Jum’at, tanggal 13 Mei 2016. Pada rapat tersebut disosialisasikan bahwa kawasan pantai yang ada bangunan perumahan nelayan tersebut akan dijadikan kawasan wisata mangrove atau hutan bakau. Proyek ini akan menjadi percontohan bagi desa lain di wilayah Bangka Selatan apabila berhasil dijalankan. Pada momen tersebut disepakati bahwa hanya bangunan yang berada di sisi luar dam pembatas pantai saja yang akan direlokasi.

Rencana relokasi dengan cita-cita menjadikan wilayah pantai di Desa Tukak sebagai percontohan tidak selalu berjalan mulus. Meski telah dilakukan rapat koordinasi untuk relokasi rumah nelayan di wilayah pantai, tetapi tetap saja masih menemui jalan buntu. Kendala utama adalah masalah pendanaan ganti rugi, meski juga tak menutup adanya masalah lain.

Pada saat ini pemerintah desa sudah meminta kepada pemerintah pusat untuk memberikan dana untuk perumahan layak huni bagi warga Desa Tukak. Selain itu, pemerintah desa mengupayakan sebagian Alokasi Dana Desa (ADD) untuk dipakai biaya relokasi. Meskipun biaya tersebut tidak akan cukup jika digunakan untuk membangun rumah di daratan bagi masyarakat yang direlokasi.

Direncanakan, semua masyarakat yang akan direlokasi akan mendapatkan dana santunan dari pemerintah desa. Jika ada masyarakat yang sudah mempunyai lahan maka pemerintah tidak lagi memberi lahan tetapi memberi dana untuk membangun rumah.

> “…iya memang akan segera direlokasi, tetapi tidak tahu kapan akan dilaksanakan. Itu harusnya lima puluh meter dari garis pantai tidak boleh itu ada bangunan didirikan… harus dipindah bangunan yang ada di situ. Tapi ini kami masih terkendala dengan alokasi ganti rugi bangunan yang belum ada anggaran…” (Mustang, Ketua RT 05, 27 tahun)
>
> “Sudah dari yang lama pak itu rencana relokasi. Dulu itu tidak benar mengaturnya, jadi tidak jadi… batal. Katanya ada bantuan uang lima juta pak per kepala keluarga untuk agar mereka mau pindah ke sana (menunjuk arah daratan). Kita disuruh membayar dulu lima ratus ribu… katanya untuk mencairkan uang yang itu (lima juta rupiah). Saya bilang sini dulu uangnya empat juta, yang satu juta atur-aturlah situ… terserah mau pakai untuk apa… akhirnya malah itu ada dua orang datang ke sini… di situ pak (menunjuk halaman di wilayah pantai)… mereka datang mau memukul saya… katanya saya menghambat proses relokasi… menghasut masyarakat. Saya bilang… saya ini masyarakat biasa pak… bagaimana saya bisa menghasut…?” (Ajik, nelayan, 54 tahun)

> “Itu juga ada kesalahan dari masa lalu (pemerintahan desa sebelumnya)… waktu itu ada yang mengajukan permohonan sertifikat untuk tanah di situ… eh diijinkan… seharusnya tidak boleh…” (Mustang, Ketua RT 05, 27 tahun)

Relokasi perumahan warga nelayan yang ada di atas laut merupakan harapan baru untuk upaya pembebasan wilayah tersebut dari buang air besar sembarangan atau wilayah ODF (*open defecation free*). Di lokasi baru yang berupa daratan tentu saja warga tidak bisa lagi buang air sembarangan seperti pada masa masih tinggal di atas laut, yang saat buang air besar kotoran bisa langsung hanyut saat air laut pasang.

Saat ini sudah ada satu rumah yang dibangun di lokasi relokasi, sementara di sebelahnya juga sudah dibangun pondasi untuk sebuah rumah baru. Meski demikian pemilik rumah mengaku masih belum tau kapan akan pindah ke rumah baru tersebut. Saat ini dia masih tinggal di rumah papan di atas laut.

> “Belum tau kapan akan pindah pak. Itu di sana (di lokasi relokasi) belum ada fasilitas listrik yang masuk. Minimal harus ada lima rumah pak… baru bisa mengajukan untuk aliran listrik…” (Hamzah, 40 tahun, nelayan)

Sementara Emma (27 tahun, ibu rumah tangga), sudah mulai mencicil membangun pondasi rumah di lokasi relokasi;

> “…ini lagi bangun pondasi makanya kemarin suami ndak melaut. Gak pake tukang, keluarga pada bantuin. Saya cuma masak sama kasih makan mereka. Rumahnya nanti baru dibuat kalau udah ada uang lagi. Rencananya rumah ini dibuka trus dipasang lagi dijadikan dapur yang depan dibuat tembok.”

Pemilik pondasi rumah di sebelah rumah pak Hamzah ini juga mengaku tidak tahu kapan akan meneruskan pembangunan rumahnya yang saat ini sudah terhenti. “Yaa nanti nunggu duitnya ada lagi pak. Nunggu juga katanya mau akan ada bantuan untuk ganti rugi pak… entah kapan…,” katanya menerawang.

Sumber: Dokumentasi Peneliti

Gambar 4.18. Telah Berdiri Satu Bangunan dan Satu Pondasi di Wilayah Relokasi

Sementara warga masyarakat pinggir pantai lainnya yang belum bergerak, masih menunggu cairnya uang ganti rugi yang telah dijanjikan. "Yaa… saya nunggu uang ganti rugi dulu baru bikin. Macam nelayan kaya gini untuk makan sehari-hari aja susah apalagi untuk angkat rumah…," dalih Hasnah (42 tahun).

Semua warga nelayan yang memiliki rumah papan di atas laut sudah turut ambil bagian membeli tanah di wilayah relokasi. Hanya saja keterbatasan ekonomi memang bisa menjadi kendala serius, untuk itu mereka sangat berharap adanya bantuan lewat ganti rugi yang betul-betul direalisasikan. Diharapkan bantuan tersebut minimal bisa mereka pakai untuk membangun pondasi rumah. Selebihnya, untuk dinding mereka bisa mengandalkan papan kayu yang bahannya rata-rata lebih mudah mereka dapatkan.

Masyarakat mengharapkan bahwa isu pemberian dana relokasi ini bukanlah sekedar janji-janji, sekedar janji manis, tetapi benar-benar dilaksanakan seperti perkataan Kepala Desa, "...saya akan berusaha maksimal untuk masyarakat saya. Inginnya kawasan pinggir pantai bersih sehingga enak untuk dilihat," tegas Syamsudin (45 tahun, Kepala Desa).

Semua elemen sudah mengikhlaskan diri untuk hijrah ke tanah baru. Perangkat desa dan masyarakat yang akan direlokasi sudah bisa saling memahami keinginan masing-masing, demi kebaikan bersama, demi hidup yang lebih sehat dan bermartabat. Semoga harapan benar-benar bisa diwujudkan. Amin.

4.5. Kekuasaan dan Keberhasilan Pembangunan

Salah satu kunci keberhasilan pembangunan proses relokasi di Desa Tukak adalah penempatan dan pemanfaatan kekuasaan (*power*) yang efektif. Kepala desa terpilih cenderung bisa menempatkan diri, meski sebenarnya berasal dari etnik pendatang. Kepala desa terpilih, Syamsudin (45 tahun), berasal dari etnik Bugis, etnik dominan yang menghuni Desa Tukak. Meski demikian, kepala desa terpilih cenderung bisa mengayomi, mewadahi, mengambil hati etnik Melayu, yang merupakan etnik asli penghuni Desa Tukak.

Secara sederhana *power* (kekuasaan) didefinisikan oleh Dahl (1957) sebagai hal hubungan antara orang-orang, dan dinyatakan dalam notasi simbolik sederhana. Lebih lanjut Dahl mengembangkan definisi kekuasaan sebagai pernyataan kekuasaan komparatif, atau sebagai tingkat relatif kekuasaan yang dipegang oleh dua orang atau lebih. Dalam konteks Desa Tukak, komparasi kekuasaan yang terlihat dan masih eksis sampai saat penelitian dilakukan adalah komparasi kekuatan antara kepala desa terpilih, dan beberapa calon kepala desa yang gagal terpilih, termasuk diantaranya kepala desa yang lama.

Isu-isu gesekan terkait perbedaan pandangan dalam kebijakan tingkat desa antara kepala desa lama (mantan) yang asli Melayu dan kepala desa terpilih yang berasal dari Bugis masih cukup terasa saat peneliti berbaur di Desa Tukak. Meski demikian gesekan-gesekan tersebut belum cukup untuk menggeser kekuasaan kepala desa terpilih. Latar belakang sebagai etnik pendatang juga tidak cukup berpengaruh bagi masyarakat untuk menjatuhkan pilihan kekuasaan pada Syamsudin (45 tahun), sebagai kepala desa terpilih.

Perubahan kekuasaan, bertambah kuat atau bertambah lemah, hampir selalu menyebabkan perubahan perilaku. Pada kekuasaan yang bertambah kuat cenderung untuk mengambil keuntungan, tuntutan (fasilitas) akan meningkat tajam (Sivanathan, Pillutla, & Keith Murnighan, 2008). Fakta empiris yang berlaku di Desa Tukak menunjukkan realitas yang berbeda. Syamsudin dengan *track record* sebelumnya sebagai Kepala BKD yang dikenal mampu mewadahi kepentingan warga, pada saat naik menjadi kepala desa tidak menunjukkan perubahan perilaku yang berbeda untuk peningkatan keuntungan pribadi. Syamsudin justru merelakan sebagian tanah milik keluarga dilepas pada warga yang membutuhkan dengan harga yang jauh di bawah pasaran.

Kepemimpinan yang mampu menggerakkan masyarakat di Desa Tukak, berasal dari pemanfaatan kekuasaan yang efektif oleh kepala desa. Kekuasaan yang tidak hanya struktural secara administratif sebagai kepala desa, tetapi kombinasi antara kekuasaan struktural maupun kekuasaan yang dimiliki sebagai kekuasaan pribadi dalam hal status, posisi sosial, dan dominasi. Kekuasaan kombinasi yang demikian jauh lebih efektif dan memiliki daya menggerakkan dibanding hanya kekuasaan yang berlaku secara struktural saja (Anderson, John, & Keltner, 2012).

BAB V

CATATAN PENELITI

Pada bab ini kami membagi menjadi dua sub bab. Sub bab pertama adalah merupakan rangkuman yang dipaparkan sebagai sebuah kesimpulan dari buku ini, yang ditarik berdasarkan hasil yang dipaparkan pada bab-bab sebelumnya. Kesimpulan ini merupakan gambaran singkat konteks budaya yang ada dan berlaku pada etnik Bugis di Desa Tukak. Kesimpulan juga merangkum konteks kesehatan yang sedang berlangsung. Selanjutnya pada bagian akhir kesimpulan akan merangkum akses sanitasi masyarakat etnik Bugis di Desa Tukak sebagai tema utama dalam buku ini.

Sedang sub bab ke-dua membahas tentang apa yang bisa kita lakukan menyikapi kondisi yang ada dan tengah berlangsung saat ini. Peneliti mencoba memaparkan alternatif solusi yang bisa diterapkan dengan menyandarkan pada konteks lokal.

5.1. Kesimpulan

Masyarakat etnik Bugis di Desa Tukak dalam banyak hal masih mempertahankan identitas budayanya sesuai dengan kondisi etnik Bugis di daratan Sulawesi (jimat, soal pernikahan, stratifikasi sosial, bahasa). Sementara ada beberapa hal yang telah terjadi penyesuaian dan proses akulturasi dengan etnik Melayu yang merupakan penduduk asli di Desa Tukak. Hal ini terlihat dalam beberapa kaitan kegiatan keagamaan.

Mata pencaharian masyarakat etnik Bugis di Desa Tukak yang mendiami pemukiman pantai hampir seluruhnya adalah nelayan.

Mereka pergi ke laut untuk mencari ikan atau ketam, meski tidak menampik beberapa dari mereka juga berkebun *sahang* (lada), kelapa sawit, nanas, dan juga menanam pohon karet. Sementara para ibu rumah tangga juga bekerja sambilan sebagai pengupas ketam hasil tangkapan suaminya.

Dalam pandangan masyarakat yang tinggal di daratan, masyarakat etnik Bugis yang tinggal di pemukiman pantai itu cenderung jorok, berperilaku tidak sehat dan seenaknya sendiri terkait soal sampah dan perilaku sanitasi lainnya. Pandangan seperti ini dinyatakan oleh etnik Melayu dan juga etnik Bugis sendiri.

Masyarakat etnik Bugis yang tinggal di pemukiman pantai secara dominan adalah masyarakat ekonomi lemah, cenderung miskin. Karena itu kebanyakan dari mereka memiliki kartu BPJS, kartu KIS atau kartu JKBS (jaminan kesehatan milik pemerintah daerah), untuk jaminan pembiayaan kesehatannya yang ditanggung oleh pemerintah. Meski kartu-kartu jaminan pembiayaan kesehatan tersebut hampir tidak pernah mereka pergunakan.

Konsep sehat-sakit masyarakat etnik Bugis di Desa Tukak cenderung pada konsep fungsi sosial. Masyarakat dikatakan sakit apabila sudah tidak bisa bangun, tidak bisa beraktivitas, tidak berfungsi secara sosial. Sementara untuk penyakit kulit (dermatitis), masyarakat cenderung menganggap sebagai suatu hal yang biasa, karena fungsi secara sosial tidak terganggu.

Pola pencarian pengobatan yang berlaku di masyarakat etnik Bugis di Desa Tukak terdiri dari tiga tahapan; tahap pertama swa medikasi, kemudian ke pengobat tradisional (s*andro)*, dan ke tiga akses ke tenaga kesehatan. Meski juga ada sebagian yang melewati tahap ke dua, langsung ke tenaga kesehatan setelah tahap pertama, swa medikasi, dianggap tidak berhasil.

Fasilitas pelayanan kesehatan dasar secara formal telah tersedia, namun akseptabilitas masyarakat terhadap pelayanan tersebut dirasakan masih sangat rendah. Masyarakat merasa pelayanan pengobatan tenaga kesehatan (perawat dan bidan) di luar Puskesmas,

di luar jam kerja, justru cenderung lebih bagus. Meski sebenarnya praktik semacam itu secara etik melanggar undang-undang.

Kondisi lingkungan etnik Bugis di Desa Tukak berpotensi untuk timbulnya cedera. Tidak hanya kecelakaan kerja di laut sebagai nelayan saja, tetapi juga potensi cedera bagi anak-anak sebagai akibat konstruksi pemukiman yang terbuat dari kayu yang terkesan kurang rapi dan lapuk.

Pencapaian Desa Tukak sebagai desa ODF tidak sesuai dengan kenyataan kondisi di lapangan. Masih banyak masyarakat yang tidak mempunyai fasilitas MCK sehat dan berperilaku buang air besar sembarangan. Akses sanitasi masyarakat etnik Bugis di pemukiman pantai sangat rendah, dan bahkan nol. Seluruh aktivitas MCK dilakukan di rumah, di atas air laut. Dibangunnya fasilitas MCK umum tidak mengubah perilaku mereka untuk dapat memanfaatkan fasilitas tersebut. Akses fasilitas MCK hanya berkaitan dengan kebutuhan air bersih, bukan sanitasi.

Konsep bersih-kotor yang berlaku pada masyarakat etnik Bugis di Desa Tukak mempunyai ambang batas yang sangat longgar. Masyarakat sudah terbiasa untuk hidup di'atas' sampah, sudah tidak lagi risih dengan adanya sampah di sekitar wilayah pemukiman, meskipun secara sadar mereka mengetahui dampak dan konsekuensi yang ditimbulkan oleh keberadaan sampah-sampah tersebut.

Rencana relokasi pemukiman masyarakat etnik Bugis di pantai menuju daratan hanya tinggal menunggu waktu. Hal ini merupakan peluang atau kesempatan untuk sekaligus menginisiasi rencana relokasi sanitasi. Memotivasi masyarakat agar juga turut membangun fasilitas MCK, bersamaan dengan membangun pemukiman baru. Hal ini juga sekaligus dibarengi dengan upaya motivasi untuk pemanfaatannya, mengubah perilaku masyarakat menuju sanitasi total.

Salah satu kunci sukses upaya relokasi di Desa Tukak adalah kepemimpinan yang efektif. Hal ini ditunjukkan oleh kepala desa yang mampu mengelola kekuasaan yang dimiliki untuk sebesar-besar keuntungan bagi kemaslahatan masyarakat yang dipimpinnya.

5.2. Apa yang Bisa Kita Lakukan?

Pada sub bab ini kami mencoba menyikapi dengan memanfaatkan momen relokasi yang akan segera dilakukan di wilayah pantai Desa Tukak. Momen relokasi perkampungan nelayan Bugis di atas laut ini harus bisa dimanfaatkan dengan baik. Tenaga kesehatan bisa masuk melakukan pencerahan tentang sanitasi, konsep bersih-kotor dan mengupayakan perubahan perilaku, terutama tentang pemakaian jamban sehat. Penataan fasilitas MCK di rumah warga bisa diintervensi sedari awal, pada saat ini, sebelum bangunan-bangunan permanen pemukiman mulai didirikan.

Sedikitnya kami menawarkan dua pilihan alternatif untuk mendirikan fasilitas MCK bagi rumah warga nelayan di wilayah relokasi. Keduanya tentu saja dengan keunggulan dan kelemahannya masing-masing, tetapi dengan catatan lebih ekonomis dibanding apabila warga nelayan membangunnya secara sendiri-sendiri di rumah;

1. Model pertama adalah fasilitas MCK umum. Hal ini sama dengan periode sebelumnya, yaitu membangun fasilitas MCK untuk umum. Tentu saja juga dibarengi dengan sosialisasi dan motivasi agar masyarakat berkenan untuk buang hajatnya di fasilitas umum ini. Untuk mengubah perilaku memang tidak bisa hanya dimotivasi sekali-dua kali, petugas harus bisa berbaur dan turut ‘menjadi warga’, tidak hanya ‘menjadi petugas’ saja, yang hanya datang sesekali lalu pergi.

   Keunggulan fasilitas MCK umum ini bisa dibangun cukup murah dengan fasilitas kamar mandi, jamban dan cuci yang terpusat. Sedang kelemahannya secara umum adalah terjadinya rebutan saat terjadi kepadatan pemakaian pada jam-jam biologis buang air besar. Hal ini berpotensi untuk rawan konflik di saat kebutuhan datang mendesak. Selain itu, pergi ke tempat lain untuk kegiatan yang bersifat privasi juga memicu warga untuk malas datang ke fasilitas umum tersebut.

2. Model kedua adalah model multi jamban dengan *single septic-tank*. Model ini adalah dengan menempatkan jamban ada

di rumah masing-masing warga, tetapi dengan membangun *septictank* atau sumur penampung tinjanya secara bersama-sama terkumpul di satu tempat dengan ukuran yang relatif besar, yang diperkirakan cukup untuk menampung kiriman tinja dari 8-10 jamban. Model ini pernah dipublikasikan oleh World Bank Kantor Jakarta pada tahun 2009[49].

Pilihan kedua ini memang sedikit lebih mahal dibanding pilihan pertama, tetapi keunggulannya adalah bahwa jamban ada di rumah masing-masing warga. Hal ini untuk meningkatkan perilaku pemakaian jamban sehat di rumah tangga, karena privasinya jauh lebih terjaga. Sementara secara biaya pembangunannya juga lebih murah apabila warga nelayan membangun fasilitas MCK sendiri-sendiri antara jamban dan *septictank*-nya di rumah masing-masing.
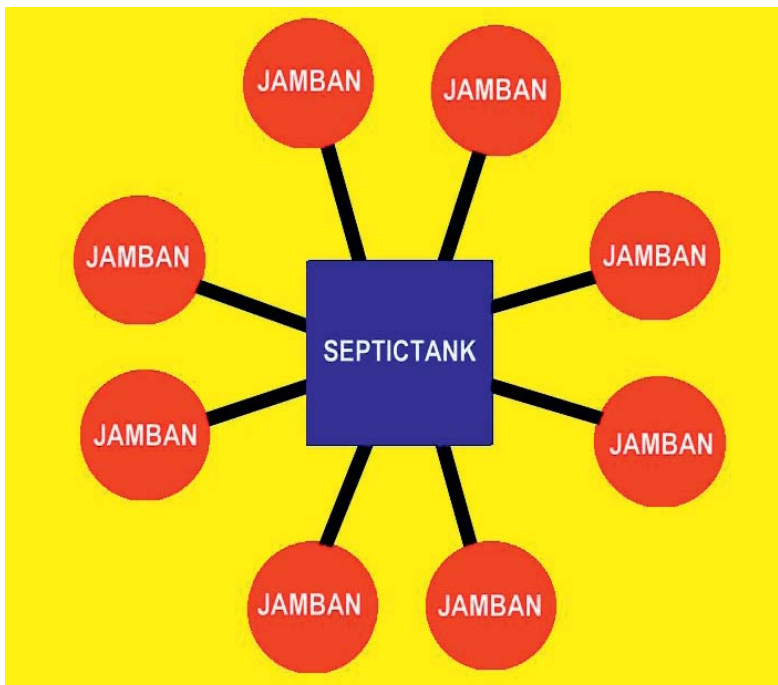
Sumber: Visualisasi Peneliti

Gambar 5.1. Model Multi Jamban dengan *Single Septictank*

49 Lebih lanjut periksa World Bank Office Jakarta, 2009. *Informasi Pilihan Jamban Sehat*. Water and Sanitation Program East Asia and the Pacific, Jakarta. Halaman 19

Sedang untuk pilihan bangunan fasilitas MCK yang lebih ekonomis bisa dilakukan dengan mendirikan bangunan tidak permanen. Bangunan didirikan dengan dinding dari papan, anyaman bambu, seng, atau asbes. Sedang atap bangunan fasilitas MCK bisa ditutup dengan atap rumbia, seng, atau asbes, atau bahkan tanpa atap bila memang benar-benar dana yang tersedia minim.
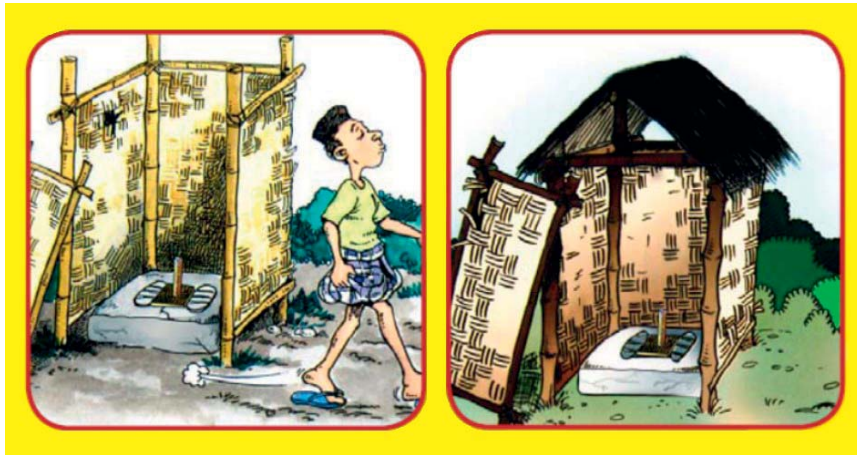
Sumber: World Bank Office Jakarta, 2009

Gambar 5.2. Bangunan MCK Semi Permanen[50]

Harapan baru sudah seharusnya dipupuk dan diupayakan dengan berpindahnya masyarakat nelayan di rumah baru. Relokasi adalah upaya yang sangat masuk akal, apalagi dilakukan dengan pendekatan yang cukup humanis, memanusiakan manusia. Sebuah upaya yang menjadikan manusia tidak sekedar sebagai obyek pembangunan, tetapi memposisikan manusia justru sebagai subyek pembangunan itu sendiri, dengan harapan pembangunan tidak menghilangkan sisi kemanusiaan. Hal inilah yang akan menjadikan pembangunan dapat dirasakan bermanfaat dan berkesinambungan bagi semua lapisan masyarakat.

---

50 *Ibid*. Halaman 1

DAFTAR PUSTAKA

Anderson, C., John, O. P., & Keltner, D. (2012). The Personal Sense of Power. *Journal of Personality*, *80*(2), 313–344. http://doi.org/10.1111/j.1467-6494.2011.00734.x

Ardhani, F. (2015). Perbedaan Kepuasan Perkawinan pada Wanita Suku Bugis, Jawa, dan Banjar di Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan. *eJournal Psikologi*, Volume 3, Nomor 1, 2015

http://ejournal.psikologi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2015/02/Jurnal%20Fitri%20(02-18-15-05-00-24).pdf

Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI. (2013). *Laporan Nasional Riset Kesehatan Dasar tahun 2013*. Balitbangkes, Jakarta

Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2014). *Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat 2013*. Badan Litbangkes, Jakarta

Bahfiarti, T. (2011). Mistifikasi 'Bissu' Dalam Upacara Ritual Adat Etnik Bugis Makassar (Kajian Studi Dramaturgi). *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 1, No.2, Oktober 2011

http://jurnalilkom.uinsby.ac.id/index.php/jurnalilkom/article/view/20/16

Dahl, R. (1957). The Concept of Power. *Behavioral Science*, *2*(3), 201.

http://doi.org/10.1002/bs.3830020303

Dahlgren, G. dan Whitehead, M. (1991). *Policies and Strategies to Promote Social Equity in Health*. Institute for Futures Studies, Stockholm

Direktorat Penyehatan Lingkungan, Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2013). *Road Map Percepatan Program STBM 2013-2015*. Direktorat Penyehatan Lingkungan, Jakarta

Djoht, D. R. (2002). Penerapan Ilmu Anthropologi Kesehatan dalam Pembangunan Kesehatan Masyarakat Papua. *Jurnal Antropologi Papua.* Volume 1, Nomor 1, Agustus 2002

Fabrega, Horacio, Jr. (1970). Medical Anthropology. Dalam *Bienial Review of Anthropology* B.H. Siegel, editor. Stanford University Press, Stanford, California

Foster dan Anderson (1986). *Antropologi Kesehatan*, Grafiti, Jakarta

Global Health Workforce Alliance, WHO (2016). *What do we mean by availability, accessibility, acceptability and quality (AAAQ) of the health workforce?* WHO, Geneva

http://www.who.int/workforcealliance/media/qa/04/en/

Hamzah, A., Sukri, Jompa, H. (2007). Perilaku Menyusui Bayi pada etnik Bugis di Pekkae. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional,* Volume 1, Nomor 5, April 2007

http://jurnalkesmas.ui.ac.id/index.php/kesmas/article/view/290

Huslan, Bahar, B., Syam, A., Zakaria (2011). Pola Asuhan Gizi Pemberian ASI dan MP-ASI Anak Baduta Keluarga Etnik Bugis Manuba. Media Gizi Pangan, Vol. XI, Edisi 1, Januari – Juni 2011

https://jurnalmediagizipangan.files.wordpress.com/2012/03/9-pola-asuhan-gizi

Ingleby, D. (2012). Ethnicity, Migration and the ‘Social Determinants of Health’ Agenda. *Psychosocial Intervention*, Volume 21, Nomor 3, 2012

Ipa, M., Prasetyo, D.A., Arifin, J., Kasnodihardjo (2014). *Balutan Pikukuh Persalinan Baduy*. Lembaga Penerbit Balitbangkes, Jakarta

https://www.scribd.com/doc/261677465/Balutan-Pikukuh-Persalinan-Baduy-Riset-Ethnografi-Kesehatan-2014-LEBAK

Ismail, W. H. W. (2012). Cultural Determinants in the Design of Bugis Houses. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, *50*, 771–780. http://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.08.079

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2008). *Laporan Nasional Riset Kesehatan Dasar tahun 2007-2008*. Balitbangkes, Jakarta

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2014). *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat*. Kemenkes RI, Jakarta

Kristiana, L., Murwanto, T., Dwiningsih, S., Sapardi, H., Kasnodihardjo (2012). *Buku Seri Etnografi Kesehatan Ibu dan Anak 2012. Etnik Jawa, Desa Gading Sari, Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*. Pusat Humaniora, Kebijakan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Surabaya

https://www.scribd.com/doc/142690361/Buku-Seri-Etnografi-Kesehatan-Ibu-dan-Anak-2012-Etnik-Jawa-Desa-Gading-Sari-Kecamatan-Sanden-Kabupaten-Bantul-Provinsi-DaerahIstimewa-Yogyakarta

Kurniawan, S.A., Hartatik, F.S., Jeniva, I., Putro, G. (2014). *Tetesan Danum Tawar di Desa Seribu Akar. Buku Seri Etnografi Kesehatan 2014*. Lembaga Penerbit Balitbangkes, Jakarta

https://www.scribd.com/doc/261676756/Tetesan-Danum-Tawar-di-Dusun-Seribu-Akar-Riset-Ethnografi-Kesehatan-2014-KAPUAS

Kusumawardani, N., Soerachman, R., Permana, M., Gullit, M. (2015). *Kabupaten Murung Raya Mengejar Ketertinggalan; Tira Tangka Balang (Maju Terus Pantang Mundur) untuk Perbaikan Status Kesehatan.* Penerbit Kanisius, Yogyakarta

https://www.scribd.com/doc/301283615/Seri-Studi-Kualitatif-IPKM-Tira-Tangka-Balang-Pengalaman-Kabupaten-Murung-Raya-Mengejar-Ketertinggalan-dalam-Pembangunan-Kesehatan

Laksmiarti, T., Kusnali, A., Ardhani, I., Subhansyah (2015). *Potret Kota Padang Sidempuan dalam Permasalahan Gizi Balita dan Kesehatan Lingkungan.* Penerbit Kanisius, Yogyakarta

https://www.scribd.com/doc/301280714/Seri-Studi-Kualitatif-IPKM-Potret-Kota-Padang-Sidempuan-dalam-Permasalahan-Gizi-Balita-dan-Kesehatan-Lingkungan

Laksono, A.D., dan Rachmawati, T. (2013). *Determinan Sosial Kesehatan Ibu dan Anak.* Penerbit Kanisius, Yogyakarta

https://www.scribd.com/doc/152063074/Determinan-Sosial-Kesehatan-Ibu-dan-Anak

Laksono, A.D., Faizin, K., Raunsay, E.M., Soerachman, R. (2014). *Perempuan Muyu dalam Pengasingan*. Lembaga Penerbit Balitbangkes, Jakarta

https://www.scribd.com/doc/261673624/Perempuan-Muyu-dalam-Pengasingan-Riset-Ethnografi-Kesehatan-2014-Boven-Digoel

Laksono, A.D., Ipa, M, Kusrini, I., Sudrajat, A. (2015). *Geliat Sistemik Kabupaten Lombok Barat, Upaya Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Lombok Barat.* Kanisius, Yogjakarta

https://www.scribd.com/doc/277335417/Seri-Studi-Kualitatif-IPKM-Geliat-Sistemik-Kabupaten-Lombok-Barat

Marmot, M. dan Wilkinson, R., Editor (2005). *Social Determinant of Health. Second Edition.* Oxford University Press, London

Ningsi, Nggeolima, R.A., Hamzah, S., Handayani, L. (2014). *Rekam Jejak Terengi.* Lembaga Penerbit Balitbangkes, Jakarta

https://www.scribd.com/doc/261673246/Rekam-Jejak-Terengi-Riset-Ethnografi-Kesehatan-2014-BOALEMO

Panggalo, F. (2013). Perilaku Komunikasi Antarbudaya Etnik Toraja dan Etnik Bugis Makassar di Kota Makassar. *Skripsi*. Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, Makassar

http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/8330/Skripsi.pdf?sequence=1

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Depdiknas, Jakarta

Pusat Promosi Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI. (2016). *Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengembangan UKBM*. Kementerian Kesehatan RI., Jakarta

http://promkes.depkes.go.id/pemberdayaan-masyarakat

Rasyid, M.R. (2014). Pola Interaksi Sosial Etnis Bugis Makassar: Dinamika Kerukunan Hidup Umat Beragama di Kota Sorong. *Jurnal "Al-Qalam"*, Volume 20 Nomor 1 Juni 2014

http://jurnalalqalam.or.id/index.php/Alqalam/article/viewFile/179/163

Reinke, W.A., editor, (1988). *Health Planning for Effective Management*. Oxford University Press, New York

Sarwono, S. (1993). *Sosiologi Kesehatan, Beberapa Konsep Beserta Aplikasinya*. Gadjah Mada Press, Yogyakarta

Sivanathan, N., Pillutla, M. M., & Keith Murnighan, J. (2008). Power gained, power lost. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, *105*(2), 135–146. http://doi.org/10.1016/j.obhdp.2007.10.003

Spradley, J.P. (1997). *Metode Etnografi.* PT. Tiara Wacana, Yogyakarta

TSSM Provinsi Jawa Timur (2013). *Materi Dakwah Sanitasi STBM*. Diterbitkan atas kerja sama Pemerintah Indonesia, MUI Jawa Timur, IAIN Surabaya, WSP-EAP/TSSM, Gates Foundation, Surabaya

Wiyata, A.L. (2002). *Carok, Konflik Kekerasan dan Harga Diri Orang Madura*. LKiS, Yogyakarta

World Bank Office Jakarta (2009). *Informasi Pilihan Jamban Sehat*. Water and Sanitation Program East Asia and the Pacific, Jakarta

World Health Organization (2011). World Conference on Social Determinants of Health. *Meeting Report.* Rio de Janeiro. 19-21 Oktober 2011

INDEKS

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

W

GLOSARIUM

Air terentang	Air yang bersumber dari mata air besar.
Air tumbek	Air yang mempunyai mata air kecil, mengalir mencari dataran rendah, bermuara ke laut Tukak. Biasa juga disebut sebagai air kolong, karena tidak ada aliran air dari atas. Sumber mata air besar dari desa lain.
Amure	Paman/Bibi.
Anak dara	Anak perempuan.
Andriang	Lauk pauk.
Atok	Kakek.
Belong	Wadah untuk membawa umpan dan hasil ikan kepetek.
Berowo	Sampah.
Berowo	Sampah.
Betunang	Pacaran.
Bola	Rumah.
Bola tande	Rumah panggung.
Boso	Suatu titik di laut dimana ikan seringkali ber-kumpul.
Boting	Pernikahan.
Budak	Anak, bahasa Melayu.
Bukkang	Ketam.
Cangkuling	Kepercayaan tolak bala etnik Bugis yang terbuat dari kelapa, gula merah dan serpihan wajan sebagai penangkal hal buruk. Biasanya ditanam saat membangun pondasi rumah.
Cedde	Sedikit.
Celegong	Kayu yang sudah lapuk.
Ceme	Mandi.
Cemme	Mandi.

Cenggong-cenggong	Kadang disebut juga sebagai pance. Permainan anak Bugis yang mirip dengan permainan petak umpet atau delikan dalam tradisi Jawa.
Dare	Kebun.
Dayang	Perempuan
Endogami	Prinsip perkawinan etnik Bugis yang mengharuskan orang untuk mencari jodoh di lingkungan sosialnya sendiri, misal di lingkungan kerabat, lingkungan kelas sosial, atau lingkungan pemukiman. Pengertian lainnya adalah proses reproduksi secara perkawinan antar individu yang sangat dekat kekerabatannya.
Gelam	Jenis salah satu kayu, selain seruk, yang dipakai sebagai tiang penyangga rumah panggung di atas laut.
Ipa	Ipar.
Jamang	Sedang punya hajat.
Jambal	Buang air besar.
Jamur	Akronim dari 'Janda di Bawah Umur', yang cukup popular di kalangan masyarakat Desa Tukak.
Jerambah	Jembatan kayu menuju rumah panggung di atas pantai/laut.
Joka-joka	Jalan-jalan.
Joli	Diare.
Junjung bedaru	Tiang sahang atau lada.
Junjung besaoh	Semboyan Kabupaten Bangka Selatan, yang artinya diangkat atau dikerjakan bersama-sama.
Kalolo	Bujangan.
Kapla	Kapal.
Kelasi	Buruh nelayan.
Keremango	Jenis kepiting bakau.
Kurue	Sayang.
Laleng	Jalan.
Laleng papeng	Jalan papan.
Langge	Berenang.
Lasa	Penyakit.
Lempa	Masakan khas Melayu dengan citarasa pedas, bersantan, berwarna kuning tua sebagai akibat campuran bumbu kunyit di dalamnya.
Mabelanca	Belanja.
Mabicara	Bercengkerama.
Mabissa	Cebok.

Mabura	Berobat.
Macule	Bermain.
Makarame	Becek.
Makunray	Perempuan.
Malo	Terluka.
Malolo	Muda.
Mameng	Memancing.
Mamiccu	Meludah.
Mandrre	Makan.
Mannasu	Memasak.
mapaccing	Bersih.
Mapela	Cuaca panas.
Mapelisse	Kupas ketam.
Masesa	Mencuci.
Massering	Menyapu.
Matassi	Melaut.
Matindrro	Tidur.
Maulid	Peringatan hari besar Islam untuk merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW.
Meciddi	Jijik atau jorok.
Mecua	Usia lanjut.
Meddu	Jatuh.
Medoko	Sakit.
Mejemeng	Kotor.
Minta alok	Mencari perhatian anak gadis.
Minung	Minum.
Nange	Berenang.
Ngelas	Kupas ketam.
Nure	Keponakan.
Pance	Kadang disebut juga sebagai cenggong-cenggong. Permainan anak Bugis yang mirip dengan permainan petak umpet atau delikan dalam tradisi Jawa.
Papeng	Papan.
Papenrre	Mahar.
Paplise	Buruh pengupas ketam.
Patongkak	Tiang pondasi rumah kayu di atas pantai.
Pedikpoku	Diare/mencret.
Ponceng	Jimat.
Rasarasa	Minuman sachet.

Ruwahan	Tradisi Melayu. Acara semacam syukuran menjelang bulan puasa. Setiap orang dipersilahkan untuk berkunjung ke setiap rumah untuk makan bersama.
Sahang	Lada atau merica dalam bahasa Jawa.
Sandro	Dukun, pengobat tradisional etnik Bugis.
Sandro	Dukun.
Sandro makiana	Dukun bersalin.
Sapautu	Mencari kutu.
Sepintu sedulang	Acara sedekahan dengan memberikan makanan berat kepada siapa saja yang berkenan. Biasanya pada acara maulid dan ruwahan.
Serujo	Keranjang telur yang biasa dipakai untuk acara maulid atau ruwahan.
Seruk	Jenis salah satu kayu, selain gelam, yang dipakai sebagai tiang penyangga rumah panggung di atas laut.
Setang	Hantu.
Sholawatan	Sebuah acara dalam tradisi Islam dengan mengagung-agungkan Nabi Muhammad SAW.
Tahlilan	Secbuah acara dalam tradisi Islam untuk kirim doa bagi keluarga yang sudah meninggal.
Talud	Dam penahan ombak agar daratan tidak tergerus ombak.
Tange	Pintu.
Tasi	Laut.
Temeh	Buang air kecil.
Teri	Menangis.
Tokke	Pengepul.
Topole	Bertamu.
Ujung	Istilah orang pantai untuk menyebut orang yang tinggal di daratan.
Unak Urane	Anak laki-laki.
Urane	Laki-laki.

TENTANG PENULIS

Agung Dwi Laksono, adalah seorang peneliti di Pusat Humaniora dan Manajemen Kesehatan. Peneliti yang sempat bekerja sebagai wartawan di Harian Jawa Pos ini pernah mengenyam pekerjaan di Puskesmas Pagerwojo, Kabupaten Tulungagung setidaknya sampai lima tahun sebelum akhirnya berada di tempat bekerja yang sekarang.

Agung yang berlatar belakang pendidikan S1 *public health* dan Master Ilmu Kesehatan Masyarakat dengan konsentrasi Analisis Kebijakan Kesehatan ini aktif di dunia maya, setidaknya aktif di jejaring sosial, beberapa milis kesehatan, maupun sebagai *blogger.* Ia bersama-sama dengan penggiat *public health* lainnya mengusung *genre public health versi 2.0*, yang oleh beberapa penggiat diyakini sebagai gerakan *public health* era baru, gerakan *public health* yang memanfaatkan kemutakhiran teknologi informasi sebagai sarana penyampaian informasi.

Saat ini aktif di Asosiasi Peneliti Kesehatan Indonesia (APKESI). Selain itu juga mengemban Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Perhimpunan Sarjana Kesehatan Masyarakat Indonesia (PERSAKMI).

Selain itu, aktif di dunia LSM (NGO). Bersama-sama dengan beberapa teman lain mendirikan Pusat Pengembangan Kesehatan

Masyarakat “KESUMA” tahun 1998-2001. Kemudian bersama-sama beberapa aktivis kesehatan masyarakat mendirikan *Health Advocacy* (Yayasan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat) yang berlangsung hingga sekarang.

Dengan gaya bahasa populer, Agung berusaha menempatkan setiap tulisannya mampu untuk diterima kalangan muda, sasaran tembak paling produktif menurut dia. Beberapa buku telah ditulis dengan gaya populer, meski juga terselip beberapa buku serius sebagai buku publikasi hasil kajian dan atau penelitian yang digelutinya.

Untuk sarana korespondensi bisa melalui:

- E mail : agung_dwilaksono@yahoo.co.id
- Facebook : facebook.com/papsagung
- Twitter : @gung_dl
- Scribd : agungdl
- Blogger : healthadvocacy1.blogspot.com
- Kompasiana : kompasiana.com/adl

Roland Alberto Nggeo-lima, lahir 12 Agustus 1983 dari keluarga pensiunan PNS dan Guru. Laki-laki hitam manis dari Kota Kupang Provinsi NTT ini memiliki latar belakang pendidik-an S1 Kesehatan Masyarakat dari Universitas Nusa Cendana tahun 2006 di tempat asalnya. Sejak saat itu, terlibat dalam proyek Plan International berbasis Kesehatan masyarakat di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) dan Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) sebagai enumerator PHBS dan fasilitator Malaria.

Awal tahun 2008 hingga akhir tahun 2010 dipercaya sebagai staf Koordinator administrasi PPCU-SPH-HSSP (*Provincial Project Coordinator Unit-Sector Programe Health-Health Sector Support Project*) pada Dinas Kesehatan Provinsi NTT dimana kegiatan sinergi dengan Non Govermant Organisation (NGO) yang memiliki visi dan misi sama dalam bidang kesehatan. Januari 2011, karakternya diasah besama ibu-ibu Posyandu selama 1 tahun 9 bulan sebagai fasilitator NICE (*Nutrition Improve Community Empowerment*) di bawah naungan Dinas Kesehatan Kota Kupang.

Kariernya vakum selama 4 bulan karena kalah persaingan kolusi dan nepotisme yang marak dipraktikan dalam hal perebutan pekerjaan di Kota Kupang. Bulan kelahiran pada tahun 2013 membawa berkah tersendiri, Roland diterima menjadi tenaga pendamping masyarakat di Kabupaten Sumba Tengah selama 8 bulan dalam P4-ISDA-IK (Program Percepatan Perluasan Pembangunan Pengembangan Infrastruktur Sumber Daya Irigasi Kecil), salah satu program unggulan dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU) waktu itu.

Menjadi pribadi dengan sudut pandang etnografi dimulai sejak mengikuti Riset Etnografi Kesehatan seri ke-2 yang diselenggarakan oleh Pusat Humaniora, Kebijakan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat. Pada kesempatan pertama tersebut, Roland ditempatkan di Kabupaten Boalemo untuk belajar pada etnik Gorontalo.

Sejak bergabung dengan Riset Etnografi Kesehatan tahun 2014 sampai dengan 2016, Roland terus disentil untuk, "Jangan hanya NTT saja, lihatlah Indonesia itu luas dan kaya budaya kesehatan, ini tugas berat kalau bukan kita siapa lagi". Bermodal senyum, santun dan kerendahan hati, tim kami dapat menjalin komunikasi, mengurai cara padang orang-orang yang terlupakan, tertawa bahkan menangis bersama mereka saat berpisah.

Tentu saja sumbangsih karya tulis ini belum dapat menyaingi para penulis hebat di Indonesia. Namun data, fakta, persepsi, analisis yang disatukan di setiap lembaran buku Riset Etnografi Kesehatan dapat menambah warna baru pada buku-buku kesehatan di Indonesia.

Dua buku etnografi kesehatan yang telah berhasil diterbitkan adalah:

1. Rekam Jejak Terengi, Etnik Gorontalo, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo. 2014. Lembaga Penerbit Balitbangkes.
2. Rohili si Penyambut Bayi, Etnik Sabu, Kabupaten Sabu Raijua, Provinsi Nusa Tenggara Timur. 2015. Lembaga Penerbit Balitbangkes.

   Untuk sarana korespondensi bisa melalui:

   Email : roland.nggeolima@gmail.com

   nggeolima.roland@yahoo.co.id

Mellyza Margareth adalah seorang antropolog lulusan dari Universitas Padjadjaran. Mellyza, demikian dia akrab dipanggil, pernah menda-patkan beasiswa selama kuliah di UNPAD dan memenangkan juara kewirausa-haan yang diperuntukkan bagi mahasiswa seluruh Indonesia. Setelah lulus, ia pernah bekerja sebagai staf pajak di salah satu perusahaan swasta di Bandung. Tak lama, Mellyza memutuskan untuk bekerja sesuai dengan bidang keilmuan yang telah ia pelajari di bangku perkuliahan. Ia pun bekerja sebagai peneliti sosial, selain juga pernah bekerja sebagai *consultant project* di *Save the Children* (NGO International).

Mellyza pernah melakukan penelitian merambah sampai ke tanah Papua, Papua Barat, Jawa dan Sumatera. Di sela-sela penelitiannya, ia pernah terlibat dalam pelatihan penulisan populer. Dalam akhir pelatihan, Mellyza menyerahkan tulisannya untuk dimuat di surat Kabar Pikiran Rakyat dengan judul “Dampak Terbesar Menimpa Perempuan”.

Dalam beberapa bulan terakhir ini, Mellyza terlibat dengan Riset Etnografi Kesehatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan RI. Mellyza dan tim ditempatkan di Kabupaten Bangka Selatan dengan mengusung tema Relokasi Sanitasi. Hasil penelitian ini dituangkan di dalam buku dengan gaya bahasa yang mudah dipahami oleh sebagian besar masyarakat. Buku ini merupakan buku pertama yang Mellyza tulis, semoga bermanfaat. Selamat membaca.